



PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
2. Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan sebagai acuan penyusunan:

- a. rencana kerja Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
- b. rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1040), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2025

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDIYANTI PUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PARIWISATA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM SEKTOR PARIWISATA

Sektor pariwisata berperan penting dan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran visi Indonesia Emas 2045. Potensi kekayaan alam dan keberagaman budaya yang besar meneguhkan pariwisata sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga industri kreatif. Pada saat yang sama, pariwisata juga memiliki nilai strategis karena eksistensinya yang sarat melibatkan lintas sektor, serta mendorong transformasi struktural ekonomi pada level regional dan nasional yang lebih inklusif, resiliensi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata tidak hanya menjadi pilar pertumbuhan perekonomian, tetapi juga instrumen krusial dalam membentuk daya saing nasional pada jangka panjang.

Sektor pariwisata menunjukkan pemulihan yang progresif pascapandemi Covid-19, berdasarkan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) Tahun 2020-2024, tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebesar 18% (delapan belas persen), dan pertumbuhan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 4,04% (empat koma nol empat persen) di semester I tahun 2024. Pada periode 2023-2024, pariwisata juga berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja serta pemulihan ekonomi daerah berbasis destinasi unggulan. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan daya saing antar wilayah, kualitas infrastruktur dasar dan penunjang pariwisata yang belum merata, rendahnya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, dan transformasi digital yang belum optimal serta pemanfaatan *big data* dalam pengelolaan destinasi pariwisata.

Di sisi lain, dinamika eksternal turut memengaruhi arah dan kinerja sektor pariwisata ke depan. Perubahan preferensi wisatawan ke arah pariwisata yang lebih berkelanjutan, personal, dan digital mendorong kebutuhan adaptasi model bisnis dan pengelolaan destinasi. Tekanan global akibat krisis perubahan iklim, ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan potensi krisis kesehatan baru juga menjadi variabel yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas dan pertumbuhan sektor ini. Selain itu, kompetisi antarnegara dalam merebut pangsa pasar pariwisata internasional semakin ketat, mengharuskan Indonesia untuk memperkuat *branding*,

meningkatkan standar layanan, dan mengakselerasi inovasi produk-produk pariwisata berbasis keunggulan lokal dan teknologi.

Di tengah tantangan internal dan dinamika eksternal tersebut, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dengan belajar dari keberhasilan negara-negara yang telah menunjukkan kinerja unggul dalam pengembangan sektor pariwisata. Peringkat atas dalam *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) Tahun 2024 umumnya ditempati oleh negara-negara dengan tata kelola pariwisata yang efektif dan kebijakan lintas sektor yang adaptif sehingga mampu mendorong kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, misalnya Amerika Serikat berhasil memulihkan sektor pariwisatanya melalui *National Travel and Tourism Strategy 2022*, sementara Spanyol memanfaatkan dana pemulihan Uni Eropa melalui *Sustainable Tourism Strategy 2030*. Di kawasan Asia, Jepang menggunakan koridor *Tourism Nation Promotion Basic Plan* untuk memprioritaskan promosi destinasi regional dan berhasil mencatat pertumbuhan 34% (tiga puluh empat persen) pada tahun 2023. Prancis menginvestasikan €1,9 miliar (satu koma sembilan miliar euro) dalam inovasi melalui *Plan Destination France*, sementara Australia melalui *THRIVE 2030 strategy sets out a long-term plan for growing Australia’s visitor economy* menekankan diversifikasi dan digitalisasi dengan proyeksi kontribusi 10% (sepuluh persen) terhadap PDB pada tahun 2024 (Lihat Tabel 1.1). Keberhasilan strategi negara-negara tersebut menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat daya saing sektor pariwisatanya melalui tata kelola yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi jangka panjang.

Tabel 1.1. Pembelajaran Strategi Kebijakan dan Kontribusi Perekonomian pada 5 (lima) Negara 20 (dua puluh) Besar Dunia (Berdasarkan TTDI 2024)

Negara (Skor TTDI)	Strategi Kebijakan	Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan	Kontribusi		
			PDB	Tenaga kerja	Tren
Amerika Serikat (5,24)	Melaksanakan <i>National Travel and Tourism Strategy</i> yang menargetkan 90 juta wisatawan mancanegara per tahun pada 2027 (tercapai lebih cepat pada 2026). Fokus strategi ini pada pemulihan pascapandemi dengan meningkatkan daya saing pariwisata,	<i>National Travel and Tourism Strategy 2022</i> merupakan strategi nasional untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai	≈8,8%	18 juta (11,2%)	Pulih sepenuhnya pascapandemi dengan kontribusi tahun 2023 melampaui capaian 2019

Negara (Skor TTDI)	Strategi Kebijakan	Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan	Kontribusi		
			PDB	Tenaga kerja	Tren
	kemitraan pemerintah-swasta, dan menjadikan industri lebih berkelanjutan, inklusif, serta tangguh. Langkah konkret mencakup percepatan pemrosesan visa non-imigran (>20% di atas tingkat pra-pandemi pada 2023), penyaluran dana pemulihan US\$750 juta ke destinasi wisata melalui <i>American Rescue Plan</i> , serta investasi US\$195 juta dalam proyek restorasi iklim untuk melindungi taman nasional.	destinasi utama dunia.			
Spanyol (5,18)	Pemerintah Spanyol menggelontorkan dana pemulihan <i>Next Generation European Union</i> (NGEU) untuk Program Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pada tahun 2023 disetujui 175 proyek pariwisata	<i>Sustainable Tourism Strategy of Spain 2030</i> merupakan peta jalan nasional untuk transformasi pariwisata menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan	15,6%	3,0 juta (≈14%)	Tumbuh ~8% pada tahun 2024 (terbaik sejak 2019)

Negara (Skor TTDI)	Strategi Kebijakan	Rujukan Perencanaan Kepariwisata	Kontribusi		
			PDB	Tenaga kerja	Tren
	berkelanjutan senilai €478 juta guna meningkatkan daya saing destinasi melalui digitalisasi dan inisiatif ramah lingkungan. Strategi ini berupaya mengubah model pariwisata ke arah yang lebih berkelanjutan dan digital, mendiversifikasi penawaran wisata, serta mengurangi ketergantungan musim. Komitmen kuat Spanyol pada keberlanjutan dan inovasi mendapat dukungan sektor swasta, sehingga Spanyol berada di posisi terdepan dalam pariwisata global yang berkelanjutan.	berkualitas tinggi.			
Jepang (5,09)	Jepang menjalankan strategi pariwisata berkelanjutan pascapandemi. Pemerintah gencar mempromosikan destinasi baru di	<i>Tourism Nation Promotion Basic Plan</i> (2023–2025) merupakan rencana dasar nasional berdasarkan	7,1%	5,5 juta (≈8%)	Tumbuh 34% pada tahun 2023

Negara (Skor TTDI)	Strategi Kebijakan	Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan	Kontribusi		
			PDB	Tenaga kerja	Tren
	luar jalur utama, mendorong kolaborasi lokal, dan mengadopsi langkah inovatif untuk mengurangi kepadatan di objek wisata populer. Langkah ini sejalan dengan dibukanya kembali perbatasan Jepang pada tahun 2023, disertai upaya meningkatkan kunjungan internasional dan menjaga pengalaman wisata yang berkualitas. Hasilnya, pariwisata bangkit kuat di tahun 2023–2024, dengan peningkatan kunjungan serta fokus pada pemerataan manfaat ekonomi ke berbagai daerah.	Undang-Undang Promosi Negara Pariwisata untuk menciptakan destinasi pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan konsumsi pariwisata.			
Prancis (5,07)	Prancis menerapkan <i>Plan Destination France</i> (anggaran €1,9 miliar) untuk mempertahankan posisi sebagai destinasi pariwisata	<i>Plan Destination France</i> (2021–2030) merupakan peta jalan 10 tahun untuk pengembangan dan transformasi	8,8%	2,9 juta (≈9%)	Naik ~6% per tahun; ~4% di atas level pra-pandemi tahun 2019

Negara (Skor TTDI)	Strategi Kebijakan	Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan	Kontribusi		
			PDB	Tenaga kerja	Tren
	nomor 1 dunia dan menjadi negara terbaik yang menerapkan pariwisata berkelanjutan pada tahun 2030. Strategi ini mencakup ~20 inisiatif, antara lain peningkatan kualitas SDM pariwisata, investasi infrastruktur akomodasi dan transportasi, promosi potensi budaya dan alam di seluruh wilayah, serta percepatan transisi hijau (misalnya, <i>sustainable tourism fund</i> untuk mendukung ekowisata dan <i>slow tourism</i>).	sektor pariwisata dengan penekanan pada keberlanjutan dan inovasi.			
Australia (5,00)	Australia menjalankan strategi nasional THRIVE 2030 untuk pemulihan dan pertumbuhan jangka panjang sektor pariwisata secara berkelanjutan. Fokusnya antara lain diversifikasi pasar dan	THRIVE 2030 merupakan strategi nasional untuk pertumbuhan berkelanjutan ekonomi pengunjung Australia.	10%	1,42 juta (10%)	Telah kembali ke level pra-pandemi pada tahun 2023 dan tahun berikutnya diproyeksikan melebihi 10% PDB

Negara (Skor TTDI)	Strategi Kebijakan	Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan	Kontribusi		
			PDB	Tenaga kerja	Tren
	destinasi (termasuk keterlibatan masyarakat adat), modernisasi tenaga kerja dan infrastruktur, digitalisasi bisnis pariwisata, serta kolaborasi erat pemerintah-pelaku industri.				

Upaya mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata dan sekaligus merespon perubahan internal serta eksternal, pembangunan sektor pariwisata perlu dikelola dan diarahkan secara terencana, terukur, relevan, dan dapat dicapai. Tata kelola dan kebijakan yang berbasis data menjadi prasyarat untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan selaras dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan anggaran, sasaran pembangunan nasional, dan dinamika global. Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan utama guna menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Sejalan dengan peran strategis tersebut, Renstra ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada penguatan transformasi ekonomi, khususnya fase penguatan fondasi (tahun 2025-2029), dengan 2 (dua) target utama dalam mendukung proses transformasi ekonomi hingga tahun 2029, yaitu rasio PDB sektor pariwisata sebesar 4,9%-5% (empat koma sembilan persen sampai dengan lima persen) dari PDB nasional dan devisa pariwisata sebesar US\$32 miliar-US\$39,4 miliar (tiga puluh dua miliar dolar Amerika sampai dengan tiga puluh sembilan koma empat miliar dolar Amerika).

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata dalam kerangka transformasi ekonomi, sekaligus mengindahkan pembelajaran dari strategi dan capaian negara-negara maju, diperlukan penguatan substansi dalam penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029. Fokus penguatan diarahkan pada 3 (tiga) aspek yaitu misi kelembagaan, arsitektur kinerja, dan kerangka kelembagaan, agar lebih adaptif terhadap dinamika global dan mampu menjawab kebutuhan nasional secara terstruktur.

Pada Bulan November 2024, dengan adanya Pelantikan Kabinet Merah Putih (periode 2024-2029), nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), berubah menjadi dua Kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata (Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024) dan

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024). Meskipun pada Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 sektor pariwisata digabungkan secara kelembagaan dengan sektor ekonomi kreatif, ketiga aspek di atas tetap relevan untuk disempurnakan dalam konteks penyusunan Renstra terbaru. Perbandingan secara garis besar antara struktur Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 terhadap ketiga aspek tersebut disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perbandingan Aspek Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029

Aspek	Renstra Kemenparekraf/ Baparekraf Tahun 2020-2024 (Permenparekraf 11/2022)	Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029
Misi Kelembagaan	Fokus hanya pada kontribusi ekonomi dari pariwisata dan ekonomi kreatif	Selaras dengan visi dan misi tahun 2025-2029, yang memberi penekanan pada kekayaan budaya dan keberlanjutan
Arsitektur Kinerja	Sasaran strategis cukup banyak, namun belum seluruhnya berorientasi pada <i>outcome</i>	Sasaran strategis disederhanakan agar lebih fokus dan ukuran keberhasilan yang disusun secara kolaboratif menggunakan kerangka logis yang berorientasi pada <i>outcome</i> .
Kerangka Kelembagaan	Desain kelembagaan disusun menggunakan pendekatan strategi yang jelas dan terarah dan menggunakan metode kerja matriks (Permenparekraf 12/2020 dan Permenparekraf 11/2022)	Penguatan kembali struktur berbasis strategi dengan menata kembali pembagian fungsi, dan penataan struktur untuk penguatan organisasi

Sumber: diolah oleh Tim UI CSGAR, 2024

Perbandingan antara kedua Renstra menunjukkan adanya reposisi strategis dalam arah pembangunan sektor pariwisata nasional. Perluasan misi yang semula berfokus pada kontribusi ekonomi kini mencakup penekanan pada kekayaan budaya dan keberlanjutan. Hal ini merefleksikan orientasi pembangunan yang lebih holistik dan berwawasan jangka panjang.

Pada aspek arsitektur kinerja, penyederhanaan sasaran strategis dan penerapan kerangka logis yang berorientasi pada *outcome* menandai adanya pergeseran menuju tata kelola yang lebih akuntabel, fokus, dan kolaboratif. Sementara itu, pada aspek kelembagaan, penguatan struktur berbasis strategi dan penataan fungsi secara lebih tajam menjadi langkah penting dalam memastikan kapasitas organisasi yang responsif dan andal terhadap kompleksitas tantangan global. Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 dirancang bukan hanya sebagai kelanjutan administratif, melainkan instrumen transformatif untuk mengakselerasi daya saing kepariwisataan Indonesia di kancah internasional.

Perubahan dan pergeseran strategi dalam rancangan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 didasarkan pada evaluasi berbasis data capaian kinerja sektor pariwisata tahun 2019-2024 (Tabel 1.3) dan kondisi capaian yang dinilai oleh lembaga internasional. Terdapat sejumlah tren positif yang menunjukkan arah pemulihan dan penguatan sektor ini pascapandemi Covid-19, antara lain kenaikan devisa dari sektor pariwisata hingga dua kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, pemulihan kunjungan wisman hingga 90% (sembilan puluh persen) dari tingkat sebelum pandemi Covid-19, dan pulihnya pergerakan wisnus sebesar 62,43% (enam puluh dua koma empat tiga persen). Selain itu, peningkatan kontribusi PDB sektor pariwisata selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan melonjaknya peringkat daya saing kepariwisataan Indonesia ke posisi 22 (dua puluh dua) secara global menjadi indikator penting bahwa sektor pariwisata bergerak berada pada jalur yang tepat menuju pemulihan dan pertumbuhan. Temuan ini tidak hanya menjadi justifikasi teknokratik, tetapi juga refleksi atas kebutuhan untuk memperkuat ketahanan sektor pariwisata terhadap krisis global, memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas, serta mengoptimalkan kontribusinya dalam tahapan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 1.3 Data Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Periode Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Devisa Pariwisata (Miliar USD)	16,91	3,38	0,52	6,78	14,00	16,71
Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,97	2,23	2,30	3,72	4,67	4,04*
Wisatawan Mancanegara (Juta Kunjungan)	16,11	4,05	1,56	5,89	11,8	13,89
Wisatawan Nusantara (Miliar Perjalanan)	0,72	0,52	0,61	0,73	0,83	1,02

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tenaga Kerja Pariwisata (Juta Orang)	20,76	20,43	21,26	22,89	24,41	25,01*
Daya Saing Kepariwisata (Peringkat TTDI)	40	N/A	32	N/A	22	N/A
Pengeluaran Wisatawan mancanegara per Kunjungan (USD)	1.145,64	2.165,02	3.097,41	1.448,01	1.625,36	1.391,85

Keterangan :
*) Data sementara berdasarkan hasil FGD IKU Kemenparekraf/Baparekraf bersama BPS pada tanggal 12 Desember 2024.
N/A : *not available*
Sumber: Kemenparekraf/Baparekraf (2024); BPS (2024)

Perkembangan sektor pariwisata pada tingkat global menunjukkan tren pemulihan yang kuat di tahun 2023. Pariwisata internasional pulih secara kuat pada tahun 2023 dengan jumlah kunjungan sebesar 1,3 miliar (satu koma tiga miliar) kunjungan (89% (delapan puluh sembilan persen) dari tingkat prapandemi), keinginan untuk berwisata yang besar, pembukaan kembali destinasi Asia, dan peningkatan konektivitas, menghasilkan US\$1,5 triliun (satu koma lima triliun dolar Amerika) penerimaan dan kontribusi ekonomi sebesar US\$3,4 triliun (tiga koma empat triliun dolar Amerika) atau 3% (tiga persen) dari PDB global. Meskipun demikian, kawasan Asia dan Pasifik masih tertinggal di angka 78% (tujuh puluh delapan persen) pemulihan akibat transisi status pandemi yang relatif lambat, termasuk di Indonesia yang baru menetapkan fase endemi pada bulan Juni 2023. Namun, di tengah dinamika tersebut, sektor pariwisata Indonesia menunjukkan kinerja positif.

Tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang semakin solid bagi sektor pariwisata Indonesia. Nilai devisa pariwisata mencapai US\$16,71 miliar (enam belas koma tujuh satu miliar dolar Amerika), mendekati level pra pandemi tahun 2019, dan kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional telah mencapai 4,04% (empat koma nol empat persen), pada semester I tahun 2024. Hal ini menunjukkan pemulihan hampir sepenuhnya dari sisi penerimaan ekonomi.

Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 13,89 juta (tiga belas koma delapan sembilan juta) kunjungan, meningkat signifikan dari 11,69 juta (sebelas koma enam sembilan juta) pada tahun 2023, meskipun belum sepenuhnya menyamai angka tahun 2019. Di sisi domestik, wisnus mencatatkan rekor tertinggi sebanyak 1,02 miliar (satu koma nol dua miliar) perjalanan, mencerminkan kuatnya permintaan dalam negeri dan pemulihan mobilitas masyarakat.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pariwisata menyerap tenaga kerja sekitar 25,01 juta (dua puluh lima koma nol satu juta) orang, sehingga

menjadi indikator penting dalam pemulihan ekonomi berbasis masyarakat. Meski pengeluaran rata-rata wisman per kunjungan menurun menjadi US\$1.391,85 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu koma delapan lima dolar Amerika), hal ini masih menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2024 menegaskan bahwa sektor pariwisata telah memasuki fase pemulihan berkelanjutan, dengan momentum yang perlu dijaga melalui peningkatan daya saing, kualitas layanan, dan keberlanjutan destinasi pariwisata.

Capaian positif tersebut juga tercermin di dalam peringkat global. Berdasarkan TTDI tahun 2021 yang dirilis *World Economic Forum*, sektor pariwisata Indonesia berada di peringkat ke-32 (tiga puluh dua) dunia. Pada tahun 2024 melesat 10 (sepuluh) peringkat ke posisi 22 (dua puluh dua) dunia, di mana melampaui Belgia, Selandia Baru, dan Thailand, serta mempertahankan posisi pertama dalam *Global Muslim Travel Index (GMTI)*. Penguatan ini didukung oleh berbagai inisiatif kebijakan, termasuk koordinasi lintas sektor melalui rencana aksi TTDI bersama 31 (tiga puluh satu) kementerian/lembaga, pengembangan Portal Indeks Kepariwisata (Prakarsa), dan penyusunan ulang Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN SEKTOR PARIWISATA

Potensi dan permasalahan sektor pariwisata Indonesia merupakan fondasi krusial dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Evaluasi terhadap capaian kinerja selama periode tahun 2019-2024 memberikan gambaran dan indikasi awal mengenai kekuatan yang dapat dieskalasi dan dimobilisasi serta tantangan yang perlu diantisipasi secara terpadu. Pada konteks penyusunan Renstra Kemenpar tahun 2025-2029, analisis potensi dan permasalahan bertujuan untuk menghasilkan intervensi kebijakan, program, dan rencana aksi yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan transformasi sektor pariwisata secara nasional.

Secara umum, potensi sektor pariwisata Indonesia tercermin dari kekayaan sumber daya alam dan budaya, pertumbuhan pasar domestik, serta kinerja pemulihan pascapandemi yang semakin menunjukkan tren positif. Namun, berbagai tantangan masih mengemuka, mulai dari gap kualitas destinasi, kapasitas SDM, infrastruktur penunjang hingga resiliensi terhadap krisis global. Kompleksitas tantangan tersebut diperkuat oleh perubahan preferensi wisatawan, perkembangan dan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi, serta tuntutan terhadap keberlanjutan dan inklusivitas. Oleh karena itu, identifikasi menyeluruh atas potensi, permasalahan, dan isu strategis menjadi langkah awal yang krusial dalam memastikan bahwa Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 mampu menjawab dinamika sektor pariwisata secara progresif dan komprehensif.

Salah satu isu strategis yang semakin relevan dalam pembangunan sektor pariwisata adalah implementasi transformasi digital, yaitu pendekatan berbasis teknologi cerdas untuk mendukung terciptanya pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berfokus pada pengalaman

pengunjung. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti pemanfaatan *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR), diproyeksikan akan menjadi pengungkit baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pemasaran dan promosi destinasi pariwisata, serta daya saing global sektor pariwisata Indonesia. Masih terdapat tantangan mendasar, seperti kesenjangan akses internet antarwilayah, rendahnya literasi digital di daerah tujuan wisata tertentu, dan keterbatasan kapasitas SDM lokal dalam mengelola transformasi digital. Ketimpangan ini perlu direspons melalui perencanaan yang komprehensif, agar digitalisasi pariwisata tidak hanya menjadi tren.

1.2.1. Potensi Sektor Pariwisata

Upaya memperkuat daya saing dan memperluas kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan nasional, diperlukan identifikasi dan optimalisasi atas potensi unggulan yang dimiliki Indonesia. Terdapat setidaknya 10 (sepuluh) potensi strategis yang dapat dimanfaatkan, yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok besar. Pertama, potensi berbasis sumber daya dan karakteristik destinasi, meliputi pariwisata berkelanjutan dan pelibatan komunitas, pariwisata berbasis budaya dan taman bumi (*geopark*), serta keunikan destinasi. Kedua, potensi pengembangan wisata minat khusus, yang mencakup wisata medis, wisata kebugaran, wisata olahraga, wisata mewah, dan wisata seni, serta pariwisata ramah muslim (PRM). Ketiga, potensi penunjang kualitas pengalaman wisatawan, seperti penerapan standar usaha pariwisata berbasis risiko dan pemanfaatan pemasaran digital dan media sosial. Keempat, potensi penguatan ekosistem pariwisata, termasuk lembaga pembiayaan pariwisata, peningkatan infrastruktur serta pertumbuhan kawasan wisata baru, dan perencanaan berbasis spasial melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN). Klasifikasi ini mencerminkan bahwa potensi sektor pariwisata Indonesia tidak hanya berakar pada kekayaan alam dan budaya, tetapi juga terletak pada kemampuan untuk mengembangkan sistem pendukung dan strategi kelembagaan yang inovatif. Adapun 10 (sepuluh) potensi sektor pariwisata tersebut, yaitu:

1. Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek tata kelola yang baik, pelestarian budaya, kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian lingkungan baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman wisata yang bertanggung jawab, memperkuat identitas lokal, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di destinasi wisata.

Salah satu bentuk kriteria dalam penerapan pariwisata berkelanjutan adalah keberlanjutan sosial yang dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu inti dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kerangka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, masyarakat lokal bukan sekadar penerima manfaat pasif, melainkan subjek utama dalam pengelolaan destinasi. Regulasi ini menegaskan bahwa destinasi pariwisata berkelanjutan harus dibangun dengan pendekatan yang

partisipatif, adil, dan menghormati keberagaman sosial serta budaya lokal.

Konsep pemberdayaan dalam konteks ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat untuk: (1) mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan, (2) mengakses peluang ekonomi dari kegiatan wisata, (3) melestarikan nilai-nilai budaya dan lingkungan hidup, dan (4) berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata di wilayahnya.

Lebih jauh lagi, pendekatan yang inklusif berarti bahwa semua kelompok masyarakat—termasuk perempuan, anak muda, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok adat atau minoritas—memiliki akses yang setara terhadap pelatihan, kesempatan usaha, dan ruang partisipasi dalam pengembangan destinasi. Hal ini sejalan dengan prinsip “*no one left behind*” dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Melalui pemberdayaan yang inklusif, pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial. Komunitas yang dulunya termarginalkan dapat menjadi penggerak utama inovasi dan pelestari identitas lokal, sekaligus penjaga kelestarian lingkungan.

Konteks global juga mendukung arah ini. Berbagai inisiatif internasional, seperti panduan dari UNWTO dan GSTC, menekankan pentingnya inklusivitas sebagai bagian dari indikator keberlanjutan. Dunia kini menuntut praktik pariwisata yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkeadilan sosial, di mana masyarakat lokal memiliki kuasa atas masa depan wilayahnya sendiri.

Dengan menjadikan pemberdayaan masyarakat yang inklusif sebagai strategi utama, Indonesia tidak hanya membangun destinasi yang menarik, tetapi juga menciptakan ekosistem pariwisata yang tahan terhadap krisis, responsif terhadap perubahan, dan berpihak pada kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

2. Pariwisata Berbasis Budaya dan *Geopark*

Kekayaan pariwisata berbasis komunitas beberapa diantaranya yaitu potensi desa wisata nasional, *geopark*, cagar budaya, *world heritage* Indonesia sebagai negara tujuan *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE), wisata olahraga, kesadaran terhadap potensi daerah, dan kesiapan daerah untuk menarik investasi di bidang pariwisata. Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.300 (seribu tiga ratus) suku bangsa, memiliki lebih dari 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah (tidak termasuk dialek dan subdialek) serta segala ekspresi budaya dan adat tradisinya merupakan laboratorium budaya terbesar di dunia. Sumber daya budaya merupakan kekayaan peradaban Indonesia yang berasal dari interaksi sosial masyarakat, yang menjadi bagian dari kepribadian dan identitas suatu masyarakat serta menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Indonesia. Pengembangan destinasi pariwisata tersebut dapat menekankan pada pariwisata berbasis warisan budaya, pasar seni, fauna langka, mangrove, dan hutan lindung.

Pariwisata budaya yang terintegrasi dengan konsep *geopark* menawarkan pendekatan holistik dalam pengembangan destinasi wisata. *Geopark* merupakan kawasan yang diakui UNESCO karena keunikan warisan geologi, yang dikelola secara terpadu untuk tujuan konservasi, edukasi,

dan pemberdayaan ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan. Dalam praktiknya, *geopark* menggabungkan atraksi geologi dengan budaya lokal, dimana masyarakat setempat dilibatkan dalam pemanfaatan sumber daya alam, budaya, dan bahkan kuliner secara berkelanjutan untuk kegiatan geowisata. Di Indonesia terdapat beberapa UNESCO *Global Geoparks*, seperti Batur, Gunung Sewu, dan Ciletuh, yang memadukan keindahan bentang alam geologi dengan tradisi dan kearifan lokal, sehingga menciptakan pengalaman wisata unik yang mendidik sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Pendekatan ini selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan karena melindungi warisan geologis dan budaya, sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berbasis komunitas.

3. Wisata Medis, Wisata Kebugaran, Wisata Olahraga, Wisata Mewah, dan Wisata Seni

Menghadapi *Global Megatrend 2045*, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan pariwisata tematik berbasis kesehatan, seperti wisata medis, kebugaran, olahraga, mewah dan seni. Segmen ini menjawab kebutuhan populasi usia lanjut (*aging society*) dan pemulihan fisik-mental pascapandemi. Proyek seperti halnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan medis unggulan yang terintegrasi dengan destinasi wisata. Untuk memaksimalkan potensi wisata medis, Indonesia perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan membangun kepercayaan terhadap fasilitas domestik. Di sisi lain, wisata kebugaran, melalui yoga, spa, jamu, dan meditasi, masih belum tergarap optimal meskipun semakin diminati oleh wisatawan. Sementara itu, wisata olahraga seperti lari, selancar, dan menyelam terbukti mampu mendongkrak citra destinasi dan ekonomi lokal. Kemunculan dan wisata seni pada saat ini dilatarbelakangi oleh tingkat kompetisi yang tinggi di sektor pariwisata, perilaku wisatawan milenial, dan juga perkembangan teknologi. Wisata mewah bukan hanya ditentukan pada nilai ekonomis atau harga paket wisata, namun lebih dimaknai pada kedalaman nilai berwisata melalui pengalaman yang didapat wisatawan. Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi komunitas menjadi kunci agar pariwisata tematik ini berkembang secara berkelanjutan dan merata di berbagai wilayah.

4. Pariwisata Ramah Muslim

Indonesia memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata ramah muslim terkemuka di dunia, didukung oleh statusnya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan kekayaan destinasi wisata yang beragam. Konsep Pariwisata Ramah Muslim (PRM) merupakan layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim baik nusantara maupun mancanegara. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan PRM melalui penguatan regulasi, sertifikasi, dan infrastruktur pendukung, yang tercermin dari keberhasilan Indonesia meraih peringkat pertama berturut-turut dalam GMTI Tahun 2023 dan 2024 yang diterbitkan oleh *Master Card-CrescentRating*. Data menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan muslim global mencapai kisaran 145 juta (seratus empat puluh lima juta) pada tahun 2023 dan 176 juta (seratus tujuh puluh enam juta) pada akhir tahun 2024. *Islamic Tourism Centre* bahkan memperkirakan bahwa

jumlah wisatawan muslim global akan mencapai 230 juta (dua ratus tiga puluh juta) orang dengan nilai pengeluaran hingga US\$225 miliar (dua ratus dua puluh lima miliar dolar Amerika) atau mencapai Rp3,375 triliun (tiga koma tiga tujuh lima triliun rupiah) pada tahun 2028, menandakan potensi pasar yang sangat besar. Pada tahun 2023, Indonesia menyelenggarakan *Indonesia Muslim Traveler Index* (IMTI) yang melibatkan 15 (lima belas) Provinsi dimana 5 (lima) besar diduduki oleh NTB, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, dan Jawa Tengah. PRM tidak hanya ditujukan untuk menarik wisatawan Muslim, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas. Pertumbuhan PRM menjadi salah satu indikator kegiatan prioritas dalam Program Prioritas Ekonomi Syariah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan target pertumbuhan 13,08% (tiga belas koma nol delapan persen) di tahun 2029. Dengan komitmen yang kuat dan strategi berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi unggulan PRM berkacang global yang memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

5. Keunikan Destinasi

Keunikan suatu destinasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan menarik minat wisatawan, karena memberikan pengalaman yang otentik dan tidak tergantikan. Setiap destinasi di Indonesia memiliki karakter khas, baik lanskap alam, warisan budaya, seni tradisional, kuliner, hingga tradisi komunitas lokal, yang dapat menjadi nilai jual yang unik. Konsep keunikan destinasi ini menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, di samping aspek nilai tambah, daya saing dan berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa destinasi yang mampu mengemas keunikan lokal secara menarik cenderung lebih kompetitif dan diminati pasar. Contohnya, Yogyakarta dengan budaya Jawa dan keraton, Bali dengan adat Hindu dan lanskap sawah terasering, atau Toraja dengan ritual kematian dan arsitektur rumah adatnya semua mencerminkan kekuatan diferensiasi destinasi yang tidak mudah ditiru. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus fokus pada pelestarian dan promosi keunikan lokal tersebut sebagai strategi untuk mendorong daya tarik wisata sekaligus memastikan keberlanjutan nilai budaya yang melekat di tiap wilayah.

6. Penerapan Standar Usaha Berbasis Risiko

Penerapan standar usaha pariwisata berbasis risiko merupakan bagian dari konteks perizinan berusaha yang tidak dapat terpisahkan untuk tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Penerapan standar ini merupakan bagian dari peningkatan daya saing dan kualitas pariwisata Indonesia untuk usaha pariwisata yang memiliki tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, selain memenuhi standar usaha pariwisata juga wajib melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata melalui Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSPr Pariwisata) yang telah memiliki akreditasi sesuai dengan lingkup usaha yang disertifikasi. Penerapan standar usaha ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

7. Pemasaran Digital dan Media Sosial

Pemanfaatan pemasaran digital dan media sosial merupakan salah satu potensi utama yang perlu persisten dikembangkan dalam sektor pariwisata Indonesia, karena telah merevolusi cara destinasi dipromosikan dan diakses oleh wisatawan. Di era informasi saat ini, lebih dari 80% (delapan puluh persen) calon wisatawan mencari referensi destinasi melalui media sosial dan platform daring sebelum mengambil keputusan perjalanan, menjadikan kehadiran digital yang kuat sebagai faktor krusial dalam membentuk citra dan meningkatkan minat kunjungan. Teknologi digital mendukung kemudahan dalam sistem pemasaran, pemesanan, hingga pembayaran, serta memungkinkan pelaku pariwisata menjangkau pasar secara luas dan efisien. Strategi pemasaran digital yang melibatkan kolaborasi dengan kreator konten, *influencer*, dan mitra internasional terbukti efektif dalam membangun kesadaran, menciptakan ikatan, dan mendorong konversi wisata. Kualitas informasi yang disajikan secara daring tidak hanya memperkuat daya tarik destinasi, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global industri pariwisata yang semakin berbasis teknologi.

8. Lembaga Pembiayaan Pariwisata

Pengembangan lembaga dan skema pembiayaan pariwisata merupakan salah satu potensi strategis yang perlu diperkuat untuk mendukung terciptanya pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang berdaya saing. Pembiayaan yang memadai sangat penting untuk mendorong investasi, membiayai infrastruktur pariwisata, serta menjamin keberlanjutan proyek-proyek pariwisata di berbagai skala. Pemerintah telah menginisiasi kebijakan insentif fiskal, pendirian badan pelaksana otorita destinasi, serta penyaluran subsidi dan stimulus kepada pelaku usaha, khususnya UMKM pariwisata, sebagai respons terhadap krisis, seperti pandemi Covid-19. Di sisi lain, kolaborasi dengan lembaga keuangan global, seperti Bank Dunia dan *Asian Development Bank* (ADB) juga memungkinkan pembiayaan infrastruktur besar di kawasan wisata prioritas yang terpencil. Untuk memperluas sumber pembiayaan, penting dikembangkan lembaga pembiayaan pariwisata nasional yang dapat mengelola dana investasi jangka panjang di luar APBN, serta mendukung ekosistem yang mengukur dampak ekonomi wisatawan, termasuk lama tinggal, belanja di sektor UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan pengelolaan pembiayaan yang inovatif dan inklusif, sektor pariwisata Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal.

9. Peningkatan Infrastruktur dan Pertumbuhan Kawasan Wisata Baru

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat penting untuk mengembangkan kawasan pariwisata baru. Aksesibilitas yang baik, seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, transportasi publik, serta ketersediaan amenities (hotel, restoran, listrik, internet) akan mendorong wisatawan menjelajahi destinasi di luar kawasan wisata utama. Kegiatan pembangunan pariwisata Indonesia tahun 2025-2029 berfokus pada 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), guna menciptakan pusat-pusat pariwisata baru di berbagai daerah dengan meniru keberhasilan

Bali. Destinasi, seperti Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta), Bangka Belitung (Kepulauan Bangka Belitung), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Lombok-Gili Tramen (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara) dan Raja Ampat (Papua Barat Daya) ditambah 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR), yaitu Kepulauan Riau, Bali dan *Greater* Jakarta dipilih sebagai kawasan unggulan yang dilengkapi investasi memadai dalam pembangunan infrastruktur dasar dan suprastruktur pariwisata. Pemerintah bahkan menetapkan beberapa diantaranya sebagai KEK pariwisata yang memberikan insentif fiskal dan kemudahan investasi, serta membentuk badan pelaksana otorita khusus untuk mengelola pengembangan tiap destinasi.

10. Penguatan perencanaan melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)

Pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi, perlu didukung dengan pelaksanaan kebijakan penyelesaian 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas (Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramen, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, dan Morotai) yang dipandu melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan* (RIDPN/ITMP).

Dalam RPJMN Tahun 2025–2029 tercantum bahwa Prioritas Nasional (PN) 3 menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Bahkan secara jelas dituliskan Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas pada 4 (empat) destinasi yaitu Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP), Labuan Bajo, Danau Toba dan Lombok-Gili Tramen. Sedangkan 6 (enam) destinasi lainnya disebut pengembangan. Menyediakan dokumen rujukan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional, yaitu Manado-Likupang, Bangka dan Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat. Dokumen RIDPN dimaksudkan untuk dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun para pemangku kepentingan terkait lainnya.

1.2.2. Permasalahan Sektor Pariwisata

Berbagai permasalahan timbul di tengah sejumlah capaian dan peluang yang diraih oleh sektor pariwisata. Permasalahan tersebut mencakup tantangan struktural, kelembagaan, dan isu keberlanjutan yang dapat menghambat kinerja pembangunan pariwisata pada jangka menengah dan panjang. Identifikasi masalah ini menjadi sangat krusial sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam kerangka Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029. Permasalahan sektor pariwisata tersebut diklasifikasikan menjadi 4 (empat) poin, yaitu:

1. Pengelolaan Destinasi, Tata Kelola, dan Strategi Pemasaran

Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan destinasi, tata kelola, dan strategi pemasaran menjadi aspek krusial dalam upaya mengembangkan pariwisata nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan daya tarik wisata yang sangat potensial, optimalisasinya masih terhambat oleh berbagai tantangan, seperti (1) divergensi antara perencanaan dan implementasi peta jalan pariwisata di lapangan, (2) rendahnya kapasitas dan kualitas tata kelola destinasi, (3) degradasi budaya lokal akibat kurang meratanya penyebaran wisatawan dan akulturasi budaya wisatawan, (4) keterbatasan data dukung destinasi, terutama di kawasan timur Indonesia, dan (5) minimnya pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan. Tantangan-tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya krisis global, pandemi, dan dampak perubahan iklim yang berpotensi mengganggu keberlanjutan destinasi pariwisata dalam jangka panjang.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM dalam industri pariwisata merupakan salah satu tantangan utama yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sektor ini, khususnya di era digital dan dalam konteks keberlanjutan. Kualitas SDM sangat menentukan pengalaman wisatawan, mulai dari kompetensi, keramahan, hingga kebersihan dan pelayanan destinasi pariwisata. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar, seperti rendahnya kesejahteraan pekerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang dan keahliannya. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas layanan dan daya saing destinasi pariwisata. Di sisi lain, disrupsi teknologi, seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi, turut mengubah kebutuhan dan struktur tenaga kerja di sektor ini. Sementara itu, kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi krisis, seperti pandemi atau guncangan ekonomi, masih terbatas, termasuk dari sisi jaminan sosial dan fleksibilitas model bisnis.

Peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata juga menjadi isu penting, karena partisipasi masyarakat lokal berperan besar dalam menciptakan layanan yang otentik dan berkelanjutan. Tanpa manajemen SDM yang adaptif, inklusif, dan berbasis kompetensi, sektor pariwisata berisiko menghadapi stagnasi kualitas layanan serta ketimpangan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, penguatan strategi pengelolaan SDM berbasis digital, pelatihan vokasional, dan perlindungan kesejahteraan pekerja perlu menjadi bagian integral dalam penyusunan kebijakan pariwisata nasional.

3. Aksesibilitas, Amenitas, dan Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Destinasi

Aksesibilitas dan amenities merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Di banyak daerah, keterbatasan infrastruktur transportasi udara, darat, dan laut yang terjangkau membatasi jumlah kunjungan wisatawan dan menghambat pengembangan destinasi potensial. Selain itu, kualitas dan pemerataan fasilitas pendukung, seperti akomodasi, sanitasi, dan layanan publik masih jauh dari standar yang diharapkan, terutama di kawasan terpencil dan bagian timur Indonesia. Infrastruktur yang ada pun seringkali memerlukan pembaruan untuk memenuhi kebutuhan

wisatawan modern dan standar internasional. Tak kalah penting, konflik sengketa lahan, terutama yang berkaitan dengan tanah adat dan hak ulayat, masih menjadi hambatan dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan pariwisata. Minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata juga dapat menimbulkan resistensi sosial dan ketimpangan manfaat ekonomi.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Peran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat krusial dalam membentuk arah pembangunan pariwisata yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Namun, tantangan dalam tata kelola pemerintahan pariwisata masih cukup signifikan. Salah satunya adalah perlunya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, agar tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan kapasitas lokal secara kontekstual. Selain itu, sistem rotasi pegawai yang tidak mempertimbangkan kesinambungan dan kompetensi sering kali berdampak pada penurunan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata. Di sisi lain, belum adanya standar dan kebijakan yang tegas terkait daya dukung destinasi, baik dari aspek fisik, lingkungan, maupun sosial, mengakibatkan tidak meratanya penyebaran wisatawan di beberapa kawasan wisata, yang mengancam kelestarian dan kenyamanan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi kebijakan lintas level pemerintahan menjadi ihwal yang sangat mendesak untuk dibenahi.

Memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan dalam pengembangan sektor pariwisata nasional tersebut, diperlukan perumusan isu strategis sebagai landasan penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029. Isu strategis tersebut berfungsi sebagai kerangka kontekstual guna memastikan arah kebijakan dan program pembangunan pariwisata berjalan secara terukur, responsif, dan selaras dengan dinamika global serta prioritas pembangunan nasional. Beberapa isu strategis tersebut, yaitu:

1. Perubahan paradigma pengembangan sektor pariwisata dari berorientasi pada kuantitas atau angka menjadi berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan

Perubahan paradigma pengembangan sektor pariwisata dari orientasi pada kuantitas atau angka menjadi fokus pada kualitas dan keberlanjutan merupakan transformasi yang signifikan dalam industri pariwisata global. Tidak hanya memperhatikan angka kunjungan wisatawan atau pendapatan, namun saat ini terdapat kepentingan untuk menuju pengalaman wisata berkualitas dan memastikan dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan, dan tentunya berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan. Hal ini mencerminkan pemahaman yang semakin mendalam bahwa pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, akan tetapi juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kelestarian budaya. Dengan mengadopsi pendekatan ini, destinasi pariwisata bertujuan untuk memberikan pengalaman yang berarti bagi wisatawan.

2. Pembangunan sektor pariwisata yang inklusif melalui pariwisata berbasis komunitas dan pemerataan infrastruktur pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata yang inklusif melalui pariwisata berbasis komunitas dan pemerataan infrastruktur pariwisata adalah langkah penting dalam menciptakan kesempatan ekonomi dan sosial yang merata di berbagai wilayah. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam industri pariwisata melalui konsep pariwisata berbasis komunitas potensi ekonomi lokal dapat menjadi lebih maksimal dan memperkuat keberlanjutan budaya dan lingkungan. Di samping itu, pemerataan infrastruktur pariwisata yang memadai di berbagai daerah akan membuka aksesibilitas dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata yang tidak hanya terpusat di kota besar atau tujuan populer saja. Melalui pendekatan ini, pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih merata kepada seluruh masyarakat, menciptakan kesempatan ekonomi lokal yang lebih luas, serta memperkuat inklusi sosial dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Isu ini juga mengedepankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta dalam pemerataan pembangunan pariwisata. Selain itu, pemanfaatan proyek nasional dalam mengembangkan pariwisata melalui kerja sama dengan pihak lain juga menjadi isu yang penting.

3. Implementasi *Blue Green Circular Economy* (BGCE)

Implementasi BGCE di sektor pariwisata, fokus pada pengembangan pariwisata regeneratif, dekarbonisasi, penciptaan *green jobs*, dan pengembangan pariwisata yang inklusif dan tangguh. Implementasi BGCE dalam sektor pariwisata adalah langkah progresif yang menempatkan perhatian pada berbagai aspek penting. Fokus utamanya adalah pada pengembangan pariwisata regeneratif, di mana upaya konservasi dan restorasi lingkungan menjadi prioritas dalam pembangunan destinasi pariwisata. Selain itu, dekarbonisasi juga menjadi bagian krusial dari BGCE, dengan upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan energi terbarukan dalam operasi pariwisata. Melalui BGCE, juga terjadi penciptaan *green jobs*, dimana industri pariwisata tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Implementasi BGCE juga tidak kalah penting untuk mendorong pengembangan pariwisata yang inklusif dan tangguh, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan destinasi pariwisata dapat menghadapi tantangan dengan keberlanjutan yang kokoh.

4. Tantangan global termasuk ketidakpastian (*volatility, uncertainty, complexity and ambiguity*/VUCA) perubahan preferensi pasar, digitalisasi, dan permintaan akan industri pariwisata yang berkelanjutan

Industri pariwisata saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan global yang memengaruhi cara kita memandang, mengelola, dan merencanakan masa depannya. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian yang terkait dengan kondisi VUCA yang semakin kompleks dan tidak terduga. Selain itu, perubahan preferensi pasar yang dipicu oleh perkembangan demografis dan perubahan gaya hidup memengaruhi bagaimana destinasi pariwisata harus beradaptasi dan mengubah pendekatannya dalam menarik wisatawan. Digitalisasi juga menjadi faktor penting, dengan teknologi yang memengaruhi setiap aspek dari

pengalaman wisata, mulai dari perencanaan perjalanan hingga pengalaman di destinasi. Terakhir, meningkatnya permintaan akan pariwisata yang berkelanjutan menandakan perlunya industri pariwisata untuk bergerak menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan sosial, serta berfokus pada pelestarian budaya dan sumber daya alam.

5. Perubahan preferensi konsumen yang mengarah pada kesehatan, keselamatan, dan keamanan

Perubahan dalam preferensi konsumen mengindikasikan tren menuju pengalaman yang lebih personal, terlokalisasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Konsumen semakin cenderung mencari pengalaman yang unik dan terasa khusus, yang mencerminkan minat dan keinginan pribadi konsumen. Salah satu contohnya adalah dengan mengembangkan wisata kebugaran dan wisata kesehatan. Pendekatan yang lebih terfokus pada komunitas lokal dan pengalaman autentik semakin diminati, sementara konsep *customized* dan disesuaikan memungkinkan konsumen untuk memilih dan merancang pengalaman sesuai dengan preferensi individu mereka. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran akan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan juga memainkan peran penting dalam pembentukan preferensi konsumen, dengan permintaan yang semakin tinggi untuk pengalaman yang menjamin kesejahteraan fisik dan emosional.

6. Perubahan preferensi pola perjalanan wisatawan mancanegara

Adanya indikasi perubahan preferensi pola perjalanan wisatawan mancanegara untuk perjalanan *long haul* menjadi perjalanan *inter-regional*. Hal ini juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik dan pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi melemah dalam beberapa tahun mendatang.

Tahapan berikutnya merumuskan arah kebijakan pembangunan pariwisata ke depan dengan menggunakan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*/SWOT) (Tabel 1.4) untuk mengidentifikasi posisi sektor pariwisata nasional secara komprehensif berdasarkan potensi, permasalahan, dan isu strategisnya. Analisis ini bertujuan untuk menggali kekuatan internal dan kelemahan yang perlu diperbaiki, serta mengantisipasi peluang eksternal dan ancaman yang harus diwaspadai atau dimitigasi. Hasil analisis SWOT menjadi dasar dalam merumuskan strategi guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian tahun 2025-2029.

Tabel 1.4 Analisis SWOT Pengembangan Sektor Pariwisata Indonesia

STRENGTHS (KEKUATAN)		WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
Keanekaragaman destinasi:	Indonesia	Keterbatasan infrastruktur:	infrastruktur:
Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang menarik dan unik, mulai dari pantai, pegunungan, hingga situs budaya dan sejarah. Hal ini mendukung sasaran strategis kementerian		Kesenjangan infrastruktur menghambat konektivitas	pembangunan antarwilayah aksesibilitas dan destinasi wisata,

<p>dalam meningkatkan nilai tambah pariwisata.</p> <p>Budaya dan tradisi: Kekayaan budaya dan tradisi lokal menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara dan nusantara, serta mendukung pengembangan wisata budaya dan kreatif.</p> <p>Fasilitas penunjang: Mulai meningkatnya fasilitas akomodasi, restoran, transportasi, dan infrastruktur lainnya mendukung pengalaman wisata yang nyaman dan aman.</p> <p>Bonus demografi: Potensi penyerapan tenaga kerja pariwisata yang tinggi mendukung upaya transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pariwisata</p>	<p>khususnya di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).</p> <p>Isu lingkungan: Aktivitas pariwisata yang tidak berkelanjutan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran.</p> <p>Kualitas layanan: Variasi kualitas layanan pariwisata yang masih rendah di beberapa destinasi dapat memengaruhi kepuasan dan loyalitas wisatawan.</p> <p>Kurangnya promosi efektif: Strategi promosi yang belum optimal menghambat penetrasi pasar internasional dan domestik.</p> <p>Rendahnya daya beli wisatawan: Kontribusi pariwisata terhadap devisa negara masih belum optimal akibat rendahnya belanja wisatawan mancanegara.</p> <p>Konektivitas yang buruk: terutama dalam hal konektivitas rute internasional serta domestik. Selain itu, saat ini alternatif pilihan maskapai <i>full service</i> sangat terbatas.</p>
<p>OPPORTUNITIES (PELUANG)</p>	<p>THREATS (ANCAMAN)</p>
<p>Tren wisata baru: Meningkatnya minat wisata berbasis alam, budaya, ekowisata, dan wisata petualangan membuka peluang bagi pengembangan destinasi unggulan.</p> <p>Digitalisasi pariwisata: Pemanfaatan teknologi digital mendukung pemasaran, manajemen destinasi, dan pelayanan wisata yang lebih efisien.</p> <p>Kemitraan lintas sektor: Kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga internasional berpotensi mempercepat</p>	<p>Perubahan iklim: Bencana alam, perubahan cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan dapat memengaruhi keberlanjutan destinasi wisata.</p> <p>Ketidakstabilan politik dan sosial: Situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif berpotensi menurunkan minat wisatawan.</p> <p>Persaingan di pasar global: Persaingan dengan destinasi wisata negara lain yang memiliki kualitas layanan dan daya tarik lebih baik.</p> <p>Pandemi dan risiko kesehatan: Risiko wabah penyakit dan pandemi</p>

pengembangan infrastruktur dan promosi destinasi.	berdampak signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan.
Fokus pariwisata berkelanjutan: Kesadaran terhadap isu lingkungan dan sosial mendukung pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.	

Indonesia memiliki keunggulan yang kuat dalam sektor pariwisata, didukung oleh keanekaragaman destinasi yang luar biasa, mulai dari pantai tropis hingga pegunungan, serta situs budaya dan sejarah yang memikat. Kekayaan budaya dan tradisi lokal menjadi daya tarik utama yang mampu memikat wisman maupun wisnus, sekaligus membuka peluang pengembangan wisata budaya. Ketersediaan fasilitas pendukung yang semakin berkembang, seperti akomodasi, transportasi, dan infrastruktur lainnya, memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi wisatawan. Ditambah lagi, bonus demografi yang dimiliki Indonesia berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja di sektor pariwisata, sehingga mendukung transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.

Namun, sektor pariwisata Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Keterbatasan infrastruktur, khususnya di kawasan 3T, menghambat aksesibilitas dan konektivitas destinasi. Selain itu, pengelolaan pariwisata yang belum menerapkan prinsip berkelanjutan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran. Variasi kualitas layanan yang masih rendah di beberapa destinasi juga menjadi catatan penting, seiring dengan strategi promosi yang belum efektif dalam menarik pasar internasional dan domestik. Tingkat belanja wisatawan yang rendah turut memengaruhi kontribusi devisa nasional. Di tengah peluang digitalisasi dan tren wisata baru yang berkembang, pariwisata tetap harus mewaspadai berbagai ancaman seperti perubahan iklim, ketidakstabilan politik, persaingan global, serta risiko pandemi dan wabah penyakit yang dapat mengganggu keberlanjutan dan daya tarik pariwisata Indonesia.

Dalam mencapai sasaran strategis Kementerian, berbagai peluang dan tantangan muncul sebagai bagian dari indikasi risiko yang telah diidentifikasi. Risiko tersebut mencerminkan potensi hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan. Menanggapi peluang dan tantangan yang telah diidentifikasi telah dirumuskan bentuk perlakuan risiko yang mencerminkan peluang strategis untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas organisasi. Untuk memperlancar implementasi mitigasi risiko telah dirumuskan perlakuan risiko dan ditetapkan Penanggung Jawab (PJ) perlakuan risiko dari masing-masing peluang dan tantangan. Setiap PJ bertanggung jawab memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi ditetapkan dan dijalankan secara konsisten, serta melakukan monitoring berkala terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pada Tabel 1.5, disajikan peluang dan tantangan berdasarkan indikasi risiko, indikasi perlakuan risiko, dan indikasi PJ perlakuan risiko dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing kepariwisataan.

Tabel 1.5 Matriks Indikasi Risiko terhadap Peluang dan Tantangan

No	Peluang dan Tantangan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
a. Peluang				
1	Tren wisata baru	<div><div>- Kurangnya kapasitas dan daya dukung lingkungan</div><div>- Keterbatasan infrastruktur, layanan penunjang dan SDM industri pariwisata</div><div>- Konflik dengan masyarakat lokal</div><div>- Standar/ sertifikasi usaha pariwisata belum diimplementasikan</div><div>- Risiko keselamatan wisatawan di destinasi pariwisata seperti kecelakaan, kriminalitas dan bencana alam</div><div>- Masyarakat di destinasi pariwisata kurang siap beradaptasi</div></div>	<div><div>- Melakukan identifikasi kebutuhan wisatawan</div><div>- Menetapkan manajemen pengunjung</div><div>- Pelatihan kompetensi berkelanjutan dan sertifikasi untuk SDM industri pariwisata</div><div>- Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata</div><div>- Menyusun standar dan protokol keselamatan dan sistem peringatan dini bencana</div><div>- Pengembangan paket/produk wisata dan promosi yang berkelanjutan</div><div>- Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam kesiapan infrastruktur dan SDM</div><div>- Penyediaan dan pengelolaan sanitasi</div><div>- Insentif fiskal/kemudahan akses pembiayaan bagi usaha berkelanjutan</div></div>	<div>Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat</div> <div>Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata cq. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata</div> <div>Deputi 3 : Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan c.q. Asisten Deputi Manajemen Investasi c.q. Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha</div> <div>Deputi 4 : Deputi Bidang Pemasaran c.q. Asisten Deputi Strategi dan</div>

No	Peluang dan Tantangan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
				Komunikasi Pemasaran Pariwisata
2	Digitalisasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none">- Penyalahgunaan teknologi informasi- Tergantinya peran manusia dikarenakan otomatisasi- Ketertinggalan pemanfaatan teknologi informasi dengan negara kompetitor	<ul style="list-style-type: none">- Program pelatihan literasi digital dan keamanan informasi untuk pelaku usaha pariwisata- Penerapan standar keamanan siber meliputi enkripsi, <i>firewall</i>, pemeliharaan dan audit rutin, serta sistem <i>back-up</i>- pemanfaatan media sosial dalam promosi pariwisata dan respon cepat terkait manajemen krisis	<p>Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri</p> <p>Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata</p> <p>Deputi 4 : Deputi Bidang Pemasaran c.q. Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata</p>
3	Kemitraan lintas sektor	<ul style="list-style-type: none">- Adanya konflik kepentingan dan ego sektoral- Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme- Minat investasi di sektor pariwisata rendah	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan sinkronisasi muatan kemitraan lintas sektor dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi dari implementasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)- Membuat nota kesepahaman (MoU) dengan	<p>Deputi 1: Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Manajemen Strategis</p> <p>Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata</p> <p>Deputi 3: Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Investasi</p>

No	Peluang dan Tantangan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
			<p>pemangku kepentingan terkait</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan keselarasan informasi dalam proposal proyek investasi untuk ditawarkan kepada para investor	
4	Pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan sosial dan resistensi masyarakat lokal- Kurangnya minat investasi dan peningkatan biaya operasional	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal- Penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan- Insentif fiskal/kemudahan akses pembiayaan bagi usaha berkelanjutan	<p>Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Deputi 3: Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan c.q. Asisten Deputi Manajemen Investasi c.q. Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha</p>
5	Keanekaragaman destinasi	<ul style="list-style-type: none">- Konflik sosial masyarakat terkait pemanfaatan lahan dan perubahan tata ruang- Kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi- Melakukan sinkronisasi pengembangan destinasi dalam Rencana Induk Pengembangan	<p>Deputi 2: Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur c.q. Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I</p>

No	Peluang dan Tantangan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan infrastruktur dasar- Kurang fokus terhadap destinasi yang ingin dikembangkan	<p>Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi dari implementasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)- Pembangunan infrastruktur dasar- Diversifikasi pasar dan pengembangan paket wisata baru	<p>c.q. Asisten Deputy Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II</p> <p>c.q. Deputy Bidang Perancangan Destinasi Pariwisata</p> <p>Deputi 4 : Deputy Bidang Pemasaran</p> <p>c.q. Asisten Deputy Pemasaran Nusantara</p> <p>Deputi 5: Deputy Bidang Pengembangan dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)</p> <p>c.q. Asisten Deputy <i>Event</i> Nasional</p> <p>c.q. Asisten Deputy <i>Event</i> Daerah</p>
6	Keanekaragaman Budaya dan Tradisi	<ul style="list-style-type: none">- Komersialisasi budaya yang berlebihan, penurunan kualitas dan otentisitas pertunjukan budaya karena disesuaikan dengan selera wisatawan- Sarana dan prasarana pertunjukan budaya yang kurang memadai- Risiko kerusakan situs budaya- Menurunnya minat generasi muda terhadap pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none">- Kolaborasi dengan tokoh adat dan lembaga budaya untuk otentisitas budaya, revitalisasi dan regenerasi seni budaya lokal- Pengembangan dan promosi produk wisata budaya- Pengembangan <i>event</i> daerah berbasis budaya- Pemberdayaan komunitas untuk mengelola atraksi budaya secara profesional- Peningkatan infrastruktur dasar- Pelatihan berbasis kompetensi pemandu wisata	<p>Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan</p> <p>c.q. Asisten Deputy Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri</p> <p>Deputi 2: Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur</p> <p>cq. Asisten Deputy Produk Pariwisata</p> <p>Deputi 4 : Deputy Bidang Pemasaran</p> <p>c.q. Asisten Deputy Pemasaran Nusantara</p> <p>Deputi 5: Deputy Bidang Pengembangan dan</p>

No	Peluang dan Tantangan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya kompetensi pemandu wisata budaya dalam berbahasa asing		Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>) c.q. Asisten Deputi Event Nasional c.q. Asisten Deputi Event Daerah
7	Bonus Demografi	<ul style="list-style-type: none">- Lapangan pekerjaan tidak cukup tersedia untuk usia produktif- Tenaga kerja pariwisata yang kurang kompeten dan sesuai kebutuhan industri- Kesenjangan akses pelatihan untuk setiap wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata- Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi- Kerja sama dengan industri untuk magang dan penyaluran tenaga kerja pariwisata- Program beasiswa dan mobilisasi tenaga kerja lintas daerah- Peningkatan investasi & penciptaan lapangan kerja pariwisata melalui insentif usaha- Diversifikasi usaha pariwisata (MICE, ekowisata) untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja- Kerja sama internasional untuk <i>exchange program</i> tetapi dengan skema <i>return</i> SDM	<p>Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Asisten Deputi Hubungan antar Lembaga Internasional c.q. Asisten Deputi Pendidikan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi</p> <p>Deputi 3: Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan c.q. Asisten Deputi Manajemen Investasi</p> <p>Deputi 5: Deputi Bidang Pengembangan dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>) c.q. Asisten Deputi Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran</p>

No	Peluang dan Tantangan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
b. Tantangan				
1	Krisis Global (Resesi, Pandemi, Konflik Internasional)	<ul style="list-style-type: none">- Penurunan pemesanan tiket dan hotel di destinasi pariwisata- Penurunan daya beli wisatawan- Pembatasan perjalanan internasional- Terganggunya rantai pasok- Menurunnya minat investasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan diplomasi pariwisata dan promosi destinasi aman- Sistem peringatan dini dan protokol keamanan terpadu di destinasi wisata- Komunikasi dan manajemen krisis- Menyelenggarakan <i>event</i> berskala internasional	<p>Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata c.q. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata</p> <p>Deputi 4 : Deputi Bidang Pemasaran c.q. Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata</p> <p>Deputi 5: Deputi Bidang Pengembangan dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>) c.q. Asisten Deputi <i>Event</i> Internasional</p>
2	Perubahan Iklim dan Isu Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Kerusakan ekosistem dan daya tarik alam- Bencana alam dan cuaca ekstrim- Penurunan kualitas udara dan air di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kesadaran tentang pelaku usaha dan masyarakat di destinasi pariwisata tentang penerapan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan- Edukasi wisatawan dan pelaku industri tentang konservasi- Adaptasi infrastruktur hijau terhadap	<p>Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat</p> <p>Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata c.q Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan</p>

No	Peluang dan Tantangan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
			<p>perubahan iklim (misalnya sistem drainase, sistem pengolahan sampah dan limbah, bangunan tahan bencana, konservasi dan keanekaragaman hayati)</p> <ul style="list-style-type: none">- Diversifikasi produk pariwisata- Program pengelolaan dan pembersihan sampah di destinasi pariwisata.	<p>Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I c.q Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II</p> <p>Deputi 3: Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri</p>
3	Pengelolaan SDM dan Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">- Tidak terserapnya sumber daya manusia pariwisata di industri- Kurangnya sumber daya manusia pariwisata yang kompeten	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi SDM pariwisata- Kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi- Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja	<p>Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat c.q. Politeknik Pariwisata</p> <p>Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat</p>

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA

2.1 VISI

Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang diidentifikasi dan digambarkan pada bab sebelumnya pada hakikatnya merupakan lingkungan strategis yang dihadapi oleh Kementerian serta diproyeksikan akan menjadi tantangan bagi Kementerian pada saat ini maupun hingga 5 (lima) tahun ke depan. Hasil identifikasi dan analisis lingkungan strategis tersebut menjadi bekal bagi Kementerian dalam memproyeksikan kondisi strategis yang memungkinkan maupun diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Visi Kementerian sebagai kondisi yang diharapkan terwujud pada tahun 2029 ini tidak dapat dilepaskan dari visi pembangunan nasional tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi besar ini terbagi ke dalam 4 (empat) tahap, dengan tahap 1 (satu) periode tahun 2025-2029 memiliki tema “Penguatan Transformasi”. Adapun pembangunan tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Presiden terpilih yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Kementerian sebagai bagian dari mesin pembangunan nasional, dengan demikian, merumuskan visi perencanaan strategis tahun 2025-2029 yang berkontribusi pada visi pembangunan nasional, sebagai berikut:

“Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan arah strategis pembangunan sektor pariwisata sebagai pilar penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Frasa “pariwisata yang berkualitas” merujuk pada pengembangan pariwisata yang tidak semata mengandalkan jumlah kunjungan, tetapi lebih menekankan pada peningkatan nilai tambah ekonomi, termasuk kontribusi terhadap PDB, pendapatan dari wisnus dan wisman (devisa), investasi, tenaga kerja, serta daya saing kepariwisataan. Wisatawan yang disasar adalah mereka yang mendorong produktivitas ekonomi, pelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, “pariwisata berkelanjutan” menggambarkan pendekatan pembangunan yang berpijak pada prinsip keberlanjutan secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Ini berarti setiap aktivitas pariwisata harus mampu menjaga kelestarian alam dan budaya, menjamin pelibatan aktif masyarakat lokal, memperkuat identitas nasional, serta menjamin distribusi manfaat secara adil di antara pelaku pariwisata. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip SDGs dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029.

Lebih jauh, frasa “mendukung percepatan transformasi ekonomi” menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi sektor andalan, tetapi

juga sebagai pengungkit transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan. Melalui penciptaan lapangan kerja, investasi, dan nilai tambah yang tinggi, sektor ini menjadi pendorong utama pertumbuhan inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, visi ini menempatkan sektor pariwisata sebagai katalisator dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 yaitu negara maju yang berdaulat, adil, makmur, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

2.2 MISI

Sebagai bagian dari pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan nasional, Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029 telah menetapkan 8 (delapan) misi yang disebut sebagai Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan Asta Cita diturunkan menjadi 8 (delapan) PN sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Namun demikian, Kementerian berfokus untuk mendukung PN 2 dan 3 serta turut berkontribusi pada PN 4, 6, dan 8.

Berdasarkan misi pembangunan nasional tersebut, rumusan misi Kementerian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata.

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pendekatan yang menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat. Pengembangan destinasi, promosi pariwisata, penyelenggaraan *event*, serta penguatan industri dan investasi diarahkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB sektor pariwisata, perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global.

2. Memperkuat tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pariwisata guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Misi ini berfokus pada penguatan struktur kelembagaan kementerian dan peningkatan kualitas aparatur melalui reformasi birokrasi, transformasi digital, serta sistem pengelolaan berbasis kinerja dan data. Tata kelola yang baik dan SDM aparatur yang kompeten menjadi prasyarat utama bagi pelaksanaan program dan kebijakan yang efektif.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan misi Kementerian, ditetapkan tujuan strategis yang mencerminkan hasil jangka menengah yang ingin dicapai selama periode 2025–2029, yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata
Tujuan ini mencerminkan peran strategis pariwisata sebagai salah satu motor penggerak transformasi ekonomi nasional. Peningkatan kontribusi sektor ini diukur melalui pencapaian indikator ekonomi utama yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan devisa dari wisatawan. Diharapkan dengan nilai tambah yang didapatkan, maka akan menumbuhkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan pemajuan kebudayaan sebagai sumber daya pariwisata.
2. Meningkatkan Kualitas Governans Kelembagaan dan SDM Aparatur
Tujuan ini mencakup reformasi birokrasi internal, optimalisasi struktur organisasi, penerapan manajemen kinerja dan digitalisasi sistem yang

mendukung pelayanan publik serta pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan tersebut menjadi landasan perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, serta arah kebijakan Kementerian dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan fungsi keberhasilan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 pada tingkat *ultimate outcome*, yaitu kondisi yang dicapai sebagai kontribusi nyata dari program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian. Sasaran strategis Kementerian disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau faktor pendukung keberhasilan utama pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.

Dari kedua pendekatan tersebut, sasaran strategis Kementerian disusun dengan menggunakan kerangka logis baik ke atas (sebagai dukungan atas ketercapaian tujuan strategis) maupun ke bawah (sebagai kondisi akhir dari sasaran program dan sasaran kegiatan). Sasaran Strategis Kementerian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan. Sasaran ini mencakup beberapa indikator kinerja utama sektor pariwisata yaitu rasio PDB pariwisata, devisa pariwisata, pengeluaran wisman, tenaga kerja pariwisata, kunjungan wisman dan perjalanan wisnus.
- 2. Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan SDM aparatur. Sasaran ini diukur melalui peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi, penerapan sistem manajemen kinerja secara menyeluruh, serta peningkatan integrasi dan efisiensi sistem kelembagaan berbasis data dan digitalisasi layanan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpar tahun 2025-2029 dapat dirumuskan seperti yang tersaji pada Tabel 2.1, sedangkan Tabel 2.2. menjelaskan indikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target sasaran strategis.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Keselarasannya dengan Indikator RPJMN Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	KESESUAIAN RPJMN
1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan	1.1. Rasio PDB Pariwisata	Indikator Program Prioritas RPJMN 2025-2029
		1.2. Devisa Pariwisata	
		1.3. Pengeluaran wisatawan mancanegara	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	KESESUAIAN RPJMN
		1.4. Tenaga kerja pariwisata	
		1.5. Kunjungan wisatawan mancanegara	
		1.6. Perjalanan wisatawan nusantara	
2. Meningkatkan kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	

Tabel 2.2 Matriks Indikasi Risiko pada Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan	Rasio PDB Pariwisata	<div><div>- Daya saing kepariwisataan Indonesia stagnan</div><div>- Rendahnya minat investasi di sektor pariwisata</div></div>	<div><div>- Koordinasi lintas sektor untuk peningkatan indeks daya saing kepariwisataan Indonesia</div><div>- Insentif fiskal/kemudahan akses pembiayaan bagi sektor pariwisata unggulan</div><div>- Memperkuat integrasi pariwisata dengan sektor pendukung</div></div>	<div><div>- Deputi 2</div><div>- Deputi 3</div></div>
		Devisa Pariwisata	<div><div>- Pembatasan perjalanan internasional</div><div>- Lama tinggal wisatawan mancanegara yang singkat</div></div>	<div><div>- Penyelenggaraan wisata pertemuan, insentif, konferensi dan pameran (MICE) dan <i>Event by</i> Indonesia</div><div>- Kebijakan Bebas Visa Kunjungan</div></div>	<div><div>- Deputi 4</div><div>- Deputi 5</div></div>

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
			<ul style="list-style-type: none">- Persaingan destinasi pariwisata negara lain- Menurunnya pelaksanaan <i>event</i> berskala internasional	<p>Singkat (BVKS), dan visa <i>multiple entry</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata di pasar prioritas	
		Pengeluaran wisatawan mancanegara	<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya daya beli wisatawan mancanegara- Lama tinggal wisatawan mancanegara yang singkat	<ul style="list-style-type: none">- Diversifikasi wisata : Pengembangan wisata seni dan wisata mewah untuk menarik wisatawan berkualitas- Promosi pasar prioritas dan segmen berdaya beli tinggi- Peningkatan kualitas dan standar layanan usaha wisata	<ul style="list-style-type: none">- Deputy 4- Deputy 5
		Tenaga kerja pariwisata	<ul style="list-style-type: none">- Tidak terserapnya sumber daya manusia pariwisata di industri- Kurangnya sumber daya manusia pariwisata yang kompeten	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi SDM industri pariwisata- Peningkatan jumlah politeknik pariwisata di daerah- Peningkatan kapasitas masyarakat- Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata.	Deputy 1
		Kunjungan wisatawan mancanegara	<ul style="list-style-type: none">- Krisis Global seperti Resesi, Pandemi dan Konflik Internasional	<ul style="list-style-type: none">- Penerapan protokol keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata- Komunikasi dan manajemen krisis	<ul style="list-style-type: none">- Deputy 4- Deputy 5

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
			<ul style="list-style-type: none">- Bencana alam dan isu politik, ekonomi, sosial dan keamanan dalam negeri- Persaingan yang tinggi antar negara dalam hal promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan platform promosi pariwisata yang efektif- Peningkatan promosi paket wisata- Menyelenggarakan <i>event</i> berskala internasional	
		Perjalanan wisatawan nusantara	<ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya konektivitas domestik ke destinasi- Rendahnya daya beli masyarakat- Bencana alam dan isu politik, ekonomi, sosial dan keamanan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi terkait peningkatan konektivitas- Peningkatan promosi wisata nusantara- Penyelenggaraan <i>event</i> nasional dan <i>event</i> daerah yang berkualitas- Komunikasi dan manajemen krisis	<ul style="list-style-type: none">- Deputy 2- Deputy 4- Deputy 5
2	Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none">- Kurang lengkapnya dokumen pendukung dalam evaluasi RB- Perubahan instrumen penilaian RB- Korupsi, gratifikasi, dan konflik kepentingan- Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi RB kurang tepat	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi, internalisasi, pemantauan dan evaluasi RB secara berkala- Inventarisasi dan reviu regulasi sektor pariwisata secara berkala- Tata kelola aset dan Barang Milik Negara- Reviu dan restrukturisasi organisasi berbasis analisis jabatan dan beban kerja- Penyusunan dan pemutakhiran SOP berbasis risiko	Sekretariat Kementerian

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
				<ul style="list-style-type: none">- Audit kepatuhan SOP secara rutin- Peningkatan kualitas SAKIP dan evaluasi kinerja unit kerja- Peningkatan penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan oleh APIP- Implementasi zona integritas WBK/WBBM- Penguatan budaya anti-korupsi dan pemantauan kepatuhan LHKPN/LHKASN- Penetapan dan publikasi standar pelayanan publik- Inovasi layanan publik berbasis digital dan inklusif (<i>multi-channel, difabel-friendly</i>)- Penguatan Sistem Pemerintahan Digital	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pada bab ini memuat arah kebijakan dan strategi Kementerian tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian tahun 2025-2029. Arah kebijakan strategi disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Formulasi arah kebijakan dan strategi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal Kementerian, sehingga arah kebijakan dan strategi yang disusun dapat menjawab kebutuhan pariwisata nasional ke depan.

Dalam rangka memastikan perumusan kebijakan yang relevan, responsif, dan berdampak luas, seluruh arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Kemenpar Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan sebagai prinsip dasar pembangunan nasional. Kelima aspek tersebut meliputi:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial
Upaya peningkatan kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan
2. Pengarusutamaan SDGs
Pengarusutamaan SDGs mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (a) Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) Mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam RPJMN; (c) Penyusunan rencana aksi nasional dan penguatan kolaborasi multi pihak; (d) Pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) Inklusi sosial dan keberlanjutan.
3. Transformasi Digital
Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*) serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMN Tahun 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral, (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (3) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Kelima prinsip di atas menjadi fondasi dalam setiap perumusan arah kebijakan, program, dan kegiatan, guna memastikan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta daya saing bangsa dalam jangka panjang.

Selain 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan tersebut, keanekaragaman hayati juga menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan. Hal ini ditegaskan dalam berbagai dokumen nasional seperti Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, serta Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2025–2045 yang telah selaras dengan kerangka kerja keanekaragaman hayati global. Keanekaragaman hayati merupakan penyangga utama ekosistem, budaya, dan keberlanjutan ekonomi lokal, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata yang banyak bergantung pada sumber daya alam dan budaya lokal. Oleh karena itu, pengarusutamaan aspek ini menjadi sangat penting dalam desain kebijakan lintas sektor untuk menjaga keseimbangan ekologis, melindungi spesies endemik, serta memperkuat destinasi wisata yang regeneratif, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

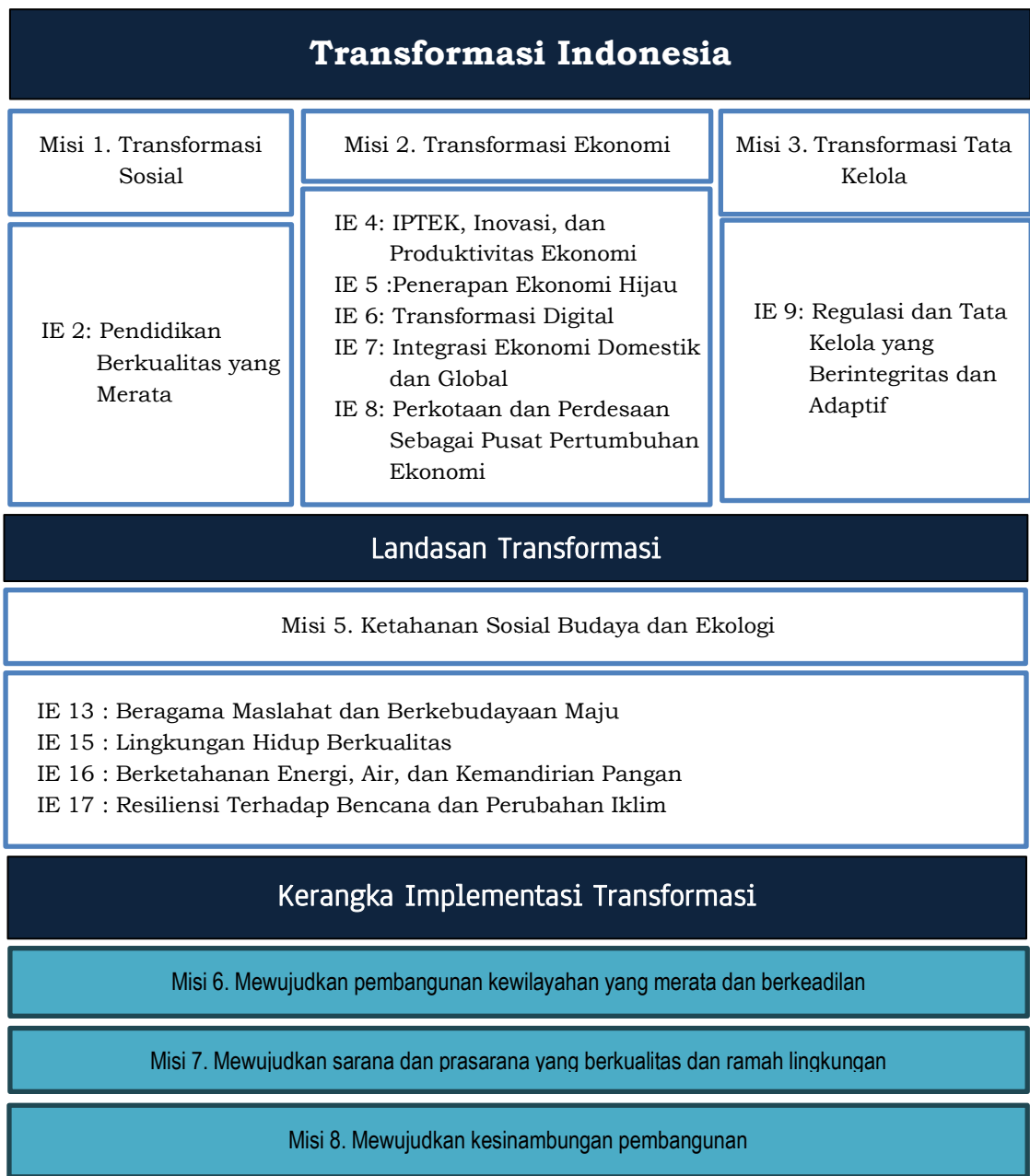
RPJPN adalah landasan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN dan rencana strategis kementerian/lembaga. Sejalan dengan hal tersebut, maka penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 ini harus selaras dengan rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJPN dan RPJMN.

RPJPN bertujuan mencapai visi dan misi bernegara yaitu “Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Visi dan misi bernegara

tersebut diterjemahkan menjadi visi RPJPN 2025-2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Dari visi tersebut, Kementerian memiliki peran dalam mencapai semua visi tersebut dan paling berkaitan dengan upaya mencapai Indonesia yang Bersatu, Maju, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia Bersatu yaitu Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila serta mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang lebih kokoh.

Sejalan dengan visi tersebut, Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 berfokus dalam mengembangkan pariwisata untuk menjaga persatuan dan mewujudkan keberagaman budaya, bahasa dan adat istiadat Indonesia. Visi Indonesia Maju yaitu “Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil”. Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 mengarah pada penguatan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Terakhir, visi Indonesia Berkelanjutan berarti “komitmen Indonesia untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan”. Sejalan dengan visi tersebut, maka Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 mendorong penguatan sektor pariwisata yang tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan kelestarian budaya serta tata kelola pemerintahan yang baik.

RPJPN menyusun 8 (delapan) misi agenda pembangunan transformasi menyeluruh dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan Indonesia Emas (IE) dan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) misi RPJPN tersebut. Gambar 3.1 menunjukkan sejumlah misi dan arah (tujuan) pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 yang menjadi landasan penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029.



Keterangan : IE = Indonesia Emas

Gambar 3.1 Kontribusi Kementerian dalam Mewujudkan Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045

Pembangunan pariwisata dalam RPJPN 2025-2045 diarahkan melalui transformasi multi-sektoral, yaitu:

1. transformasi sosial, pariwisata yang didukung oleh SDM yang unggul, berdaya saing, dan berbasis keahlian;
2. transformasi ekonomi, pariwisata yang didukung produktivitas ekonomi dan pusat ekonomi dengan memperhatikan integrasi rantai pasok domestik serta transformasi digital;
3. transformasi tata kelola, pariwisata yang diperkuat oleh ekosistem, regulasi, dan partisipasi masyarakat; dan
4. ketahanan sosial budaya dan ekologi, pariwisata yang memperhatikan kemajuan kebudayaan dan kelestarian lingkungan serta ketahanan terhadap bencana.

Target capaian Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 untuk dapat mendukung pencapaian Agenda Pembangunan yang tercantum pada RPJPN

yaitu rasio PDB Pariwisata dari 4,9%-5% (empat koma sembilan persen sampai dengan lima persen) di tahun 2029 menjadi 8% (delapan persen) di tahun 2045 serta devisa pariwisata dari US\$32 miliar-US\$39,4 miliar (tiga puluh dua miliar dolar Amerika sampai dengan tiga puluh sembilan koma empat miliar dolar Amerika) pada tahun 2029 menjadi US\$100 miliar (seratus miliar dolar Amerika) pada tahun 2045.

Selain selaras dengan RPJPN, Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029. Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mencapai PN 3 yaitu, “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”. Indikator pencapaian prioritas nasional tersebut yaitu Rasio PDB Pariwisata 4,9%-5% (empat koma sembilan persen sampai dengan 5 persen) dan devisa pariwisata US\$32 miliar-US\$39,4 miliar (tiga puluh dua miliar dolar Amerika sampai dengan tiga puluh sembilan koma empat miliar dolar Amerika).

Untuk mencapai PN 3 maka ditetapkan Prioritas Pembangunan (PP) sektor pariwisata yaitu, “Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan”, dengan sasaran yaitu, “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan”, dan 5 (lima) indikator PP serta target capaian pada tahun 2029 sebagai berikut:

1. Pengeluaran wisman yaitu rata-rata belanja sebesar US\$1.600-US\$1.672 (seribu enam ratus dolar Amerika sampai dengan seribu enam ratus tujuh puluh dua dolar Amerika) per kunjungan.
2. Tenaga Kerja Pariwisata sejumlah 29 juta (dua puluh sembilan juta) orang.
3. Indeks Pembangunan Pariwisata (*Travel and Tourism Development Index/TTDI*) pada peringkat 20 (dua puluh) besar dunia.
4. Kunjungan wisman sejumlah 20 juta-23,5 juta (dua puluh juta sampai dengan dua puluh tiga koma lima juta) kunjungan.
5. Perjalanan wisnus sejumlah 1,5 miliar (satu koma lima miliar) perjalanan.

Kementerian juga akan berkontribusi pada beberapa Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

1. Percepatan pembangunan DPP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramen, Labuan Bajo, dan Danau Toba.
2. Pengembangan DPP Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai.
3. Penguatan DPR Bali, *Greater Jakarta*, dan Kepulauan Riau.

Dengan sejumlah indikator KP, seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor penyediaan akomodasi, dan makan minum untuk DPP dan DPR; Pendapatan dari wisatawan nusantara untuk DPP dan DPR; Devisa pariwisata untuk DPP dan DPR; Tenaga kerja pariwisata untuk DPP dan DPR; serta Investasi sektor pariwisata untuk DPP dan DPR.

Arah kebijakan percepatan pengembangan DPP dan penguatan DPR sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1 Sebaran Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas

Kegiatan Prioritas		Destinasi Prioritas	Visi Pembangunan	Key Tourism Area (KTA)	Tematik	Delineasi
Percepatan Pembangunan an 4 DPP	1	Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Berkelas Dunia Berbasis Pelestarian Kearifan Budaya Jawa	Borobudur (Kab. Magelang), Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Prambanan (Kab. Sleman dan Kab. Klaten) sesuai Perpres No. 88 Tahun 2024	Budaya, Urban <i>Heritage</i> , MICE	Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta
	2	Lombok-Gili Tramenas	Sebagai Destinasi yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Inklusif serta Memberikan Pengalaman Budaya dan Alam yang Berkualitas	Gili-Senggigi, Pantai Selatan Mandalika, Mataram dskt, dan Rinjani sesuai Perpres No. 84 Tahun 2021	Alam, Geologi, Urban <i>Heritage</i> , <i>Adventure</i> dan Olahraga	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kota Mataram
	3	Danau Toba	Membangun dan Memajukan Tanah Leluhur, oleh dan Bagi seluruh masyarakat	Parapat (Kab. Simalungun), Simanindo dan Pangururan (Kab. Samosir), Balige (Kab. Toba), Muara (Kab. Tapanuli Utara), Merek (Kab. Karo) sesuai Perpres No. 89 Tahun 2024	Alam, Geologi, Budaya, Urban <i>Heritage</i>	Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, xKab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat
	4	Labuan Bajo	Sebagai Destinasi Wisata Berbasis Ekowisata yang Premium dan Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan yang Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo (Kab. Manggarai Barat)	Alam, <i>Adventure</i> dan Olahraga, MICE	Kab. Manggarai Barat

Kegiatan Prioritas	Destinasi Prioritas		Visi Pembangunan	Key Tourism Area (KTA)	Tematik	Delineasi
Pengembangan 6 DPP	1	Manado-Likupang	Sebagai Simpul Pariwisata Bahari Asia Pasifik yang Berkelanjutan dan Bertumpu Pada Masyarakat	Manado-Bunaken, Likupang, Bitung-Lembeh, Tomohon, Tondano, Minahasa Pantai, Airmadidi sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2024	Alam, Adventure dan Olahraga	Kab. Minahasa Utara, Kab. Manado, Kab. Minahasa, Kab. Tomohon, Kota Bitung
	2	Bangka Belitung	Menjadi Destinasi Wisata Kelas Dunia Berbasis Bahari dan Geopark yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Mentok-Teritip, Belinyu, Sungailiat, Pangkalpinang, Semujur Kurau, Koba-Berikat, Toboali Lepar, Batu Betumpang, Tanjung Pandan-Tanjung Kelayang, Seliu-Tanjung Rusa, Kelumpang-Sekunyit, Manggar, Bukulimau sesuai Perpres No. 17 Tahun 2024	Alam, Geologi	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Kota Pangkal Pinang
	3	Raja Ampat	Destinasi Pariwisata Geopark Kepulauan yang Berkualitas, serta Berbasis Konservasi dan Masyarakat secara Berkelanjutan	Selat Dampier, Wayag, Misool (Kab. Raja Ampat) sesuai Perpres No. 87 Tahun 2024	Alam, Geologi	Kab. Raja Ampat
	4	Bromo-Tengger-Semeru	Pariwisata Alam dan Budaya yang Berkelanjutan, Mempunyai Kualitas Kelas Dunia dengan Memberdayakan Masyarakat dan Kekayaan Lokal	Kab Malang, Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kota Malang	Alam, Budaya, Adventure dan Olahraga	Kab. malang, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan, Kota Malang

Kegiatan Prioritas	Destinasi Prioritas		Visi Pembangunan	Key Tourism Area (KTA)	Tematik	Delineasi
			untuk Mencapai Kesejahteraan			
	5	Wakatobi	Destinasi Pariwisata Bahari Berkelas Dunia dalam Kesatuan dengan Kelestarian Taman Nasional Laut dan Cagar Biosfer	Wangi wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko (Kab. Wakatobi)	Alam	Kab. Wakatobi
	6	Morotai	Terwujudnya Morotai Sebagai Destinasi Pariwisata Dunia Berbasis Bahari dan Sejarah yang Berdaya Saing Global, Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat	KTA Moro Point, KTA Rao, KTA Pasifik	Alam, Budaya, <i>Adventure</i> dan Olahraga	Kab. Morotai
Penguatan 3 DPR	1	Bali	Destinasi Pariwisata Unggulan yang Berdaya Saing Internasional, Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, Berkelanjutan, dan Inklusif	KEK Sanur, KEK Kura Kura Bali, Desa Serangan, Nusa Dua (Kab. Badung), Uluwatu, Kintamani, Bali Barat	Alam, Geologi, Budaya, Urban <i>Heritage</i> , MICE	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Bali
	2	Greater Jakarta	Kota Global Berkelanjutan	Jabodetabek-Punjur sesuai Perpres No. 60 Tahun 2020	Budaya, Urban <i>Heritage</i> , MICE	Provinsi DKI Jakarta (seluruh kota), Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur

Kegiatan Prioritas	Destinasi Prioritas		Visi Pembangunan	Key Tourism Area (KTA)	Tematik	Delineasi
	3	Kepulauan Riau	Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia	Kota Batam, Kab.Bintan, Kab. Natuna, Kab. Anambas	Alam, Geologi, Budaya, MICE	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Selain KP pada PN 3 di atas, Kementerian juga mendukung PN 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara, dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, dengan KP pembangunan pariwisata berbasis bahari dan danau dan sasaran KP yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan. Adapun indikator dan target capaian KP tersebut pada tahun 2029 sebagai berikut:

1. Prioritasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau sejumlah 10 (sepuluh) lokasi, yaitu Bali, Kepulauan Riau, Lombok-Gili Tramen, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
2. Jumlah wisnus di destinasi bahari dan danau prioritas sebanyak 16.985.120 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh) perjalanan.
3. Jumlah wisman di destinasi bahari dan danau prioritas sebanyak 16.275.780 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) kunjungan.

Strategi pembangunan pariwisata nasional periode tahun 2025–2029 diarahkan untuk mempercepat penyelesaian 10 (sepuluh) DPP dan memperkuat 3 (tiga) DPR sebagai bagian dari transformasi sektor pariwisata menuju sistem yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan arahan RPJMN Tahun 2025–2029, yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penguatan daya saing global. Secara khusus, strategi ini menekankan pengembangan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pelestarian budaya dan alam, sebagai kekuatan khas Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Penguatan 3 (tiga) DPR menjadi komponen penting transformasi pariwisata Indonesia. Kepulauan Riau di wilayah barat Indonesia dikembangkan dengan visi “Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia”. Destinasi ini menonjolkan pariwisata pesisir dan marina internasional sebagai pusat ekonomi biru dan konektivitas wisata perbatasan. Greater Jakarta, dengan visi “Kota Global Berkelanjutan”, diarahkan sebagai destinasi regeneratif urban yang mengintegrasikan MICE, warisan kota, dan potensi pariwisata lainnya dalam ruang metropolitan. Bali, yang membawa visi “Destinasi pariwisata unggulan yang berdaya saing internasional, berbasis budaya dan kearifan lokal, berkelanjutan, dan inklusif”, menjadi percontohan global transformasi destinasi pulau berbasis pesisir dan spiritualitas, yang menyatukan konservasi laut, budaya Hindu Bali, dan inovasi digital dalam satu ekosistem.

Borobudur–Yogyakarta–Prambanan dikembangkan sebagai kawasan budaya unggulan dengan visi “Sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan berkelas dunia berbasis pelestarian budaya Jawa”. Ketiga kawasan ini mengintegrasikan warisan dunia UNESCO dengan pengelolaan pariwisata berbasis spiritualitas, edukasi budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Lombok–Gili–Tramena membawa visi “Sebagai destinasi yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif serta memberikan pengalaman budaya dan alam yang berkualitas”. Pembangunan kawasan ini mencakup Mandalika dan Gili sebagai model wisata bahari terpadu, berbasis infrastruktur hijau dan partisipasi UMKM lokal.

Manado–Likupang, sebagai simpul ekonomi Pasifik, membawa visi “Sebagai simpul pariwisata bahari Asia Pasifik yang berkelanjutan dan bertumpu pada masyarakat”. Pengembangannya mencakup integrasi kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan resor dengan sistem pelibatan komunitas dan pengendalian dampak lingkungan.

Bangka Belitung, dengan visi “Menjadi destinasi wisata kelas dunia berbasis bahari dan *geopark* yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”, menonjolkan kekuatan pantai granit, warisan tambang, dan wisata laut berbasis konservasi sebagai strategi pembangunan pariwisata bahari yang inklusif.

Danau Toba dikembangkan dengan visi “Membangun dan memajukan tanah leluhur, oleh dan bagi seluruh masyarakat”. Destinasi danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara ini menjadi simbol kebangkitan kawasan berbasis danau dengan pendekatan berbasis budaya Batak, pelibatan komunitas adat, dan konservasi lanskap alamnya.

Raja Ampat, dengan visi “Destinasi pariwisata *geopark* kepulauan yang berkualitas, serta berbasis konservasi dan masyarakat secara berkelanjutan”, menjadi ikon pariwisata laut dunia. Fokusnya terletak pada konservasi keanekaragaman hayati laut dan pelibatan masyarakat adat dalam tata kelola berbasis zonasi perairan yang lestari.

Labuan Bajo, dengan visi “Sebagai destinasi wisata berbasis ekowisata yang premium dan berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan yang mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat”, diarahkan sebagai ikon ekowisata nasional berbasis konservasi Taman Nasional Komodo dan ekonomi lokal.

Bromo–Tengger–Semeru membawa visi “Pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan, mempunyai kualitas kelas dunia dengan memberdayakan masyarakat dan kekayaan lokal untuk mencapai kesejahteraan”. Pengembangan destinasi ini berpijak pada kekuatan lanskap gunung berapi dan kearifan masyarakat Tengger dalam pengelolaan ruang spiritual dan ekologis.

Wakatobi menjadi destinasi unggulan bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dengan visi “Destinasi pariwisata bahari berkelas dunia dalam kesatuan dengan kelestarian Taman Nasional Laut dan Cagar Biosfer”. Destinasi ini menunjukkan sinergi ideal antara konservasi dan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

Morotai dikembangkan dengan visi “Terwujudnya Morotai sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis bahari dan sejarah yang berdaya saing global, berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat”. Letaknya yang strategis dan warisan sejarah menjadikan Morotai destinasi bahari berbasis narasi sejarah dan konservasi laut.

Di luar DPP dan DPR, pemerintah juga membuka ruang pengembangan destinasi lainnya di seluruh Indonesia selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan pengembangannya akan difokuskan pada prinsip berkualitas dan berkelanjutan, dengan mengutamakan potensi lokal, keunikan budaya, integrasi lingkungan, serta kesiapan infrastruktur dasar. Destinasi-destinasi tersebut dapat mencakup Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dan perkotaan, kepulauan kecil, situs budaya lokal, hingga wilayah penyangga destinasi utama yang memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Pengembangan dilakukan melalui pemetaan daya tarik wisata unggulan, peningkatan kapasitas SDM lokal, serta kolaborasi lintas sektor untuk membentuk ekosistem pariwisata yang tangguh dan adaptif. Secara keseluruhan, strategi ini menegaskan bahwa pembangunan destinasi pariwisata tidak semata berorientasi pada jumlah wisatawan, tetapi berfokus pada kualitas pengalaman, daya saing global, keberlanjutan lingkungan, pelibatan masyarakat lokal, serta konservasi ekosistem bahari dan danau. Melalui pendekatan tematik yang mencakup budaya, geologi, alam, *urban heritage*, *adventure*, dan MICE, Indonesia menempatkan pariwisata sebagai motor pembangunan inklusif dan sebagai pilar penting dalam transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PARIWISATA

Sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045, keseluruhan arah kebijakan dan strategi Kementerian dirancang dengan mengarusutamakan 5 (lima) aspek pembangunan. Kelima aspek ini menjadi prinsip dasar untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata nasional tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga mendukung pemerataan manfaat, pelestarian lingkungan, penguatan kelembagaan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dalam konteks tersebut, penting pula ditekankan bahwa isu keanekaragaman hayati merupakan bagian integral dari arah pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati telah menjadi isu strategis dalam berbagai dokumen nasional seperti RPJPN 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, serta IBSAP 2025–2045. Dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas, pariwisata berbasis alam dan budaya sangat bergantung pada kelestarian flora, fauna, ekosistem laut, dan komunitas adat lokal. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata juga diarahkan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan berkelanjutan keanekaragaman hayati, terutama di destinasi wisata alam dan bahari.

Dalam upaya mendorong kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung transformasi menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian mengembangkan program unggulan yang sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kelima program ini dirancang untuk menjawab tantangan global, memperkuat daya saing nasional, dan memperluas pemerataan manfaat pariwisata secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Program-program tersebut tidak berdiri sendiri sebagai

inisiatif sektoral, tetapi akan disematkan secara lintas deputi dan diinternalisasikan ke dalam rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian.

Artinya, setiap kedeputian akan berperan aktif dan kolaboratif dalam mengimplementasikan program unggulan tersebut melalui tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, promosi dan pemasaran, penyelenggaraan *event*, hingga reformasi tata kelola kelembagaan dan transformasi digital. Adapun program unggulan tersebut meliputi:

1. Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih

Gerakan Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih merupakan bagian dari penanganan sampah nasional di destinasi pariwisata. Program ini bertujuan untuk mengamplifikasi pesan dan mengedukasi publik bahwa sampah adalah masalah bersama yang melibatkan *stakeholders* pariwisata, sehingga penanganannya harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi, bukan hanya oleh satu unit tertentu.

Gerakan ini hadir untuk menjawab isu mendasar dalam pembangunan destinasi, yaitu kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan. Saat ini, Skor TTDI Indonesia pada pilar *Health & Hygiene* tahun 2024 tercatat sebesar 3,78 (tiga koma tujuh delapan), masih di bawah rata-rata Asia Pasifik sebesar 4,53 (empat koma lima tiga). Selain itu, skor *Sustainability* Indonesia pada TTDI 2024 berada di angka 3,81 (tiga koma delapan satu), juga di bawah rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 4,26 (empat koma dua enam). Kedua indikator ini perlu ditingkatkan melalui program Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih.

Sebagai strategi, Kementerian akan membentuk satuan tugas khusus dan membangun pola kemitraan penanganan sampah dan toilet bersih yang melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, masyarakat dan komunitas, akademisi, industri, dan mitra swasta. Intervensi ini akan difokuskan pada destinasi utama dan desa wisata untuk memberikan kenyamanan serta jaminan kesehatan bagi wisatawan, sekaligus memperkuat persepsi positif global terhadap pariwisata Indonesia.

Lebih lanjut, program ini secara langsung menjawab tantangan sanitasi, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan keberlanjutan di destinasi wisata. Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih mendukung pencapaian SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), serta mengarusutamakan kesetaraan gender, pelibatan komunitas lokal, dan kelompok rentan (SDG 5 dan 10). Dengan pendekatan lintas sektor dan kerja sama pusat-daerah dalam pembangunan infrastruktur sanitasi dan edukasi, Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih juga berkontribusi pada SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Selain itu, Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih mendorong perilaku ramah lingkungan dan pengelolaan limbah (SDG 12 dan 13), serta mendukung konservasi keanekaragaman hayati di destinasi berbasis alam (SDG 14 dan 15).

2. *Tourism 5.0*: AI dan Digitalisasi

Transformasi digital di sektor pariwisata bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam menjawab perubahan perilaku

wisatawan global. *Tourism 5.0* mendorong pemanfaatan teknologi terkini seperti *Artificial Intelligence* (AI), *machine learning*, dan *user journey personalization* dalam digitalisasi pemasaran pariwisata. Melalui platform indonesia.travel yang dilakukan pembaharuan (*revamping*), sehingga calon wisatawan dapat menikmati pengalaman yang telah dipilih dan disesuaikan berdasarkan preferensi, mudah diakses, dan relevan dengan minat pribadi mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan promosi, mempercepat konversi kunjungan, serta menciptakan pengalaman wisata digital yang imersif dan berbasis data strategis.

Tourism 5.0 adalah tulang punggung transformasi digital sektor pariwisata, memperkuat SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur dan SDG 17: melalui kerja sama pengembangan teknologi dengan sektor swasta, *start-up*, dan komunitas digital. Selain itu, memperkuat SDG 5 dan 10: menjamin akses teknologi yang inklusif, dan SDG 13 dan 12: mendukung efisiensi dan dekarbonisasi promosi. Program ini memanfaatkan AI dan *big data* untuk mengelola risiko *overtourism* dan mendukung perlindungan keanekaragaman hayati (SDG 14 dan 15). *Tourism 5.0* juga menjadi bagian dari tata kelola berbasis data untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pariwisata.

3. Pariwisata Naik Kelas

Kementerian mendorong reposisi Indonesia menjadi destinasi pariwisata berkualitas tinggi. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan *niche tourism* (minat khusus) seperti: *gastro tourism* (kuliner lokal), *marine tourism* (wisata bahari), *wellness tourism* (wisata kebugaran) *luxury tourism* (wisata mewah), dan *art tourism* (wisata seni). Tujuan utamanya adalah menarik wisatawan dengan pengeluaran tinggi, memperpanjang lama tinggal, serta meningkatkan pendapatan devisa secara signifikan. Reposisi citra ini diperkuat dengan *storytelling* destinasi, pengalaman berbasis komunitas, dan pengelolaan destinasi yang memadukan estetika, kenyamanan, dan keberlanjutan.

Program ini memposisikan Indonesia sebagai destinasi berkualitas dengan fokus pada wisata minat khusus. Kontribusinya terhadap SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi kuat, serta mendukung pemberdayaan UMKM perempuan dan komunitas lokal (SDG 1, 5, dan 10). Dengan mengarusutamakan wisata berkelanjutan dan ramah lingkungan, program ini mendukung SDG 12, 13, 14, dan 15. Reposisi destinasi ini juga mendorong kerja sama dengan pelaku industri global dan media internasional, memperkuat SDG 17 dalam aspek kemitraan promosi, peningkatan kapasitas, dan pertukaran praktik baik.

4. *Event by Indonesia*

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan seni yang dapat dikurasi menjadi *event* berbasis kekayaan intelektual yang unik dan otentik. Program ini mendorong penyelenggaraan *event* pariwisata kelas dunia yang tidak hanya mengangkat citra Indonesia secara global, tetapi juga memperkuat ekosistem industri pariwisata lokal dan membuka peluang ekspor budaya. Dengan menjadikan *event* sebagai *signature tourism product*, Indonesia diharapkan tampil sebagai pusat penyelenggaraan *event* internasional yang kreatif, otentik, dan berdampak ekonomi tinggi.

Event berkelas dunia yang berbasis kekayaan intelektual budaya mendukung SDG 8 dan 11, serta mengarusutamakan kesetaraan gender dan pelaku budaya lokal (SDG 5 dan 10). Selain sebagai sarana diplomasi budaya, program ini menciptakan kemitraan kreatif lintas sektor antara kementerian, pelaku budaya, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan dan pembiayaan *event*, mendukung SDG 17 secara nyata. *Event-event* ini juga menjadi medium edukasi publik untuk konservasi hayati dan nilai budaya lokal.

5. Desa Wisata

Hingga tahun 2024, sebanyak 6.061 (enam ribu enam puluh satu) desa wisata menjadi sasaran pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, berbasis komunitas, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas infrastruktur, amenitas, *storytelling* lokal, dan kapasitas SDM masyarakat desa wisata agar mampu menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata. Target ke depan adalah menjadikan lebih banyak desa wisata Indonesia sebagai juara internasional, berdaya saing global, dan mampu mengangkat nama Indonesia di forum pariwisata dunia.

Sebagai pilar pemerataan wilayah pembangunan, program Desa Wisata menjawab SDG 1, 4, 5, 8, dan 10 melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pendidikan vokasi, dan akses ekonomi lokal. Dengan mengembangkan ekowisata berbasis komunitas, konservasi lingkungan (SDG 13, 14, 15), dan partisipasi aktif warga dalam perencanaan, program ini memperkuat tata kelola lokal berbasis kolaborasi. Melalui kemitraan antara pemerintah, desa, perguruan tinggi, dan sektor swasta, program ini juga mendukung SDG 17 dalam aspek koordinasi multipihak dan pembangunan berbasis komunitas.

6. Sinergi Peningkatan Keselamatan Wisata

Sinergi Peningkatan Keselamatan Wisata memperkuat standar keselamatan dan manajemen risiko di daya tarik wisata serta usaha pariwisata melalui orkestrasi lintas-sektor yang lincah dari pemerintah pusat-daerah, komunitas, academia, industri, hingga mitra filantropi. Fokusnya adalah pencegahan insiden, respons cepat, dan pemulihan reputasi destinasi dengan membangun Satgas, SOP terpadu, audit berkala, infrastruktur kritikal (toilet bersih dan aman, rambu, jalur evakuasi, pos Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), serta *command centre* berbasis data yang terhubung dengan *dashboard* dan *panic button*. Program ini mengikat inisiatif Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih, *Tourism 5.0*, Desa Wisata, *Event by Indonesia*, dan reposisi “Pariwisata Naik Kelas” menjadi satu ekosistem yang aman, nyaman, dan berkelas dunia, sehingga meningkatkan lama tinggal, belanja wisatawan, serta persepsi positif global secara konsisten.

Dari perspektif SDGs, program ini mengakselerasi SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) sebagai pilar utama; sekaligus mengarusutamakan inklusivitas melalui SDG 5 dan 10, praktik konsumsi-produksi bertanggung jawab serta aksi iklim lewat SDG 12 dan 13, dan perlindungan keanekaragaman hayati lewat SDG 14 dan

15. Kemitraan multipihak yang terstruktur menjadi mesin kolaborasi SDG 17. Dengan pendekatan *data-driven* dan budaya keselamatan yang tertanam di destinasi prioritas dan desa wisata, keselamatan berubah dari *compliance* menjadi *competitive advantage* yang mendorong pariwisata Indonesia melesat lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Kebijakan-kebijakan tersebut mendukung transformasi menyeluruh pada aspek destinasi, industri, investasi, pemasaran, *event* pariwisata, serta tata kelola kelembagaan. *Tourism 5.0* berperan sebagai fasilitator utama untuk meningkatkan efisiensi, pengalaman pengguna, dan pengambilan keputusan berbasis data melalui pemanfaatan teknologi seperti *Artificial Intelligence*, *big data analytics*, dan *digital platform*. Ini merupakan perwujudan nyata dari pengarusutamaan transformasi digital, yang menjadi fondasi dalam modernisasi sektor pariwisata.

Namun demikian, transformasi ini tidak berdiri sendiri. Setiap kebijakan dan program juga harus mengintegrasikan aspek pengarusutamaan lainnya, seperti PUG dan inklusi sosial, dengan memastikan partisipasi kelompok rentan dan perempuan dalam rantai nilai pariwisata. Selain itu, seluruh kebijakan harus mendukung pencapaian SDGs secara lintas sektor. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga menjadi prinsip utama, mengingat dampak krisis iklim terhadap daya dukung destinasi wisata, terutama yang berbasis alam dan pesisir.

Lebih jauh, kebijakan pariwisata harus menjunjung tinggi ketahanan sosial budaya, melalui pelestarian identitas lokal, nilai adat, dan kearifan komunitas; serta mendorong pemerataan wilayah dan pembangunan desa, khususnya melalui program desa wisata dan pemberdayaan pelaku lokal. Semua kebijakan tersebut harus dijalankan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, berbasis transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi multipihak.

Dalam konteks keberlanjutan, perhatian khusus juga diarahkan pada keanekaragaman hayati, yang merupakan aset penting bagi pariwisata Indonesia. Perlindungan ekosistem darat dan laut, konservasi spesies endemik, serta integrasi prinsip pelestarian dalam perencanaan destinasi menjadi bagian integral dari transformasi pariwisata yang tidak hanya digital dan inovatif, tetapi juga adil, tangguh, hijau, dan bertanggung jawab secara ekologis dan sosial.

Dengan demikian, arah kebijakan Kementerian tahun 2025–2029 tidak hanya selaras dengan prioritas nasional dan visi presiden, tetapi juga berorientasi pada masa depan yang tangguh, digital, hijau, adil, dan berkelanjutan. Keenam arah kebijakan utama yang meliputi penguatan SDM dan kelembagaan, pengembangan destinasi, industri, pasar, *event*, serta tata kelola kementerian, akan diimplementasikan secara kolaboratif melalui pendekatan lintas sektor dan lintas pelaku, untuk menjadikan pariwisata sebagai katalis transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam periode tahun 2025–2029, Kementerian memiliki 6 (enam) arah kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Setiap arah kebijakan diiringi dengan strategi spesifik, melibatkan unit pelaksana, serta relevansi terhadap sasaran strategis dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Unit pelaksana

utama di dalam Kementerian bertanggung jawab untuk menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan menyesuaikan dengan arah kebijakan sehingga dapat mencapai sasaran strategis Kementerian. Setiap arah kebijakan mengedepankan kolaborasi intraorganisasional di dalam internal Kementerian maupun dengan lintas kementerian/lembaga terkait. Arah kebijakan Kementerian juga mendorong kolaborasi intraorganisasional dengan organisasi lainnya baik sektor privat, lembaga nirlaba, perguruan tinggi dan masyarakat. Adapun penjelasan 6 (enam) arah kebijakan Kementerian tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata (SS 1), dengan fokus pada peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata. Dalam konteks transformasi pariwisata modern, kebijakan ini diperkuat dengan pendekatan *Tourism 5.0* melalui penerapan *Learning Management System (LMS)*, simulasi pembelajaran menggunakan teknologi, serta melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pemetaan kompetensi SDM kepariwisataan secara adaptif dan berbasis data.

Kebijakan ini mencakup 3 (tiga) sasaran utama: (1) Terserapnya tenaga kerja pariwisata di destinasi prioritas dan regeneratif, (2) Termanfaatkannya kerja sama dan kebijakan strategis bidang kepariwisataan, dan (3) Meningkatnya kapabilitas SDM pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, berbasis pendekatan digital dan kolaboratif.

Pelaksanaan arah kebijakan ini secara substansial mengintegrasikan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan nasional:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial: Pelatihan, pemberdayaan, dan kewirausahaan wisata dirancang dengan pendekatan responsif gender, mengacu salah satunya pada *Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan*. Perempuan, pemuda, dan kelompok marginal diberikan akses prioritas dalam pelatihan vokasi dan penguatan peran dalam kelembagaan pariwisata lokal (seperti BUMDesa). Seluruh fasilitas pelatihan juga diharapkan inklusif secara aksesibilitas fisik dan sosial.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Arah kebijakan ini berkontribusi pada SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab). Program pendidikan dan pelatihan terhubung langsung dengan upaya menciptakan SDM yang adaptif, inovatif, dan inklusif.
3. Transformasi Digital: Teknologi dimanfaatkan secara luas untuk digitalisasi proses pelatihan (melalui LMS, *e-learning*), pemetaan kebutuhan kompetensi, dan penguatan sistem informasi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, serta beradaptasi terhadap teknologi baru pariwisata global.
4. Pembangunan Rendah Karbon: Kurikulum pendidikan dan pelatihan diorientasikan pada *green tourism*, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah destinasi, dan konservasi lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon yang berlaku pada industri pariwisata global.
5. Pembangunan Berketahanan Iklim: Peningkatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim di destinasi,

seperti konservasi sumber daya dan pelestarian alam, merupakan bagian penting dari desain pelatihan vokasi dan manajemen destinasi.

Dalam implementasi sasaran pertama, kegiatan difokuskan pada pelatihan teknis dan manajerial bagi tenaga kerja industri pariwisata melalui pendekatan berbasis kompetensi dan skema sertifikasi profesi yang diakui secara nasional dan internasional. Masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata prioritas dan regeneratif diberdayakan melalui pelatihan kapasitas berbasis pariwisata berkelanjutan, pelatihan *soft skill*, keterampilan manajemen, pelatihan kewirausahaan, dan pelibatan aktif dalam rantai pasok pariwisata, serta pelatihan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk sasaran kedua, Kementerian menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan utama. Pertama yaitu Pengembangan Manajemen Strategis, dengan menghasilkan kebijakan sektoral dan tematik berbasis data, seperti transformasi digital, regenerasi destinasi, PUG, inklusi sosial, serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan bidang kepariwisataan ini menjadi dasar harmonisasi kebijakan lintas sektor dan pengambilan keputusan internal. Kedua yaitu Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Internasional, yang mencakup partisipasi dalam forum global (seperti UNWTO dan ASEAN), adopsi praktik baik, dan penyusunan posisi strategis Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral. Upaya ini menguatkan dimensi global dan legitimasi internasional dari kebijakan nasional.

Adapun sasaran ketiga dijalankan melalui penguatan sistem pendidikan vokasi kepariwisataan modern dan responsif terhadap perubahan industri. 6 (enam) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di Bali, Makassar, Medan, Palembang, Lombok, dan Bandung menjalankan mandat ini dengan spesialisasi wilayah dan fokus pengembangan wisata tematik pada wisata budaya, wisata bahari, wisata *geopark*, wisata olahraga, PRM dan wisata kuliner. Kurikulum diperbarui secara berkala berdasarkan kebutuhan industri, dan kerja sama internasional dengan lembaga pendidikan serta pelaku industri global terus diperluas untuk menjamin relevansi lulusan.

Kebijakan ini juga mencakup penguatan kelembagaan pendidikan melalui penyelarasan standar kompetensi nasional dengan standar kompetensi internasional, manajemen berbasis data dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan *academic-industry-community linkage* yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan kuantitatif tenaga kerja, tetapi juga mengedepankan pembangunan SDM yang adaptif, berwawasan keberlanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Dengan integrasi teknologi, nilai-nilai sosial, prinsip hijau, dan tata kelola yang baik, kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas nasional untuk menghadirkan pariwisata Indonesia yang kompetitif di era transformasi digital dan krisis iklim global.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri

Strategi ini berfokus pada fasilitasi sertifikasi profesi dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata. *Tourism 5.0* akan diimplementasikan dalam kegiatan ini melalui penggunaan LMS yang menyediakan pelatihan secara digital dan interaktif, pemanfaatan teknologi digital untuk pelatihan keterampilan teknis, serta penguatan sertifikasi berbasis digital agar lebih adaptif terhadap transformasi industri pariwisata. Pelatihan mencakup penguatan keterampilan teknis, pelayanan prima, digitalisasi layanan pariwisata dalam pelayanan wisatawan. Sertifikasi dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui secara nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan/atau internasional, dengan sasaran utama tenaga kerja pada destinasi regeneratif dan prioritas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa para pelaku industri pariwisata memiliki kualifikasi dan profesionalisme yang sesuai dengan standar kompetensi nasional maupun internasional, sehingga mampu memberikan pelayanan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia.

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Strategi ini menargetkan pemberdayaan masyarakat lokal melalui berbagai bentuk pelatihan, yang mencakup aspek teknis seperti tata kelola *homestay*, pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas, pemanduan wisata, serta pelatihan kuliner lokal. *Tourism 5.0* akan diimplementasikan dalam kegiatan ini melalui penggunaan *platform* digital dan LMS untuk mendukung pelatihan secara *online* dan interaktif, serta penggunaan teknologi digital untuk simulasi pengelolaan *homestay* dan pemanduan wisata yang modern. Di samping itu, masyarakat juga dibekali pelatihan manajerial seperti kewirausahaan, digital *marketing*, dan pengelolaan keuangan usaha kecil dengan dukungan aplikasi yang mempermudah pengelolaan usaha secara digital. Pelatihan *soft skills* seperti komunikasi pelayanan, *hospitality*, dan kesadaran lingkungan pariwisata turut menjadi bagian dari kegiatan ini. Kegiatan ini difokuskan pada masyarakat yang tinggal di sekitar DPP dan DPR, dengan tujuan membangun kapasitas sosial-ekonomi masyarakat serta memastikan keterlibatan aktif mereka dalam rantai nilai pariwisata. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama yang berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis budaya lokal.

3. Pengembangan Manajemen Strategis

Strategi ini difokuskan pada penyusunan dan penyediaan rekomendasi kebijakan kepariwisataan yang berbasis riset empiris, kajian akademik, dan analisis data sektoral yang relevan. Implementasi *Tourism 5.0* akan diintegrasikan dalam kegiatan ini melalui pemanfaatan *platform* digital dan *big data analytics* untuk mendukung proses analisis, penyusunan rekomendasi, dan perumusan kebijakan secara lebih cepat, akurat, dan adaptif. Proses penyusunan rekomendasi melibatkan kerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan industri pariwisata melalui forum konsultasi dan dialog kebijakan. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup isu strategis seperti

pengelolaan destinasi, penguatan kelembagaan pariwisata, penerapan standar layanan pariwisata berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi digital. Seluruh dokumen kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung perumusan arah kebijakan sektoral yang responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan domestik, serta sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti yang memperkuat efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pariwisata nasional.

4. Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Internasional

Melalui strategi ini, Kementerian mendorong terbentuknya dan penguatan kerja sama internasional dalam bidang pariwisata melalui berbagai pendekatan strategis. Implementasi *Tourism 5.0* akan diintegrasikan dalam kegiatan ini melalui pemanfaatan *platform* digital kolaboratif dan teknologi untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara, termasuk pengelolaan dan pemantauan *real-time* pelaksanaan kerja sama. Bentuk kerja sama mencakup penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian bilateral dan multilateral, pelaksanaan program bersama antarpemerintah atau dengan organisasi internasional seperti UNWTO dan ASEAN, serta pengembangan inisiatif pariwisata lintas negara. Selain itu, pertukaran pengetahuan dilakukan melalui program magang, konferensi internasional, lokakarya lintas negara, dan pelatihan bersama. Implementasi proyek bersama meliputi program pengembangan destinasi lintas batas, promosi bersama antarnegara tujuan wisata, hingga kolaborasi riset dan inovasi pariwisata. Indikator keberhasilannya diukur melalui jumlah kerja sama formal yang berhasil disepakati serta tingkat keberhasilan implementasi program atau proyek yang telah dirancang bersama mitra internasional.

5. Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi

Fokus strategi ini adalah pelatihan teknis bidang kepariwisataan yang dirancang secara komprehensif untuk aparatur pemerintah, termasuk peningkatan kapasitas SDM aparatur dan jabatan fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan pendidikan vokasi, serta penyusunan dokumen penguatan kapasitas SDM aparatur dan fungsional. Implementasi *Tourism 5.0* akan diintegrasikan melalui penggunaan *platform* digital untuk mendukung pelatihan *online*, pembelajaran berbasis teknologi digital, serta sistem monitoring berbasis *big data*. Materi pelatihan meliputi topik seperti manajemen destinasi, pengelolaan risiko dan krisis pariwisata, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik pariwisata, serta strategi promosi dan pemasaran berbasis data. Kegiatan ini juga mencakup pembekalan terkait nilai-nilai pelayanan publik, integritas, dan inovasi birokrasi. Pelatihan dilaksanakan secara berjenjang dan berbasis kebutuhan daerah, bekerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur agar mampu mengelola sektor pariwisata secara profesional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan nasional dan global, serta mengembangkan talenta nasional.

6. Pengembangan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata

Sebagai bentuk investasi jangka panjang pada SDM Kementerian mengembangkan pendidikan vokasi bidang pariwisata di beberapa wilayah strategis dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan potensi unggulan destinasi yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Poltekpar yaitu Poltekpar Bali, Makassar, Medan, Palembang, Lombok, dan NHI Bandung.

Di Bali, fokus pengembangan diarahkan pada kampus vokasi yang mendukung integrasi kurikulum dengan praktik industri pariwisata berbasis budaya Hindu-Bali dan ekowisata. Di Makassar, pendidikan vokasi diperkuat untuk mengembangkan potensi wisata bahari dan budaya pesisir Sulawesi serta memperkuat kerja sama dengan industri pelayaran dan maritim. Di Medan, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas talenta untuk destinasi prioritas Danau Toba (*geopark*), dan kawasan Sumatera Utara yang memiliki kekayaan budaya Batak. Di Palembang, pendidikan vokasi diarahkan pada penguatan wisata olahraga, sejarah, dan budaya Melayu-Sriwijaya sebagai narasi destinasi unggulan. Di Lombok, kegiatan ini mendukung kesiapan SDM menghadapi pertumbuhan destinasi super prioritas Mandalika, termasuk penyediaan SDM *event* internasional dan PRM. Terakhir, di NHI Bandung, penguatan dilakukan untuk menjadikan institusi ini sebagai pusat unggulan pendidikan vokasi pariwisata nasional, termasuk adaptasi kurikulum berbasis standar internasional, digitalisasi pembelajaran, pengembangan program *dual degree*, kemitraan global untuk magang dan sertifikasi internasional, serta mendukung penguatan wisata kuliner.

Setiap subkegiatan mengintegrasikan penguatan infrastruktur pendidikan, pengembangan kapasitas pengajar, kemitraan industri, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan siap terjun ke industri pariwisata nasional maupun global. Implementasi *Tourism 5.0* juga akan diterapkan dalam pendidikan vokasi ini melalui pemanfaatan LMS dan pengembangan platform digital yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi modern dan keterampilan digital untuk mendukung kompetensi SDM pariwisata masa depan.

Arah Kebijakan 2: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Arah kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia. Penguatan arah kebijakan ini selaras dengan pendekatan *Tourism 5.0*, yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital dengan *big data analytics* untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan destinasi serta memperkaya pengalaman wisatawan. Hal ini sekaligus merupakan perwujudan nyata dari pengarusutamaan transformasi digital dalam pembangunan pariwisata nasional. Penguatan basis data menjadi rujukan dalam penentuan arah kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan prioritas pengembangan infrastruktur baik aksesibilitas dan amenitas untuk mewujudkan produk, atraksi yang berdaya saing dengan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata. Wisatawan akan mendapatkan pengalaman yang berkesan sehingga akan melakukan kunjungan kembali

(*repeater*) ke destinasi pariwisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Pendekatan ini juga mengutamakan kesiapan destinasi dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia di peringkat 20 (dua puluh) besar TTDI dunia.

Seluruh proses pengembangan destinasi pariwisata dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang menetapkan empat pilar utama: pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, keberlanjutan sosial-ekonomi, keberlanjutan pelestarian budaya, dan keberlanjutan pelestarian lingkungan. Pariwisata berkelanjutan diterapkan pada semua jenis destinasi dan semua aktivitas wisata agar pengelolaan dan pengembangan destinasi, dan wisatawan yang berkunjung lebih bertanggung jawab. Konsep ini tidak hanya ditujukan untuk pengelola destinasi seperti pemerintah, pihak swasta, atau kelompok masyarakat, pengelola kegiatan wisata tetapi juga bagi wisatawan untuk mengendalikan pengelolaan destinasi wisata. Sebagai paralel, implementasi Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan Tahun 2024 memastikan bahwa pembangunan destinasi khususnya di kawasan pedesaan, tidak hanya memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, namun juga telah memenuhi prinsip PUG, perlindungan kelompok rentan, dan aksesibilitas universal untuk semua kalangan.

Arah kebijakan ini mencerminkan pemenuhan 5 (lima) aspek utama pengarusutamaan pembangunan nasional, yaitu:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipasi kelompok perempuan dalam mendukung pengembangan destinasi.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan kontribusi signifikan terhadap SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab) dan SDG 14 (Ekosistem Laut), melalui pendekatan lintas sektor dan kolaboratif.
3. Transformasi Digital, melalui optimalisasi teknologi untuk sistem informasi destinasi *early warning system* berbasis data.
4. Pembangunan Rendah Karbon, dengan penerapan prinsip efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan material ramah lingkungan, dan transportasi rendah emisi di destinasi pariwisata.
5. Pembangunan Berketahanan Iklim, melalui zonasi berbasis risiko iklim, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana, serta konservasi ekosistem penyangga di kawasan rawan.

Lebih lanjut, arah kebijakan ini juga mengedepankan ketahanan sosial budaya, dengan pelestarian warisan budaya tak benda, praktik adat lokal, serta pemanfaatan narasi budaya sebagai diferensiasi destinasi pariwisata. Selain itu, terdapat komitmen pada pemerataan pembangunan wilayah, khususnya pada pedesaan, melalui pengembangan desa wisata.

Strategi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan diarahkan melalui pendekatan perencanaan yang menyeluruh, berbasis daya dukung lingkungan dan daya tampung wisatawan. Proses perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat lokal untuk memastikan keselarasan antara potensi sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, strategi ini menekankan

pentingnya penguatan peran aktif perempuan, pemuda, dan komunitas adat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi. Keterlibatan kelompok tersebut di sektor jasa wisata, kuliner lokal, kriya, konservasi lingkungan, serta pelestarian budaya bukan hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan daya tarik destinasi. Selain itu, pengembangan destinasi diarahkan pada produk unggulan yang sesuai dengan karakteristik dan keunikan wilayah, melalui pendekatan diferensiasi kawasan. Wilayah I (Sumatera–Jawa) difokuskan pada pengembangan destinasi berbasis budaya, sejarah, dan kota warisan, mengingat tingginya potensi pasar domestik dan konektivitas antar wilayah. Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari, ekowisata, dan petualangan, dengan mengedepankan kekayaan biodiversitas, bentang alam khas, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Strategi ini menjadi landasan penting dalam merancang destinasi yang tidak hanya menarik secara komersial, tetapi juga tangguh secara ekologis dan inklusif secara sosial, sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi kini dan yang akan datang.

Selain itu, kawasan otoritatif seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo diperkuat melalui pembentukan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, yang memiliki mandat untuk merancang dan mengelola destinasi secara terintegrasi, meliputi perencanaan ruang, pengelolaan aset, penyusunan model bisnis, dan skema investasi berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan ekologis, setiap intervensi pembangunan destinasi diwajibkan untuk mengarusutamakan perlindungan keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan konservasi spesies endemik, perlindungan ekosistem darat dan laut, serta pemanfaatan sumber daya hayati secara lestari. Hal ini selaras dengan kerangka kerja IBSAP dan prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Dengan penguatan dimensi digital, sosial, ekologis, budaya, dan tata kelola, arah kebijakan ini tidak hanya mendorong daya saing dan nilai tambah sektor pariwisata, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia yang inklusif, tangguh terhadap krisis, berkeadilan sosial, dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:

1. Perancangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan ini difokuskan pada fasilitasi penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan, mitigasi risiko destinasi pariwisata, pendampingan pengembangan kawasan destinasi pariwisata prioritas bidang perancangan destinasi, indeks pengembangan kepariwisataan nasional, indeks daya saing kepariwisataan, serta rencana induk destinasi pariwisata.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, ruang lingkup aktivitas pada setiap kegiatan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan,

analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan destinasi pariwisata.

Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dilakukan melalui fasilitasi pendampingan dan sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan dan memfasilitasi desa wisata/destinasi wisata yang telah menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan ke tingkat internasional. Mitigasi risiko destinasi pariwisata dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan keamanan wisatawan serta keberlanjutan destinasi. Koordinasi indeks pembangunan kepariwisataan nasional bertujuan mengharmonisasikan pengukuran kinerja kepariwisataan di tingkat pusat dan daerah. Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) adalah strategi yang dirancang untuk mengelola peringkat Pembangunan kepariwisataan Indonesia pada TTDI di tingkat global.

Prioritas nasional untuk menyelesaikan pembangunan pada 10 (sepuluh) DPP dan 3 (tiga) DPR dipandu dengan penyusunan rencana induk destinasi pariwisata dan koordinasi implementasi rencana aksi. Seluruh ruang intervensi dimaksud akan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital.

2. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

Kegiatan ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata secara inklusif melalui pengelolaan destinasi yang partisipatif dan berkelanjutan. Masyarakat didorong menjadi pelaku utama pembangunan pariwisata, bukan hanya objek. Berbagai intervensi dirancang untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian mereka, antara lain penyusunan *database* sebagai dasar perencanaan kebijakan dan program intervensi, pendampingan pengelola desa wisata, program kemitraan desa wisata dengan mitra strategis, dan pemberian penghargaan.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, bantuan peralatan usaha diberikan, mencakup bantuan pemerintah untuk memperkuat fungsi pengelola desa wisata, kuliner lokal, kerajinan tangan, dan transportasi wisata berbasis komunitas. Selain itu, penguatan kelembagaan dilakukan melalui fasilitasi pembentukan koperasi wisata, penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pendampingan kelembagaan ekonomi lokal. Inklusivitas menjadi prinsip utama, dengan pendekatan afirmatif bagi kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan pemuda yang belum bekerja, agar mereka dapat terlibat aktif dalam rantai nilai destinasi dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

Program ini menekankan prinsip keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan, memastikan pengembangan destinasi pariwisata memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Pengembangan Produk Pariwisata

Salah satu upaya utama mewujudkan pengembangan produk pariwisata yang atraktif adalah memastikan kesiapan destinasi wisata sesuai dengan identitas destinasinya, kemudian merangkai destinasi

wisata secara terintegrasi, dan mencitrakan secara komprehensif kepada calon wisatawan. Pola perjalanan menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut sehingga pengembangan destinasi pariwisata dapat tersampaikan secara tepat dan komprehensif. Pengembangan ini berfokus pada penciptaan dan diversifikasi produk pariwisata yang inovatif dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan pengalaman yang unik kepada wisatawan yang akan berdampak pada lama tinggal, tingkat pengeluaran dan potensi kunjungan ulang (*repeater*). RPJMN Tahun 2025-2029 mengamanatkan salah satu bentuk strategi penyelenggaraan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan adalah diversifikasi produk pariwisata, diantaranya difokuskan pada *marine*, *gastronomy* dan *wellness*, namun tetap membuka peluang kepada pola perjalanan tematik lainnya, seperti kebudayaan dan *geopark*. Penyusunan pola perjalanan juga akan dilengkapi dengan interpretasi berupa narasi dan *storytelling* untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap destinasi pariwisata.

4. Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I

Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait dalam lingkup Wilayah Sumatera dan Jawa, terutama terkait dengan DPP Danau Toba, Bangka Belitung, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bromo-Tengger-Semeru, serta Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau dan Destinasi Regeneratif *Greater Jakarta* merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029. Akselerasi Pengembangan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas dilakukan melalui bimbingan teknis dan pendampingan, fasilitasi dukungan sarana di destinasi pariwisata, koordinasi penyelesaian isu destinasi dalam kaitannya dengan amenities dan aksesibilitas, serta upaya digitalisasi informasi 3A yang disinergikan dengan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional sebagai perwujudan dukungan implementasi *Tourism 5.0*. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daya tarik wisata dalam pengembangan amenities dan aksesibilitas, serta untuk menjawab permasalahan konektivitas destinasi.

5. Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II

Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait dalam lingkup Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, terutama terkait dengan DPP Lombok-Gili Tramen, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat, serta Destinasi Regeneratif Bali merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029. Akselerasi Pengembangan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas dilakukan melalui bimbingan teknis dan pendampingan, fasilitasi dukungan sarana di destinasi pariwisata, koordinasi penyelesaian isu destinasi dalam kaitannya dengan amenities dan aksesibilitas, serta upaya digitalisasi informasi 3A yang disinergikan dengan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional sebagai perwujudan dukungan implementasi *Tourism 5.0*. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daya tarik wisata dalam pengembangan amenities dan aksesibilitas, serta untuk menjawab permasalahan konektivitas destinasi.

6. Pengelolaan Kawasan Otorita Pariwisata

Sasaran ini menekankan pengelolaan kawasan otorita pariwisata yang berada di bawah kewenangan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, yaitu Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Fokus pengelolaan diarahkan pada peningkatan efektivitas tata kelola destinasi melalui pendekatan zonasi kawasan, penguatan fungsi kelembagaan, dan penyelarasan investasi dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Indikator yang digunakan mencakup peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, jumlah pelaku usaha pariwisata yang memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan kawasan, serta peningkatan kualitas layanan, amenitas, dan infrastruktur yang berbasis prinsip keberlanjutan. Selain itu, pengukuran kinerja juga mencakup efektivitas koordinasi lintas sektor, implementasi rencana induk kawasan otoritatif, serta tingkat keterlibatan masyarakat dan investor dalam pengembangan kawasan. Sasaran ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan model replikasi pengelolaan destinasi unggulan nasional berbasis otoritatif.

Arah Kebijakan 3: Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata yang Berkualitas

Arah kebijakan ini diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan (SS 1), khususnya pada indikator rasio PDB sektor pariwisata. Fokus utama dari arah kebijakan ini adalah mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan industri pariwisata secara berkelanjutan dan berkualitas melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberdayaan pelaku usaha secara menyeluruh, dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir.

Implementasi *Tourism 5.0* memperkuat arah kebijakan ini melalui digitalisasi sistem investasi berbasis AI, pemanfaatan *big data analytics* untuk pemetaan potensi investasi, hingga pengembangan *platform matchmaking* antara investor dan pelaku usaha pariwisata. Inovasi ini difokuskan pada pengembangan DPP dan DPR sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru berbasis pariwisata.

Kebijakan ini juga secara sistematis mengintegrasikan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan nasional, yaitu:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial: Melalui fasilitasi akses pembiayaan dan pendampingan usaha kepada perempuan pelaku UMKM pariwisata, kelompok rentan, serta pelaku usaha dari wilayah tertinggal. Kegiatan penguatan kapasitas dan sertifikasi juga diarahkan agar sensitif terhadap kebutuhan pelaku usaha perempuan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan dan program afirmatif ekonomi inklusif.
2. Pengarusutamaan SDGs: Arah kebijakan ini berkontribusi terhadap SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dengan pendekatan kolaboratif antarpemerintah, swasta, dan masyarakat.
3. Transformasi Digital: Proses investasi dan penguatan industri dipercepat melalui sistem digital berbasis AI untuk perizinan usaha, pendaftaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata, serta sistem informasi industri berbasis lokasi. Teknologi juga digunakan dalam

- tracking* kepatuhan usaha terhadap standar berkelanjutan dan pelaporan berbasis daring.
4. Pembangunan Rendah Karbon: Melalui pengembangan industri pariwisata hijau, penguatan efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, pengelolaan limbah usaha, serta penerapan ekonomi sirkular dalam rantai nilai pariwisata. Sertifikasi usaha pariwisata diarahkan pada standar *low-carbon tourism*.
 5. Pembangunan Berketahanan Iklim: Investasi diarahkan untuk mendorong resiliensi industri terhadap perubahan iklim, termasuk dukungan terhadap usaha yang menerapkan praktik konservasi, efisiensi sumber daya alam, serta beroperasi di kawasan rentan ekologi dengan adaptasi berbasis komunitas.

Kebijakan ini dioperasionalisasikan melalui 5 (lima) fokus utama kegiatan. Pertama, Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, untuk menjamin kualitas layanan, keamanan konsumen, dan keberlanjutan usaha, dengan mengadopsi standar internasional dan integrasi aspek ramah lingkungan dan ramah sosial ke dalam proses sertifikasi. Kedua, Peningkatan Kapasitas Manajemen Industri yang difokuskan pada pelaku usaha mikro hingga menengah, termasuk agregator, dengan dukungan pelatihan tata kelola, transformasi digital, mitigasi risiko usaha, dan sistem rantai pasok yang adil dan efisien. Pendekatan *supply meet demand* mendorong kelokalan dan daya saing komunitas lokal dalam rantai bisnis nasional.

Ketiga, Manajemen Investasi Pariwisata. Meliputi penyusunan strategi dan rekomendasi kebijakan investasi, promosi investasi pariwisata dan peningkatan jejaring, pendampingan dan advokasi badan usaha untuk peningkatan realisasi investasi, pendampingan investasi di KEK Pariwisata, hingga pendampingan perizinan berusaha. Keempat, Pengembangan Usaha Pariwisata Berkelanjutan, yakni Inisiatif hijau diperkuat dengan pelatihan teknis, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha berkelanjutan, dan penilaian kinerja keberlanjutan usaha secara berkala. Upaya ini selaras dengan komitmen global terhadap ekonomi sirkular dan transisi energi bersih. Terakhir, Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan guna meningkatkan daya saing usaha pariwisata agar dapat memperluas akses pasar dan layak mendapatkan akses pembiayaan dan permodalan. Melalui peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar dan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan inovatif seperti KUR pariwisata, *blended finance*, dana usaha pemula, dan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan koperasi, agar pembiayaan usaha menjadi lebih inklusif, terutama bagi perempuan dan pelaku usaha desa wisata.

Dalam seluruh inisiatif ini, perhatian terhadap keanekaragaman hayati menjadi elemen penting. Investasi diarahkan untuk tidak merusak ekosistem lokal dan justru memperkuat konservasi spesies endemik, lanskap alami, serta pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati. Hal ini selaras dengan IBSAP dan prinsip pembangunan hijau sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Pendekatan “ekonomi berbasis alam” digunakan sebagai acuan investasi hijau dan regeneratif di kawasan konservasi dan destinasi ekowisata.

Dengan pendekatan komprehensif ini, arah kebijakan ini diharapkan mampu memperluas basis industri pariwisata nasional, mempercepat arus investasi yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta menciptakan

ekosistem usaha pariwisata yang inklusif, adaptif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

1. Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha

Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas usaha pariwisata melalui penguatan sistem standardisasi dan sertifikasi yang menyeluruh, sesuai dengan regulasi nasional dan persyaratan internasional. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital, *big data analytics* yang mempermudah proses sertifikasi, audit, dan pemantauan status usaha secara *real time*. Proses standardisasi meliputi pengembangan perangkat panduan teknis dan indikator mutu layanan pariwisata, pelatihan penerapan standar berbasis risiko, serta peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan standar berbasis risiko.

2. Pengembangan Manajemen Industri

Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem dan daya saing industri pariwisata melalui penguatan pendataan, regulasi, kemitraan, dan ketahanan industri nasional, dengan fokus utama pada pelaku industri pariwisata di wilayah destinasi prioritas dan regeneratif. Dalam mendukung ekosistem industri yang adaptif dan inklusif, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berbasis pelatihan teknis dan manajerial, tetapi juga didukung oleh pemanfaatan teknologi cerdas melalui kerangka *Tourism 5.0*.

Melalui platform digital dan *big data analytics*, dilakukan pemetaan kebutuhan pelatihan, simulasi pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR), serta pelatihan daring untuk peningkatan kapasitas industri pariwisata. Topik pelatihan mencakup manajemen operasional industri, pencatatan keuangan UMKM, strategi pemasaran digital berbasis media sosial, serta pelatihan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata.

Program pendataan dengan mengembangkan sistem *database* industri pariwisata yang terintegrasi antara pusat, daerah, dan asosiasi pelaku industri yang meliputi data jenis usaha, kapasitas, sebaran pelaku usaha, hingga indikator performa usaha. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis data, evaluasi dampak secara berkala, dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Sejalan dengan program pendataan, juga diperlukan penguatan regulasi industri pariwisata termasuk penyelarasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor pariwisata yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait perizinan, penghitungan statistik, dan kebijakan/dampak ekonomi.

Dalam aspek kemitraan industri, perlu didorong kemitraan inklusif antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta kerja sama lintas sektor termasuk dengan asosiasi industri, perguruan tinggi, dan komunitas lokal. Dalam hal kaitannya dengan program kemitraan industri dapat disertai dengan pengembangan agregator bisnis pariwisata untuk mendorong rantai pasok kelokalan serta menjembatani rantai bisnis pariwisata.

Untuk mendukung penguatan ketahanan industri pariwisata dengan meningkatkan kapasitas manajerial dan literasi digital pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan tematik dan dukungan platform teknologi (*Tourism 5.0*). Selain itu, dengan mendorong pelaku usaha pariwisata, khususnya UMKM, untuk meminimalkan risiko kerugian, mempercepat proses pemulihan usaha, serta menjaga kepercayaan pasar dan konsumen dengan penyusunan dan penerapan *Business Continuity Plan* (BCP).

3. Peningkatan Manajemen Investasi

Fokus kegiatan ini adalah mendorong percepatan realisasi investasi pariwisata dengan memperkuat sistem perencanaan, promosi dan peningkatan jejaring investasi pariwisata, serta fasilitasi investasi yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Langkah awal dilakukan melalui penyusunan katalog peluang investasi pariwisata berbasis wilayah dan produk wisata, mencakup akomodasi, atraksi, transportasi wisata, kawasan ekonomi khusus, dan amenitas lainnya. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah, tren pasar global, serta kebutuhan pembangunan destinasi regeneratif dan prioritas. Implementasi *Tourism 5.0* diharapkan dapat mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk pemetaan potensi investasi, *big data analytics* untuk analisis tren pasar dan simulasi investasi, serta AR/VR untuk presentasi peluang investasi secara imersif kepada calon investor.

Kegiatan ini juga mencakup pelatihan intensif bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha mengenai strategi *business matching*, pengembangan *pitch deck*, serta teknik presentasi proyek di hadapan investor domestik dan internasional. Untuk mendukung kelayakan proyek, dilakukan penyusunan dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) dan analisis dampak lingkungan secara partisipatif.

Fasilitasi layanan investasi pariwisata selain di pusat, dilakukan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota prioritas, yang berfungsi sebagai hub promosi, fasilitasi izin usaha, penyediaan data dan informasi investasi, serta ruang konsultasi bagi investor. Kegiatan ini diperkuat dengan sistem digital nasional yang terhubung dengan *Online Single Submission* (OSS) dan platform investasi daerah. Selain itu, dilakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk harmonisasi perizinan, sinkronisasi tata ruang, serta penyusunan dan pemberlakuan insentif fiskal dan nonfiskal guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor pariwisata.

4. Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan

Kegiatan ini mengarahkan transformasi industri pariwisata menuju praktik yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial. Fokus utama diarahkan pada penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program yang mendorong adopsi praktik industri hijau di seluruh rantai nilai pariwisata. Intervensi utama meliputi pengembangan dan insentif untuk hotel hijau (*green hotel*), pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden tentang Indonesia *Quality Tourism Fund* (IQTF), pengurangan *Food Loss and Waste* (FLW) pada sektor pariwisata, serta manajemen sampah berbasis prinsip 3R

(*Reduce, Reuse, Recycle*). *Tourism 5.0* akan memperkuat kegiatan ini dengan pemanfaatan platform digital melalui *Online Single Portal* (OSP) Dekarbonasi sektor pariwisata untuk memperkuat konektivitas antara pemerintah dan industri, memberikan transparansi dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan rendah emisi. Melalui portal ini, setiap langkah dalam pengurangan emisi karbon dapat dicatat dan diverifikasi secara terukur. Hal ini menjadi bagian dari komitmen sektor pariwisata untuk mendukung target penurunan karbon nasional menuju *Net Zero Emission* yang juga merupakan komitmen Kementerian melalui penandatanganan *Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism*.

Kegiatan ini juga mendorong penerapan prinsip *circular economy* dengan mengintegrasikan usaha lokal berbasis bahan baku ramah lingkungan ke dalam rantai pasok destinasi, seperti penggunaan produk kerajinan dari bahan daur ulang, kemasan makanan ramah lingkungan, dan pemanfaatan kembali limbah organik untuk kompos destinasi hijau. Implementasi *Tourism 5.0* akan memperkuat kegiatan ini dengan memanfaatkan platform digital berbasis AI, *big data analytics*, serta AR/VR untuk mendukung pelatihan teknis, simulasi proses produksi hijau, dan pemantauan rantai pasok secara digital dan real-time. Program pelatihan dan pendampingan teknis diberikan kepada pelaku industri terkait penerapan standar keberlanjutan, perhitungan jejak karbon, dan pelaporan *Environmental, Social, Governance* (ESG).

Selain itu, kegiatan ini mencakup pengembangan sistem insentif non-fiskal untuk pelaku industri yang telah menerapkan standar keberlanjutan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional, serta integrasi dengan skema promosi destinasi ramah lingkungan. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini dengan penggunaan platform digital berbasis AI, *big data analytics*, dan AR/VR untuk mempercepat verifikasi standar keberlanjutan, mendukung audit digital, dan memperkuat pemantauan secara *real-time*. Seluruh inisiatif ini bertujuan menciptakan ekosistem industri pariwisata yang rendah emisi, efisien sumber daya, inklusif, dan resilien terhadap dampak perubahan iklim.

5. Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan

Industri pariwisata modern menuntut inovasi berkelanjutan, di mana wisatawan mencari pengalaman yang lebih mendalam, autentik, dan bermakna. Oleh karena itu, pengembangan akses pasar dan produk pariwisata menjadi krusial. Pengembangan akses pasar melibatkan peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha pariwisata, sementara pengembangan produk pariwisata berfokus pada penciptaan tawaran wisata yang unik, menarik, dan berkelanjutan. Produk wisata berkualitas tinggi akan menjadi pembeda bagi Indonesia di kancah global dan menarik segmen wisatawan yang lebih spesifik. Untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin spesifik, pengembangan produk wisata dapat diarahkan pada segmen yang menjanjikan seperti *gastronomy tourism* dan *wellness tourism*. Dengan fokus pada kebutuhan dan minat wisatawan, serta didukung oleh permodalan yang kuat, produk wisata yang unik dan bernilai tambah dapat diciptakan.

Dalam rangka memfasilitasi akses pasar dan akses permodalan kepada pelaku usaha pariwisata, yang sangat esensial untuk memungkinkan

mereka berinovasi dan mengembangkan produk wisata yang unik serta berkelanjutan sesuai tuntutan pasar modern, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan melaksanakan program *Wonderful Indonesia Scale-up Hub* (WISH). Melalui program ini pelaku usaha pariwisata mendapatkan pendampingan untuk peningkatan kapasitas dan jejaring, serta dipertemukan dengan sumber-sumber pembiayaan yang krusial untuk pengembangan dan ekspansi usaha mereka.

Adapun tujuan Program WISH adalah:

- a. Memperoleh data mengenai pemetaan portofolio produk pariwisata utamanya gastronomi dan *wellness*, potensi diversifikasi, pasar, serta para pemangku kepentingan yang terlibat.
- b. Memperbanyak produk pariwisata dengan menyesuaikan berbagai minat pasar dan potensi destinasi wisata, yang dikembangkan secara inovatif dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan akses usaha pariwisata terhadap sumber-sumber permodalan, baik dari lembaga keuangan maupun non keuangan.
- d. Meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha pariwisata melalui pelatihan, pendampingan dan fasilitas lainnya.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Program WISH terdiri dari serangkaian kegiatan seperti: pemetaan, peningkatan kapasitas, temu bisnis, dan pemantauan dan evaluasi. Pemetaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi komprehensif mengenai karakteristik produk dan usaha yang akan dikembangkan, skala usaha, pangsa pasar, jenis dukungan yang dibutuhkan, serta jenis sumber permodalan ideal yang akan dipertemukan, serta para pemangku kepentingan yang dapat dilibatkan. Hanya usaha pariwisata yang telah memenuhi kualifikasi yang dapat mendaftar pada program Akselerator Bisnis Pariwisata Indonesia. Peningkatan kapasitas meliputi program inkubasi yang melibatkan pemerintah, praktisi/*expert*, investor, dan media. Temu bisnis merupakan forum pertemuan antara pelaku usaha pariwisata dengan calon investor, mitra dan lembaga keuangan bank maupun non-bank. Dalam temu bisnis ini diharapkan pelaku usaha pariwisata berhasil memperoleh akses permodalan, baik dari lembaga keuangan konvensional maupun lembaga permodalan alternatif lainnya seperti *crowdfunding*, modal ventura, maupun *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Adapun monitoring evaluasi meliputi pemantauan proses *due-diligence* dalam pendudukan program mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa pelaksanaan telah memenuhi standar yang ditetapkan dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semua proses dan hasil dari program ini kemudian akan dipublikasikan pada kanal digital, sebagai promosi produk, badan usaha, mitra, sponsor, dan investor, serta menjadi sumber informasi bagi usaha pariwisata yang ingin mengembangkan produk maupun permodalan.

Arah Kebijakan 4: Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Berkualitas

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata (SS 1), khususnya melalui indikator devisa pariwisata, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan

jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memperkuat daya saing citra pariwisata Indonesia di pasar global dan domestik melalui strategi promosi yang terintegrasi, inovatif, dan inklusif. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara dengan tujuan utama *leisure/rekreasi*.

Pengembangan pasar dan pemasaran dilakukan dengan pendekatan berbasis segmentasi wilayah strategis. Mancanegara I terdiri dari kawasan ASEAN, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Mancanegara II terdiri dari kawasan Asia Timur, Australia, dan Oceania. Mancanegara III mencakup kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika. Sedangkan kawasan Nusantara merupakan tulang punggung volume kunjungan wisatawan nusantara.

Strategi komunikasi pemasaran difokuskan pada pemanfaatan kanal digital dan teknologi berbasis AI, kampanye promosi tematik dan berbasis narasi lokal melalui *storytelling*, penggunaan AR/VR untuk konten promosi imersif, serta kemitraan strategis dengan media global, pelaku industri, dan komunitas diaspora.

Pendekatan *Tourism 5.0* mendukung kebijakan ini dengan mengintegrasikan *big data analytics* untuk menganalisis perilaku pasar secara *real time*, serta pengembangan *AI travel assistant* untuk memperkuat pengalaman digital wisatawan sejak tahap pencarian hingga pascaperjalanan.

Kebijakan ini mencerminkan implementasi dari 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan nasional:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial: Narasi promosi dirancang secara inklusif, menampilkan peran aktif perempuan, komunitas lokal, dan kelompok marginal dalam pariwisata. Kampanye promosi domestik juga mendorong pariwisata yang aman, inklusif, dan ramah kelompok rentan. Pelibatan komunitas dan UMKM lokal dalam penyusunan konten kampanye menjadi bagian integral.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Promosi destinasi diarahkan untuk mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), melalui promosi destinasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis komunitas.
3. Transformasi Digital: Dengan penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam perencanaan kampanye, segmentasi pasar, serta desain dan distribusi konten promosi. Sistem CRM (*Customer Relationship Management*) dan platform pemasaran destinasi dikembangkan secara cerdas, responsif, dan personal.
4. Pembangunan Rendah Karbon: Kampanye promosi mengedepankan destinasi yang menerapkan prinsip pariwisata hijau dan rendah emisi, seperti ekowisata, wisata alam, dan wisata berbasis transportasi ramah lingkungan. Strategi pemasaran digital juga mengurangi jejak karbon dari promosi konvensional.
5. Pembangunan Berketahanan Iklim: Komunikasi destinasi dirancang untuk meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap isu perubahan iklim dan pentingnya kunjungan yang bertanggung jawab. Destinasi yang rawan dampak iklim dipromosikan dengan narasi kesiapsiagaan, adaptasi, dan konservasi.

Selanjutnya, pengembangan merek nasional “*Wonderful Indonesia*” diorientasikan ulang agar relevan dengan generasi muda dan pasar minat

khusus. Citra Indonesia sebagai destinasi budaya, alam, dan berkelanjutan dikuatkan melalui kampanye untuk segmen: *ecotourism*, *adventure tourism*, *spiritual & wellness*, *sport tourism*, *luxury*, dan *art tourism*. Untuk mendukung hal ini, strategi promosi difokuskan pada Penguatan destinasi prioritas, terutama berbasis DPP, DPR, bahari, dan danau, partisipasi aktif dalam bursa pariwisata internasional, promosi lintas batas (*cross-border promotion*) di kawasan perbatasan, serta penguatan jaringan diplomasi pariwisata melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, diaspora, dan lembaga multilateral.

Di sisi domestik, pemasaran pariwisata nusantara ditujukan untuk memperluas distribusi kunjungan wisatawan ke destinasi di luar Bali dan Jakarta, dengan penekanan pada: destinasi budaya, kuliner, dan ekowisata, kampanye nasional berbasis komunitas dan partisipasi lokal, serta Integrasi promosi dengan platform digital transportasi, akomodasi, dan *marketplace* pariwisata.

Isu keanekaragaman hayati juga diarusutamakan dalam strategi promosi. Konten promosi dirancang untuk meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap flora-fauna endemik, ekosistem laut dan darat, serta konservasi situs warisan dunia. Kampanye seperti "*Travel Responsibly*", "*Nature is Not a Backdrop*", atau "*Support Biodiversity Through Tourism*" menjadi bagian dari komunikasi global Indonesia sebagai destinasi hijau dan bertanggung jawab.

Dengan pendekatan ini, arah kebijakan diharapkan mampu menumbuhkan permintaan terhadap pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, memperluas jangkauan pasar secara strategis dan inklusif, memperpanjang lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, serta menghasilkan dampak ekonomi langsung yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

1. Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata

Kegiatan ini mencakup penyusunan peta jalan strategi komunikasi jangka menengah dan panjang yang memuat target *audiens*, *media planning*, dan pengukuran kinerja kampanye. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini dengan penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara *real-time*, AR/VR untuk simulasi kampanye, serta *big data analytics* untuk evaluasi kinerja kampanye secara lebih akurat. Pemetaan karakter audiens dilakukan secara segmentatif berdasarkan preferensi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku digital, termasuk identifikasi pasar generasi muda (gen z dan milenial), keluarga muda, serta wisatawan minat khusus seperti ekowisata dan pekerja jarak jauh (*digital nomads*).

Pengembangan pesan-pesan kampanye nasional dan global diselaraskan dengan diferensiasi tiap destinasi, serta menyasar elemen emosional dan aspiratif seperti kebanggaan budaya, petualangan alam, dan pengalaman otentik. Implementasi *Tourism 5.0* akan memperkuat kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk mendukung personalisasi konten, *big data analytics* untuk menganalisis preferensi wisatawan, serta AR/VR untuk menciptakan konten promosi yang imersif dan interaktif. Implementasi dilakukan melalui kampanye lintas kanal yang terintegrasi antara media konvensional (televisi, media cetak, dan iklan luar ruang), pemasaran digital (optimalisasi mesin

pencari, media sosial, dan iklan digital), serta strategi *experiential marketing* melalui kegiatan seperti promosi destinasi, instalasi seni interaktif, dan pengalaman promosi berbasis ruang publik.

Kegiatan ini juga mencakup aktivasi merek pariwisata nasional pada berbagai platform media hiburan dan distribusi digital berskala global, penayangan *spot* promosi pada maskapai internasional, serta kolaborasi dengan tokoh inspiratif, pembuat konten lintas negara, jurnalis perjalanan, dan komunitas diaspora Indonesia untuk memperkuat narasi destinasi. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten, AR/VR untuk produksi konten promosi yang imersif dan interaktif, serta *big data analytics* untuk analisis tren audiens secara *real time*. Produksi konten dilakukan dalam berbagai format video pendek, dokumenter berseri, cerita audio, dan media interaktif, dengan menonjolkan kekayaan budaya, keberagaman manusia, dan keindahan lanskap Indonesia.

Seluruh strategi komunikasi ini diintegrasikan dalam sistem pemantauan dan analitik berbasis data untuk mengevaluasi dampak kampanye secara langsung, memperkuat identitas visual, serta meningkatkan posisi destinasi Indonesia dalam kompetisi pasar global.

2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I

Kegiatan ini menasar pasar Asia Tengah, dan Asia Selatan serta kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang memiliki kedekatan geografis dan budaya, frekuensi perjalanan yang tinggi, serta minat terhadap pengalaman wisata yang praktis dan beragam. Strategi pemasaran difokuskan pada integrasi promosi digital lintas kanal dengan kegiatan tatap muka berbasis komunitas dan industri.

Pendekatan utama dalam kegiatan ini mencakup penyelenggaraan kampanye promosi lintas batas melalui media digital, peluncuran konten video pendek yang mengangkat daya tarik destinasi prioritas, serta aktivasi sosial media dalam bahasa lokal untuk meningkatkan relevansi pesan. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui pemanfaatan platform digital berbasis AI, *big data analytics*, dan AR/VR untuk mendukung analisis audiens, pembuatan konten interaktif yang lebih imersif, serta pemantauan kinerja kampanye secara *real-time*. Selain itu, dilakukan penyelenggaraan *roadshow* pariwisata di kota-kota besar di kawasan Asia Tengah, dan Asia Selatan serta kawasan Asia Tenggara (ASEAN), yang mencakup *business matching*, *showcase* budaya, dan penawaran langsung dari pelaku usaha Indonesia.

Kegiatan juga mencakup penyusunan materi promosi dan katalog wisata dalam bahasa negara sasaran, dengan penekanan pada tema wisata minat khusus seperti wisata kuliner, belanja, golf, serta wisata keluarga dan generasi muda. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten promosi, AR/VR untuk simulasi destinasi secara imersif, dan *big data analytics* untuk evaluasi preferensi pasar secara *real-time*. Program kolaborasi promosi bersama agen perjalanan regional dan asosiasi pariwisata setempat ditingkatkan untuk mendorong penjualan langsung paket wisata unggulan. Selain itu,

disiapkan skema insentif kunjungan bagi operator tur dan maskapai untuk memfasilitasi peningkatan jumlah penerbangan dan frekuensi perjalanan ke DPP dan DPR di Indonesia. Evaluasi efektivitas dilakukan melalui pemantauan indikator digital dan survei persepsi pasar.

3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara II

Kegiatan ini menargetkan pasar Asia Timur, Australia, dan Oceania, yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam kunjungan ke Indonesia dan memiliki karakteristik wisatawan yang beragam, mulai dari preferensi terhadap PRM, budaya, alam tropis, hingga produk wisata keluarga dan kelas menengah.

Strategi utama kegiatan ini mencakup promosi pariwisata melalui pendekatan berbasis komunitas diaspora Indonesia, kerja sama dengan asosiasi bisnis dan kamar dagang di luar negeri, serta pelibatan aktif pelajar dan pekerja migran dalam kampanye destinasi. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui pemanfaatan platform digital berbasis AI untuk analisis pasar, AR/VR untuk simulasi destinasi, dan *big data analytics* untuk pemantauan kinerja kampanye secara *real-time*. Pendekatan ini diperkuat dengan penyelenggaraan forum promosi pariwisata dalam misi dagang dan diplomasi ekonomi di negara-negara sasaran. Selain itu, kegiatan ini mencakup aktivasi media sosial dan konten kreatif berbahasa mandarin, Jepang, Korea dan Inggris untuk menjangkau audiens spesifik.

Strategi juga dikembangkan melalui kerjasama dengan agen perjalanan dan operator tur terkemuka dalam mengemas produk wisata bahari, petualangan, dan budaya. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara *real-time*, AR/VR untuk simulasi destinasi yang lebih imersif, dan *big data analytics* untuk pemantauan preferensi pasar secara mendalam. Konten promosi dikembangkan dalam format naratif dan visual yang relevan dengan selera pasar, dan disalurkan melalui kanal digital serta kegiatan tatap muka seperti pameran wisata, *roadshow*, dan *famtrip*. Semua strategi didukung oleh sistem evaluasi berbasis indikator performa pemasaran digital, *feedback* pasar, dan konversi pemesanan ke destinasi prioritas Indonesia. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi katalog promosi, AR/VR untuk simulasi destinasi PRM secara interaktif, dan *big data analytics* untuk analisis tren wisatawan muslim dan evaluasi kinerja kampanye dan analisis preferensi pasar secara mendalam.

4. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara III

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara III menargetkan kegiatan ini diarahkan ke pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika, yang dikenal memiliki potensi pengeluaran wisatawan yang tinggi, lama tinggal lebih panjang, serta ketertarikan kuat terhadap wisata berbasis budaya, alam, dan pengalaman lokal yang autentik.

Untuk sebagai upaya dalam mengoptimalkan memaksimalkan penetrasi pasar, strategi yang diterapkan meliputi partisipasi aktif dalam bursa pariwisata internasional seperti *Internationale Tourismus-*

Börse (ITB) di Berlin dan *World Travel Market* (WTM) di London, penyelenggaraan *business matching forum*, Kerja Sama Terpadu (KST), dan perjalanan wisata pengenalan (*familiarization trip*) bagi pelaku bisnis pariwisata, operator tur dan media asing, serta penyusunan materi promosi dalam bahasa lokal dengan pendekatan *storytelling* berbasis destinasi unggulan.

Dalam rangka diversifikasi produk pariwisata dan menjangkau segmen wisatawan dengan ketertarikan spesifik yang cenderung memiliki tingkat pengeluaran lebih tinggi dan lama tinggal lebih panjang, dilakukan penguatan promosi pada segmentasi pariwisata minat khusus.

Sebagai negara dengan potensi wisata ramah muslim berkelas dunia, promosi destinasi PRM turut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dari negara dengan mayoritas muslim. Melalui penyusunan dan penyebaran katalog produk ramah muslim yang menonjolkan akomodasi bersertifikasi halal, fasilitas ibadah di destinasi, serta pilihan kuliner halal. Kampanye digital juga diperkuat melalui peluncuran *microsite* destinasi tematik yang terintegrasi dengan portal nasional pariwisata, penayangan konten kreatif (video sinematik, serial dokumenter pendek) di kanal digital terkurasi, serta aktivasi media sosial yang menyasar wisatawan berprofil *explorer* dan *cultural enthusiast*. Implementasi *Tourism 5.0* akan memperkuat kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara *real-time*, AR/VR untuk simulasi destinasi secara imersif, serta *big data analytics* untuk evaluasi kinerja kampanye dan analisis preferensi pasar secara mendalam, serta analisis tren wisatawan muslim. Selain itu, dilakukan kemitraan strategis dengan maskapai penerbangan internasional dan konsorsium tur *outbound* di negara-negara target untuk memasarkan paket wisata tematik berbasis danau dan bahari, seperti tur arkeokultural di kawasan Danau Toba dan wisata kapal pinisi di Labuan Bajo.

Kampanye promosi lintas musiman (*seasonal campaign*) juga digulirkan untuk mengantisipasi siklus perjalanan liburan di wilayah Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika. Seluruh kegiatan ditopang oleh sistem pemantauan kinerja berbasis indikator digital (*engagement rate*, *click-through-rate*, *conversion* ke pemesanan) untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program pemasaran di pasar ini. Pemanfaatan platform teknologi (*Tourism 5.0*) terkini akan digunakan untuk mendukung program pemasaran di wilayah Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika, serta pemanfaatan *big data analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pemasaran pariwisata Indonesia.

5. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

Kegiatan ini mencakup kampanye lintas kanal secara menyeluruh untuk mendorong peningkatan mobilitas wisatawan nusantara, khususnya dari wilayah perkotaan ke destinasi non-mainstream di luar Bali dan Jakarta. Strategi ini diawali dengan kurasi kalender *event* nasional dan daerah yang menampilkan festival budaya, pameran produk kreatif lokal, dan atraksi berbasis kearifan lokal, yang dikemas dalam paket wisata tematik ramah keluarga, generasi muda, dan wisatawan individual.

Promosi dilakukan secara digital melalui optimalisasi mesin pencari, iklan media sosial, serta kampanye terpadu dengan narasi inspiratif #DiIndonesiaAja yang menonjolkan keunikan destinasi, keramahan masyarakat, dan aksesibilitas transportasi. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini dengan penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara *real time*, AR/VR untuk simulasi pengalaman destinasi secara interaktif, serta *big data analytics* untuk evaluasi kinerja kampanye dan preferensi wisatawan. Kompetisi konten digital, video blog, dan kampanye *user-generated content* juga digelar secara rutin dengan melibatkan komunitas lokal dan pembuat konten muda di berbagai daerah.

Kegiatan ini melibatkan sinergi aktif dengan pemerintah daerah, komunitas kreatif, asosiasi pariwisata, serta platform pemesanan perjalanan daring untuk menyusun dan memasarkan paket wisata integratif. Fokus diberikan pada kawasan yang memiliki potensi pariwisata budaya, kuliner, sejarah, serta wisata alam berbasis desa atau geopark. *Branding* kawasan wisata dilakukan melalui peluncuran logo, slogan, dan produk visual destinasi yang seragam, serta integrasi dengan transportasi publik dan promosi terpadu antar sektor (perhotelan, kuliner, transportasi).

Sebagai bagian dari transformasi digital, diluncurkan fitur interaktif baru pada portal resmi pariwisata nasional yang menampilkan perencanaan perjalanan, rekomendasi aktivitas, kalender *event real time*, serta kolaborasi promosi lintas daerah. Implementasi *Tourism 5.0* akan memperkuat fitur ini dengan penggunaan platform digital berbasis AI, AR/VR untuk simulasi perjalanan yang lebih personal, serta *big data analytics* untuk mendukung analisis perilaku wisatawan secara *real time*. Seluruh kegiatan dikawal dengan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data analitik untuk mengukur dampak kampanye terhadap lonjakan perjalanan wisatawan nusantara, sebaran wisatawan, dan peningkatan belanja wisata lokal.

Arah Kebijakan 5: Pengembangan *Event* Pariwisata Berkualitas

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan (SS 1), terutama pada indikator devisa pariwisata, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Fokus utama arah kebijakan ini adalah menarik wisatawan dengan tujuan utama bisnis, melalui penguatan ekosistem *event* pariwisata berkualitas, termasuk pengembangan sektor *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE), serta penyelenggaraan *event* berbasis kekayaan intelektual lokal yang mencerminkan kekuatan budaya dan kreativitas Indonesia.

Implementasi *Tourism 5.0* menjadi kunci utama untuk modernisasi sektor *event* dan MICE, dengan dukungan teknologi seperti platform digital berbasis AI untuk personalisasi pengalaman pengunjung, AR/VR untuk simulasi interaktif, *big data analytics* untuk pemantauan dampak ekonomi secara *real time*, serta sistem kurasi *event* berbasis IP lokal untuk mendorong pengembangan dan promosi produk kreatif nasional.

Kebijakan ini diintegrasikan secara menyeluruh dengan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan nasional:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial
Kurasi *event* memastikan representasi perempuan, UMKM, penyandang disabilitas, dan komunitas lokal sebagai bagian dari rantai pasok *event*. *Event* diselenggarakan secara inklusif dan aman bagi semua kalangan, dengan pelibatan aktif kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi pendukung.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Strategi ini mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), melalui kolaborasi multipihak, partisipasi masyarakat, dan pendekatan budaya yang lestari.
3. Transformasi Digital
Teknologi digunakan untuk kurasi *event*, sistem tiket elektronik, pelaporan kinerja, kampanye digital, dan promosi lintas platform yang responsif terhadap preferensi wisatawan bisnis dan korporat.
4. Pembangunan Rendah Karbon
Diselenggarakan dengan prinsip *green event* menggunakan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta model *hybrid event* (luring dan daring) untuk mengurangi emisi karbon.
5. Pembangunan Berketahanan Iklim
Event yang dilaksanakan di kawasan rentan iklim mengintegrasikan unsur mitigasi risiko, edukasi lingkungan, dan pendekatan adaptasi berbasis komunitas, mendukung kesadaran dan ketahanan sektor pariwisata terhadap perubahan iklim.

Fokus program dalam arah kebijakan ini mencakup penguatan dan penyelenggaraan *event* berbasis kekayaan intelektual lokal, di mana setiap kegiatan dikembangkan dari karya budaya, kuliner, seni pertunjukan, cerita rakyat, serta produk kreatif unggulan Indonesia yang memiliki nilai komersial sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa. *Event-event* tersebut dikurasi secara selektif untuk merepresentasikan karakter lokal dan meningkatkan daya saing budaya Indonesia di tingkat global. Di sisi lain, pengembangan sektor MICE menjadi prioritas utama, melalui penyediaan infrastruktur berstandar internasional, integrasi venue dengan destinasi wisata, serta promosi aktif untuk menarik penyelenggaraan *event* bisnis regional dan internasional. Teknologi *Tourism 5.0* dimanfaatkan untuk mendukung personalisasi layanan, simulasi interaktif destinasi dan venue berbasis AR/VR, serta analisis profil peserta dan dampak ekonomi secara *real time*.

Transformasi manajemen *event* dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyelenggara (*event organizer*), penyusunan panduan teknis, penguatan sistem kurasi digital, serta fasilitasi promosi lintas sektor melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, pelaku industri, dan media global. Penyelenggaraan *event* diarahkan ke destinasi prioritas (DPP dan DPR), termasuk wilayah regeneratif dan destinasi berbasis danau, bahari, serta budaya, guna memperluas dampak ekonomi secara merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks yang lebih luas, *event* pariwisata juga difungsikan sebagai instrumen peningkatan pengeluaran wisatawan, perpanjangan lama tinggal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui partisipasi aktif dalam festival, konferensi, dan platform pertukaran budaya berskala internasional.

Penyelenggaraan *event* juga diarahkan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati dengan mengangkat narasi tentang flora-fauna

endemik, taman nasional, lanskap alam ikonik, dan edukasi ekologis dalam desain acara. *Event* berbasis alam seperti *eco festival*, *green concert*, dan *konser alam terbuka* menjadi bagian penting untuk memadukan pengalaman wisata dengan kesadaran ekologis.

1. Pengembangan Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran

Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas destinasi prioritas untuk menjadi tuan rumah kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) yang berkelas nasional hingga internasional. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui pemanfaatan platform digital berbasis AI untuk analisis permintaan pasar, AR/VR untuk simulasi venue MICE secara imersif, serta *big data analytics* untuk monitoring kinerja dan dampak *event* secara *real-time*. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas dan kapasitas *venue* seperti gedung pertemuan, pusat konvensi, dan fasilitas pameran; penguatan infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi, akomodasi hotel berbintang, dan sistem teknologi informasi; serta pelatihan SDM *event organizer* dan *frontliner* pariwisata agar memenuhi standar pelayanan berbasis sertifikasi.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penyusunan paket wisata insentif yang terintegrasi dengan destinasi budaya dan kuliner lokal, promosi destinasi MICE melalui kanal digital dan media internasional, serta fasilitasi kerja sama dengan asosiasi industri dan penyelenggara MICE global. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi paket wisata insentif, AR/VR untuk simulasi pengalaman destinasi, serta *big data analytics* untuk analisis preferensi pasar dan evaluasi efektivitas promosi secara *real-time*. Fokus diarahkan ke destinasi seperti Jakarta, Bali, Medan, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Manado, dan Batam, sesuai dengan peta pengembangan destinasi MICE dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yang memiliki potensi besar namun perlu optimalisasi dari sisi segmentasi pasar, kualitas penyelenggaraan, dan *branding* internasional sebagai kota *event* unggulan Indonesia.

2. Pengembangan Penyelenggara Event Daerah

Menyasar daerah-daerah dengan potensi budaya, sejarah, dan komunitas kreatif yang kuat, kegiatan ini mencakup pengembangan kapasitas penyelenggara lokal melalui pelatihan teknis perencanaan dan manajemen *event*, pendampingan dalam penyusunan proposal kegiatan, serta penguatan kemampuan promosi dan *branding* destinasi berbasis *event*. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten, AR/VR untuk simulasi destinasi dan *event* secara imersif, serta *big data analytics* untuk analisis tren pasar dan evaluasi kinerja *event* secara *real-time*. *Tourism 5.0* juga akan mendukung distribusi konten digital, *live streaming event*, platform interaktif bagi pengunjung, serta penggunaan *dashboard* pemantauan *event* secara *real-time*. Kurasi konten dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan narasi budaya lokal dan tren pasar, termasuk integrasi pertunjukan seni, kuliner khas, dan aktivitas partisipatif berbasis komunitas.

Dukungan promosi digital difokuskan pada aktivasi media sosial, produksi konten kreatif, dan distribusi lintas platform digital untuk menjangkau pasar regional dan nasional. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara *real-time*, AR/VR untuk simulasi *event* secara interaktif, serta *big data analytics* untuk evaluasi efektivitas kampanye secara mendalam. Selain itu, kegiatan ini memfasilitasi penyusunan proposal *sponsorship* profesional, mempertemukan pelaku *event* dengan mitra potensial dari sektor swasta, BUMN, dan lembaga donor lokal. Target utama dari kegiatan ini adalah mendorong tumbuhnya *signature event* tahunan yang otentik, inklusif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga memperkuat identitas budaya dan ekonomi kreatif lokal secara berkelanjutan.

3. Pengembangan Penyelenggara *Event* Nasional

Difokuskan pada *event* yang memiliki jangkauan nasional dan berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan di tingkat domestik, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas penyelenggara dalam menghadirkan *event* berkualitas tinggi dari sisi konten, manajemen, dan dampak pariwisata. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten *event*, AR/VR untuk simulasi pengalaman *event* yang lebih interaktif dan mendalam, serta *big data analytics* untuk analisis tren pasar dan evaluasi kinerja *event* secara *real time*. Pemerintah berperan aktif sebagai fasilitator dalam penyusunan kurikulum penyelenggaraan *event* nasional yang mencakup aspek pengelolaan teknis, keterlibatan komunitas, keberlanjutan, serta pengukuran dampak ekonomi dan sosial.

Selain itu, dilakukan integrasi lintas kanal promosi yang melibatkan media konvensional dan digital, sinergi dengan BUMN dan pelaku industri nasional, serta penguatan identitas *brand event* dalam jejaring promosi pariwisata nasional. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI, AR/VR untuk simulasi *event* secara interaktif, serta *big data analytics* untuk analisis performa kampanye secara *real time*. Harmonisasi jadwal kegiatan dengan kalender promosi nasional dilakukan melalui penyusunan sistem kalender *event* terintegrasi yang terhubung dengan portal promosi wisata nasional dan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan promosi secara sinkron dan efisien sepanjang tahun.

4. Pengembangan Penyelenggara *Event* Internasional

Berorientasi pada penciptaan daya saing global melalui penyelenggaraan *event* berskala internasional yang meliputi festival budaya lintas negara, kejuaraan olahraga kelas dunia, simposium industri kreatif, dan forum kepariwisataan. Kegiatan ini diarahkan pada penguatan identitas Indonesia sebagai tuan rumah yang kompeten, inklusif, dan berstandar internasional dalam bidang penyelenggaraan *event*. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten, AR/VR untuk simulasi destinasi *event* yang lebih imersif, dan *big data analytics* untuk analisis tren pasar dan evaluasi kinerja *event* secara *real-time*.

Dukungan yang diberikan meliputi promosi *event* melalui jaringan diplomasi pariwisata, kampanye internasional berbasis target audiens, serta partisipasi dalam bursa *event* global untuk menarik minat partisipasi internasional. Pemerintah juga memfasilitasi proses akreditasi oleh lembaga penyelenggara *event* internasional, pengurusan perizinan lintas sektor, hingga bantuan teknis untuk kurasi konten dan protokol kelas dunia.

Selain itu, fokus diberikan pada peningkatan konektivitas internasional ke lokasi penyelenggaraan *event* melalui kerja sama dengan operator penerbangan dan penyedia layanan transportasi, serta penyediaan akomodasi dan layanan pendukung yang ramah wisatawan mancanegara. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk simulasi aksesibilitas secara interaktif, AR/VR untuk simulasi destinasi yang lebih imersif, serta *big data analytics* untuk analisis preferensi wisatawan dan monitoring dampak kegiatan secara *real-time*. Evaluasi kegiatan dilakukan secara menyeluruh, dengan menilai dampak ekonomi langsung dan tidak langsung, persepsi brand Indonesia sebagai destinasi global, serta keberlanjutan penyelenggaraan dari sisi sosial dan lingkungan.

5. Pengembangan Strategi Event Pariwisata

Kegiatan ini berfungsi sebagai fondasi strategis yang menopang keseluruhan ekosistem penyelenggaraan *event* pariwisata nasional. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis rantai nilai industri *event*, AR/VR untuk simulasi destinasi *event* secara interaktif, dan *big data analytics* untuk sinkronisasi kebijakan secara *real-time*. Penyusunan peta jalan (*roadmap*) dilakukan melalui kajian mendalam terhadap rantai nilai industri *event*, pemetaan potensi wilayah, serta sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan pariwisata nasional dan daerah. Peta jalan ini menetapkan arah, tahapan, dan prioritas pengembangan *event* dalam jangka menengah dan panjang.

Sistem penilaian *event* nasional disusun berdasarkan indikator yang mencakup skala penyelenggaraan, kualitas manajemen, jumlah pengunjung, keterlibatan pelaku lokal, keberlanjutan lingkungan, serta dampak ekonomi langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung sistem ini melalui platform digital berbasis AI untuk pemrosesan data secara *real-time*, AR/VR untuk simulasi *event* dan dampak, serta *big data analytics* untuk analisis performa *event* secara menyeluruh. Peningkatan ini berfungsi sebagai rujukan dalam alokasi dukungan pemerintah, promosi, dan fasilitasi mitra sponsor.

Koordinasi antar pemangku kepentingan diperkuat melalui pembentukan forum kolaborasi pusat-daerah, mekanisme sinkronisasi perencanaan anggaran, serta penyusunan panduan teknis lintas sektor. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk analisis kolaborasi, AR/VR untuk simulasi forum kolaborasi secara virtual, serta *big data analytics* untuk pemantauan kinerja sinkronisasi secara *real-time*. Di sisi operasional, dikembangkan *database* nasional penyelenggara *event* yang mencakup profil, rekam jejak, dan portofolio penyelenggaraan, yang terhubung

dengan platform digital monitoring untuk pemantauan jadwal, pelaksanaan, dan evaluasi *event* secara *real time*.

Sistem evaluasi terintegrasi dibangun dengan pendekatan berbasis dampak (*impact-based evaluation*), mencakup pengukuran kontribusi ekonomi terhadap UMKM, penciptaan lapangan kerja temporer, persepsi pengunjung, serta indikator keberlanjutan sosial dan lingkungan dari tiap *event* yang diselenggarakan. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung sistem ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis performa secara *real-time*, AR/VR untuk simulasi dampak *event*, serta *big data analytics* untuk analisis komprehensif yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem evaluasi. Keseluruhan sistem ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem *event* pariwisata yang profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Arah Kebijakan 6: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Arah kebijakan ini relevan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur (SS 2) pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Implementasi *Tourism 5.0* mendukung arah kebijakan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis data kinerja secara *real time*, serta *big data analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Arah kebijakan ini merupakan fondasi penguatan tata kelola internal Kementerian yang diarahkan untuk membangun birokrasi yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Sasaran utamanya adalah terwujudnya transformasi birokrasi di seluruh unit kerja, termasuk para deputi, sekretariat, dan unit pelaksana teknis yang berperan dalam implementasi kebijakan pariwisata nasional.

Kegiatan dalam program ini mencakup sejumlah inisiatif strategis. Pertama, penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja serta keuangan berbasis teknologi informasi. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis data *real-time*, serta *big data analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan tepat. Ini dilakukan melalui pembangunan *dashboard* kinerja sektoral, integrasi sistem data lintas unit kerja, serta penerapan sistem evaluasi dan monitoring program secara *real-time* untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Kedua, reformasi kelembagaan mencakup penyelarasan struktur organisasi dengan arah kebijakan strategis, penyederhanaan proses bisnis, dan penguatan fungsi koordinasi internal antar Kedeputan dan Sekretariat Kementerian. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung reformasi ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis organisasi secara *real-time*, serta *big data analytics* untuk evaluasi indikator kinerja utama secara komprehensif dan responsif terhadap dinamika sektor pariwisata. Selain itu, dilakukan peninjauan ulang terhadap indikator kinerja utama dan output program agar lebih adaptif terhadap dinamika sektor pariwisata.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial secara berkelanjutan, mendorong inovasi kebijakan,

serta penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan publik dan etika pemerintahan. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi pelatihan, serta *big data analytics* untuk evaluasi kinerja aparatur secara *real-time*.

Keempat, penguatan tata kelola berbasis akuntabilitas dan transparansi dilakukan dengan memperkuat sistem audit internal, penerapan sistem pelaporan terintegrasi, dan penguatan pengawasan melekat melalui mekanisme pelibatan pihak ketiga, termasuk publik, dalam evaluasi kinerja lembaga. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI analisis data kinerja secara *real-time*, serta *big data analytics* untuk mendukung pemantauan hasil audit secara transparan dan berbasis bukti.

Dengan pendekatan tersebut, birokrasi Kementerian diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan secara lebih adaptif, mendukung percepatan transformasi sektor pariwisata, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja institusi pemerintah dalam mendukung agenda besar Indonesia Emas 2045, yaitu:

1. Transformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata yang Berdampak pada Kinerja Strategis

Program Kegiatan ini mencakup penyusunan peta jalan reformasi birokrasi yang mengacu pada kerangka kerja nasional dan indikator evaluasi internal, termasuk identifikasi area perbaikan tata kelola, standar pelayanan, dan efektivitas organisasi. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung program ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis data kinerja dan proses pelayanan publik secara interaktif, serta *big data analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data *real-time*. Digitalisasi layanan tata usaha dan perencanaan difokuskan pada penerapan sistem administrasi elektronik terintegrasi untuk perencanaan program, penganggaran, keuangan, pengelolaan dokumen, kepegawaian, dan sistem monitoring berbasis data *real time*.

Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis hasil, serta pelaksanaan reviu kinerja triwulanan yang terhubung dengan indikator *output* dan *outcome* program kementerian. Implementasi *Tourism 5.0* akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis kinerja secara *real-time*, serta *big data analytics* untuk mendukung pemantauan *output* dan *outcome* secara mendalam. Selain itu, peningkatan kualitas layanan internal dilakukan melalui penataan struktur organisasi yang lebih ramping dan fungsional, pemetaan beban kerja berbasis analisis jabatan, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan kepemimpinan digital, manajemen proyek, dan pelayanan publik.

Transformasi ini difokuskan pada optimalisasi struktur kerja yang adaptif dan kolaboratif, percepatan proses pengambilan keputusan melalui digitalisasi birokrasi dan sistem delegasi yang efisien, serta peningkatan sinergi lintas unit kerja untuk mendukung pencapaian *output* strategis Kementerian secara lebih efektif dan akuntabel.

2. Transformasi Birokrasi di Setiap Kedeputian yang Berdampak pada Kinerja Program

Masing-masing deputi menjalankan transformasi birokrasi secara terstruktur dan bertahap dengan tolok ukur berupa persentase satuan kerja yang berkontribusi mendorong pencapaian Reformasi Birokrasi (RB). Implementasi digitalisasi akan mendukung transformasi ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis kinerja dan *big data analytics* untuk mendukung monitoring hasil transformasi birokrasi secara *real-time*. Proses transformasi diawali dengan asesmen mandiri berbasis indikator evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang mencakup RB General dan RB Tematik yang akan di detailkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029.

Setiap unit kerja membentuk tim penggerak perubahan yang bertugas memimpin pelaksanaan rencana aksi, memantau implementasi, dan mendorong inovasi pelayanan. Implementasi digitalisasi akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk pemetaan kinerja tim, dan *big data analytics* untuk monitoring transformasi pelayanan publik secara *real-time*. Peningkatan kapabilitas dilakukan melalui pelatihan internal tentang integritas, kepemimpinan transformatif, pelayanan publik, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi layanan. Perbaikan standar pelayanan publik mencakup penyederhanaan prosedur, penyusunan standar pelayanan minimum, dan penilaian kepuasan masyarakat berbasis digital.

Transformasi juga ditopang oleh integrasi sistem informasi manajemen kinerja, digitalisasi dokumen dan layanan kepegawaian, serta sistem pelaporan, keuangan dan kinerja program yang transparan dan terverifikasi. Keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga berdasarkan bukti nyata berupa perbaikan mutu layanan, efisiensi kerja, peningkatan kepuasan publik, dan keberhasilan inovasi yang berdampak pada pelaku pariwisata dan masyarakat luas. Evaluasi berkala dilakukan melalui survei persepsi publik, audit kepatuhan, dan *benchmarking* antar unit kerja untuk memperkuat budaya kinerja berbasis hasil.

Tabel 3.2 Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata

Arah Kebijakan	Strategi Kementerian	Unit Pelaksana Utama	Relevansi Terhadap Sasaran Strategis	Instansi Pemerintah Terkait	Kolaborasi dengan instansi pemerintah terkait
Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri 2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 3. Pengembangan Manajemen Strategis 4. Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Internasional 5. Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi 6. Pengembangan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	SS 1	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Mengembangkan keterampilan ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata, terutama dalam penguatan subsektor kreatif di destinasi
				Kementerian Ketenagakerjaan	Menyediakan pelatihan vokasional dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata melalui BLK dan LPK
				Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Menjamin mutu kurikulum pendidikan politeknik vokasi
				Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Mengarusutamakan literasi pariwisata dan budaya sejak jenjang pendidikan dasar
				Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Mengembangkan kapasitas masyarakat desa wisata dan penguatan kelembagaan lokal
				Kementerian Sosial	Memberdayakan kelompok rentan melalui pelatihan dan program sosial inklusif berbasis pariwisata

				Kementerian Dalam Negeri	Menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan nasional serta penguatan kelembagaan di daerah
				Kementerian Luar Negeri	Peningkatan dan implementasi kerjasama hubungan Lembaga internasional
				Kementerian Keuangan	Mendukung pembiayaan program kelembagaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan vokasi
				Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Memberikan pelatihan aparatur dan pengembangan kompetensi kepemimpinan ASN pariwisata
				Kementerian Pekerjaan Umum	Menyediakan infrastruktur fisik dan sarana pendukung lembaga pendidikan vokasi pariwisata
				Badan Riset dan Inovasi Nasional	Melakukan riset kebijakan dan kelembagaan, serta pengembangan inovasi untuk sektor pariwisata
				Badan Pusat Statistik	Menyediakan data statistik tenaga kerja pariwisata
				Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan penguatan peran penyandang disabilitas serta perlindungan dari kekerasan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

				Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Pelaksana program di daerah, penyedia sumber daya lokal, dan fasilitator komunitas pariwisata
Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1. Perancangan Destinasi Pariwisata 2. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata 3. Pengembangan Produk Pariwisata 4. Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I 5. Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II 6. Pengelolaan Kawasan Otorita Pariwisata	Deputi Bidang Pengemba ngan Destinasi dan Infrastrukt ur	SS1	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Mendorong integrasi ekonomi kreatif sebagai bagian dari atraksi dan penguatan karakter destinasi
				Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan infrastruktur dasar destinasi (jalan, sanitasi, ruang publik) dan penataan kawasan
				Kementerian Perhubungan	Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui moda transportasi darat, laut, udara ke dan antar destinasi
				Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Menjamin kepastian tata ruang destinasi dan ketersediaan lahan amenitas publik
				Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengembangan destinasi bahari dan danau serta kawasan konservasi berbasis wisata
				Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Pelestarian lingkungan dan penanganan sampah di destinasi pariwisata
				Kementerian Kehutanan	Pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan hutan serta regulasi ekowisata
				Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembangunan Desa melalui program pengembangan desa wisata

					dan peningkatan perekonomian desa
				Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kolaborasi dalam Pengembangan Kawasan Geopark sebagai Destinasi Wisata Edukasi
				Kementerian Keuangan	Pembiayaan infrastruktur melalui APBN, DAK, dan skema KPBU
				Kementerian Perdagangan	Mendorong pasar produk lokal di kawasan wisata dan promosi destinasi dalam pameran perdagangan
				Kementerian Dalam Negeri	Sinkronisasi program destinasi dan tata ruang dalam RPJMD dan RTRW daerah
				Kementerian Koperasi	Pengembangan Koperasi di Desa Wisata
				Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Manajemen Krisis Pariwisata, Integrasi Data Kebencanaan dan Pengembangan serta Menjamin ketahanan destinasi dari risiko bencana melalui mitigasi dan respons
				Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	Pengelolaan Destinasi Wisata di Kawasan Perbatasan
				Badan Informasi Geospasial (BIG)	Menyediakan peta tematik dan spasial untuk perencanaan pengembangan destinasi

				Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	Penguatan Nilai Tambah dan Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim
				Badan Narkotika Nasional (BNN)	Pencegahan dan penanggulangan narkoba di destinasi pariwisata
				Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Pencegahan dan penanggulangan terorisme di destinasi pariwisata
				Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Implementasi pembangunan fisik, pemeliharaan infrastruktur, dan penguatan pengelolaan destinasi
Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata yang Berkualitas	1. Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha 2. Pengembangan Manajemen Industri 3. Peningkatan Manajemen Investasi 4. Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan 5. Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan	Deputi Bidang Industri dan Investasi	SS1	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Mengembangkan model usaha kreatif berbasis kekayaan intelektual dan mendorong co-investment dalam subsektor ekonomi kreatif destinasi
				Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Fasilitator utama dalam promosi, kemudahan perizinan, dan pendampingan investasi pariwisata
				Kementerian Keuangan	Penyedia insentif fiskal, dukungan pembiayaan investasi, dan regulasi pembiayaan kreatif berbasis destinasi
				Kementerian Koperasi	Pembinaan UMKM pariwisata
				Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pelatihan Kewirausahaan

				Kementerian Perdagangan	Mempromosikan produk pariwisata dan jasa penunjang ke pasar nasional dan internasional
				Kementerian Ketenagakerjaan	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja industri pariwisata dan sertifikasi kompetensi kerja
				Kementerian Hukum	Mendukung perlindungan dan komersialisasi aset kekayaan intelektual dalam industri pariwisata
				Kementerian PAN-RB	Reformasi tata kelola layanan investasi dan penyederhanaan birokrasi industri pariwisata
				Kementerian Komunikasi dan Digital	Penguatan sistem informasi investasi dan transformasi digital industri pariwisata
				Kementerian Dalam Negeri	Penguatan peran pemerintah daerah dalam promosi dan fasilitasi investasi pariwisata
				Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Perizinan lingkungan hidup untuk usaha pariwisata, skema pariwisata berkelanjutan
				Badan Pusat Statistik	Penyedia data industri pariwisata dan nilai investasi dan Penyediaan data PDRB sektor Akomodasi, dan Makan Minum (AKMAMIN)

				Lembaga Pembiayaan Nasional dan Swasta	Mitra pembiayaan sektor industri pariwisata, termasuk skema PPP/KPBU dan dana kreatif
				Sekretariat Dewan KEK Nasional	Mendukung pengembangan dan pengawasan KEK Pariwisata
				Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Penyedia lahan, perizinan, dan pengembangan ekosistem investasi daerah berbasis pariwisata
Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Berkualitas	1. Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I 3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara II 4. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara III 5. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara	Deputi Bidang Pemasaran	SS1	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Mendorong penguatan narasi destinasi berbasis budaya dan ekonomi kreatif; pengembangan konten kreatif untuk media promosi
				Kementerian Luar Negeri	Dukungan diplomasi pariwisata dan kerja sama promosi lintas negara melalui perwakilan RI di luar negeri
				Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	Optimalisasi kampanye digital, penguatan infrastruktur promosi daring, dan sinergi lintas platform digital nasional
				Kementerian Perdagangan	Fasilitasi pameran dagang luar negeri yang terintegrasi dengan promosi destinasi wisata dan ekspor jasa wisata
				Kementerian Perhubungan	Sinergi aksesibilitas dengan strategi promosi rute penerbangan dan transportasi ke destinasi prioritas

				Kementerian Dalam Negeri	Sinkronisasi program pemasaran pariwisata daerah dan sinergi promosi antar wilayah
				Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Kolaborasi riset promosi dan pengembangan SDM pemasaran pariwisata
				Bank Indonesia	Penyediaan data devisa pariwisata nasional dan devisa DPP dan DPR
				Badan Pusat Statistik	Penyediaan data statistik kunjungan wisman, pengeluaran wisman, perjalanan wisnus, dan pendapatan dari wisnus
				Badan Pengaturan BUMN	Mitra promosi dalam integrasi layanan dan kampanye nasional wisata
				Badan Riset dan Inovasi Nasional	Analisis efektivitas strategi promosi dan riset perilaku wisatawan
				Badan Informasi Geospasial (BIG)	Penyedia peta destinasi dan data spasial untuk integrasi promosi digital berbasis lokasi
				Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Penyelenggara <i>event</i> daerah, pelaksana kampanye promosi lokal, dan penguatan <i>branding</i> destinasi regional
Pengembangan <i>Event</i>	1. Pengembangan Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif,	Deputi Bidang Pengemba	SS1	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Mengintegrasikan pelaku kreatif dan subsektor kreatif dalam pengembangan konten dan

Pariwisata Berkualitas	Konferensi, dan Pameran	ngan Penyelenggara Kegiatan (Events)			pengelolaan <i>event</i> berbasis komunitas dan budaya
	2. Pengembangan Penyelenggara <i>Event</i> Daerah			Kementerian Dalam Negeri	Sinkronisasi kalender <i>event</i> daerah, penguatan peran Pemda dalam pengembangan dan dukungan <i>event</i> berskala lokal dan nasional
	3. Pengembangan Penyelenggara <i>Event</i> Nasional			Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	Fasilitasi promosi digital <i>event</i> , pengembangan platform informasi <i>event</i> nasional, dan aktivasi media sosial lintas kanal
	4. Pengembangan Penyelenggara <i>Event</i> Internasional			Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Kolaborasi pengembangan SDM penyelenggara <i>event</i> , kurikulum manajemen <i>event</i> , dan riset dampak <i>event</i> terhadap ekonomi lokal
	5. Pengembangan Strategi <i>Event</i> Pariwisata			Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dukungan pengembangan <i>sport tourism</i> dan <i>event</i> olahraga berskala nasional/internasional
				Kementerian Luar Negeri	Fasilitasi kerjasama promosi <i>event</i> internasional dan dukungan diplomasi budaya
				Kementerian Perhubungan	Mendukung konektivitas dan logistik penyelenggaraan <i>event</i> lintas destinasi
				Kementerian Keuangan	Dukungan pendanaan melalui APBN dan skema insentif promosi <i>event</i> unggulan
				Kementerian BUMN	Dukungan <i>sponsorship</i> dan integrasi <i>event</i> dengan kampanye nasional

				Badan Riset dan Inovasi Nasional	Evaluasi dampak <i>event</i> , pengembangan sistem pemeringkatan dan indeks <i>event</i> pariwisata
				Badan Pusat Statistik	Penyediaan data partisipasi, dampak ekonomi <i>event</i> , dan persepsi publik
				Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia	Dukungan keamanan dan ketertiban pelaksanaan <i>event</i> berskala besar
				Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Inisiator dan pelaksana <i>event</i> lokal, fasilitator logistik, dan penggerak ekosistem kreatif daerah
Tata Kelola Kementerian Pariwisata Berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1. Transformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata yang Berdampak pada Kinerja Strategis 2. Transformasi Birokrasi Di Setiap Kedeputan yang Berdampak pada Kinerja Program	Sekretariat Kementerian	SS2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Pariwisata dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
				Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelarasan program prioritas nasional
				Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)	Menyediakan pedoman, penilaian Zona Integritas, reformasi birokrasi, dan penguatan sistem merit di lingkungan Kementerian Pariwisata
				Kementerian Keuangan	Mendukung tata kelola anggaran berbasis kinerja, integrasi perencanaan-penganggaran,

					keuangan dan efisiensi penggunaan APBN
				Kementerian Dalam Negeri	Mendorong sinergitas tata kelola pusat-daerah, koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, integrasi sistem pelaporan dan pengawasan sektor pariwisata di level subnasional
				Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	Fasilitasi transformasi digital internal, keamanan data, dan pengembangan layanan berbasis teknologi
				Kementerian Hukum	Harmonisasi regulasi bidang pariwisata
				Arsip Nasional Republik Indonesia	Koordinasi Tata Kelola Kearsipan
				Komisi Informasi Publik	Koordinasi peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata
				Badan Kepegawaian Negara	Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian Kementerian Pariwisata
				Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN Kementerian Pariwisata, termasuk kepemimpinan digital dan pelayanan publik

				Badan Pusat Statistik	Penyedia data kelembagaan dan indikator kinerja program sebagai dasar evaluasi internal
				Kantor Staf Presiden	Dukungan percepatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian program prioritas nasional dan isu strategis bidang pariwisata
				Badan Riset dan Inovasi Nasional	Dukungan <i>evidence-based policy</i> melalui riset kelembagaan dan tata kelola sektor
				Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pengawasan internal, reviu kinerja, dan penguatan manajemen risiko kelembagaan
				Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Sinkronisasi Indikator Utama Pembangunan Nasional urusan Pariwisata di daerah

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, kerangka regulasi merupakan dukungan dalam bentuk regulasi guna mencapai visi yang ingin dicapai. Kerangka regulasi akan menjadi payung hukum pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian tahun 2025-2029. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian diusulkan sejumlah penyusunan regulasi dan dokumen antara lain:

Tabel 3.3 Matriks Kerangka Regulasi

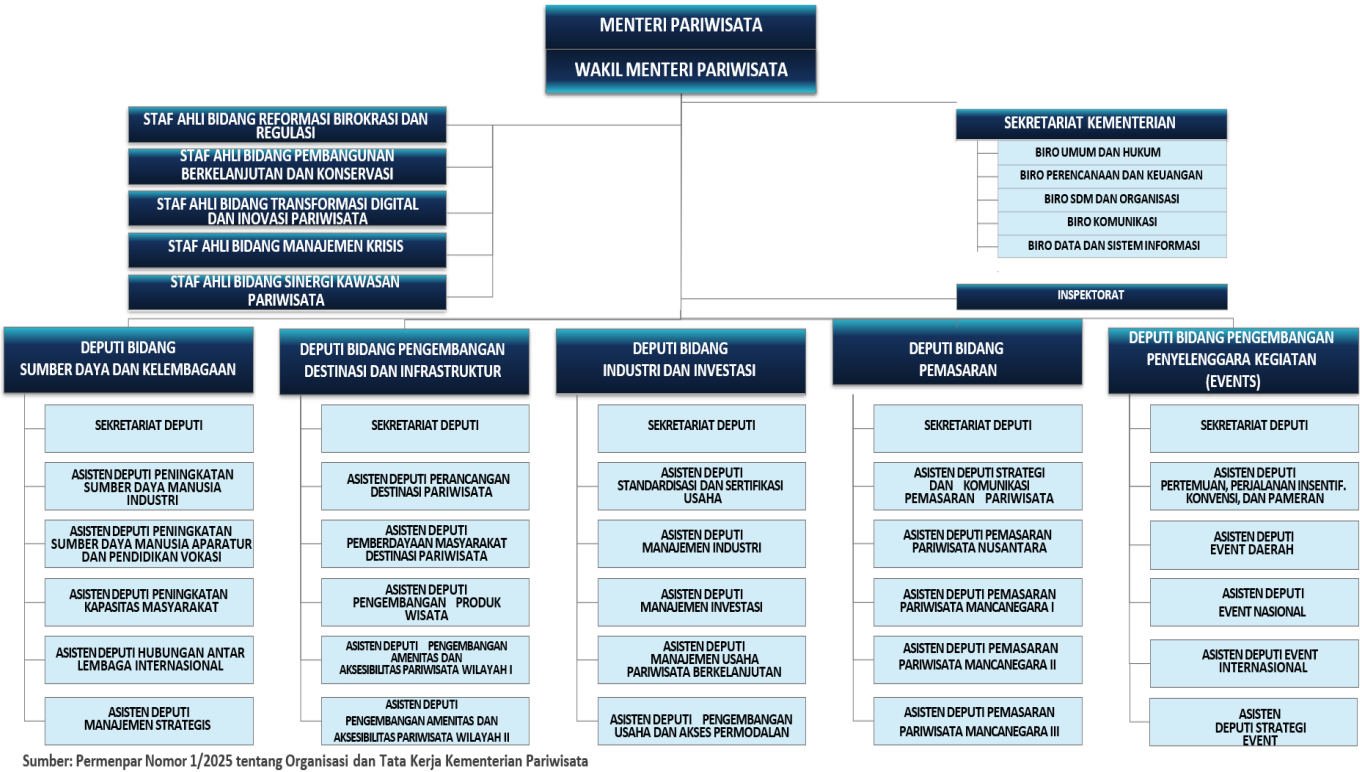
No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Tahun Realisasi
1.	Perubahan Undang-Undang Kepariwisata	2025
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2026-2045	2026-2029
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)	2025-2027
4	Penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Regeneratif	2026-2027
5	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelibatan Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional	2026
6	Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	2025-2026
7	Penyusunan materi muatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pariwisata	2025-2029
8	Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	2025

9	Penyusunan regulasi terkait <i>Blue-Green-Circular Economy</i> sektor pariwisata	2026-2027
10	Penyusunan regulasi <i>Indonesia Quality Tourism Fund</i>	2026-2027
11	Penyusunan regulasi <i>Food Loss and Waste</i>	2026-2027
12	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Wisata Edukasi	2025-2027

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Sejalan dengan prinsip *structure follows strategy*, struktur kelembagaan Kementerian harus didesain dengan dasar untuk memastikan ketercapaian visi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian periode 2025-2029 secara optimal. Hal serupa juga berlaku pada elemen-elemen kelembagaan lainnya seperti proses bisnis, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja. Tidak hanya berkaitan dengan kinerja pembangunan di sektor pariwisata, kelembagaan juga merupakan elemen penting dalam tema pembangunan nasional 2025-2029 yaitu Penguatan Fondasi Transformasi, khususnya agenda transformasi tata kelola.

Berpijak pada sasaran strategis yang telah dirumuskan, amanat undang-undang terkait pembangunan di bidang pariwisata, serta hakikat kelembagaan Kementerian, maka desain struktur kelembagaan Kementerian tahun 2025-2029 seperti tersaji pada Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata

Dengan demikian, Kementerian memiliki 6 (enam) unit kerja pimpinan tinggi madya, yaitu:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
3. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
4. Deputi Bidang Industri dan Investasi;
5. Deputi Bidang Pemasaran; dan
6. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Kementerian berkomitmen untuk kontribusi dalam memperkuat transformasi ekonomi Indonesia. Transformasi ekonomi tersebut melalui pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menjadikan Indonesia sebagai Destinasi Unggulan Dunia yang berdaya saing. Sehubungan dengan komitmen dan tujuan tersebut, terdapat 7 IKSS sebagai penyumbang data makro untuk target kinerja Kementerian tahun 2025 - 2029. Tabel 4.1 menunjukkan Sasaran Strategis (SS), Indikator pada setiap sasaran strategi, serta target-target yang diharapkan dapat dicapai Kementerian tahun 2025-2029. Matriks kinerja dari Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) terlampir.

Tabel 4.1 Target Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET 2025	TARGET 2029
SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata	IKSS 1.1	Rasio PDB Pariwisata (persen)	4,20 – 4,30*	4,90 – 5,00
		IKSS 1.2	Devisa Pariwisata (miliar USD)	17,1 – 18,3*	32,0 – 39,4
		IKSS 1.3	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/kunjungan)	1.220*	1.600-1.672
		IKSS 1.4	Tenaga Kerja Pariwisata (juta orang)	25,75	29,00
		IKSS 1.5	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta kunjungan)	14,0 – 15,0*	20,0 – 23,5
		IKSS 1.6	Perjalanan Wisatawan Nusantara (juta perjalanan)	1.084	1.500
SS.2	Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	86,5	90,5

*) Pemutahiran RKP 2025

Selain itu, sesuai dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 3 (tiga) penugasan kegiatan prioritas untuk sektor pariwisata, yakni: Percepatan Pembangunan 4 (empat) DPP (Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Lombok-Gili Tramenan); Pengembangan 6 (enam) DPP (Manado-Likupang, Bangka-Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai); serta Penguatan 3 (tiga) DPR (Bali, *Greater* Jakarta, dan Kepulauan Riau). Adapun sasaran, indikator, beserta dengan target yang akan dicapai tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Target Kegiatan Prioritas Kementerian Pariwisata Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029

SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
A.	Percepatan Pembangunan 4 Destinasi Pariwisata Prioritas (Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Lombok-Gili Tramena,)							
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta Rupiah	22.023.561,06	23.124.739,11	24.280.976,07	25.495.024,87	26.769.776,11
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Miliar Rupiah	23.672,34	25.282,06	27.001,24	28.837,32	30.776,00
		Devisa Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta USD	718,37	767,94	820,92	877,57	931,00
		Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Jawa Tengah)	Orang	3.280.514	3.408.096	3.540.640	3.678.338	3.821.392
		Investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta Rupiah	1.191.228,32	1.330.356,95	1.485.735,01	1.659.260,33	1.853.052,41
		Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (DIY)	Orang	454.432	459.686	465.000	470.376	475.814
2.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Labuan Bajo	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo	Juta Rupiah	42.889,25	45.063,74	47.348,47	49.749,04	52.062,72
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo	Miliar Rupiah	1.175,23	1.417,33	1.709,30	2.061,42	2.488,59
		Devisa Pariwisata Labuan Bajo	Juta USD	283,52	347,12	424,98	520,32	637,04
		Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo	Orang	304.910	324.957	346.323	369.094	393.362

SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	Juta Rupiah	663.817,72	741.347,82	827.932,99	924.630,81	1.032.622,38
3.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataaan Danau Toba	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba	Juta Rupiah	2.417.786,51	2.538.675,84	2.665.609,63	2.798.890,11	2.938.834,62
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba	Miliar Rupiah	2.048,41	2.179,51	2.319,00	2.467,42	2.619,69
		Devisa Pariwisata Danau Toba	Juta USD	163,91	184,40	207,45	233,38	263,80
		Tenaga Kerja Pariwisata Danau Toba	Orang	1.199.556	1.227.710	1.256.524	1.286.014	1.316.197
		Investasi sektor pariwisata Danau Toba	Juta Rupiah	513.030,98	572.950,06	639.867,34	714.600,17	798.061,37
4.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataaan Lombok-Gili Tramena	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramena	Juta Rupiah	2.432.513,02	2.554.138,68	2.681.845,61	2.815.937,89	2.956.734,78
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena	Miliar Rupiah	14.850,43	17.550,24	20.740,87	24.511,56	28.971,58
		Devisa Pariwisata Lombok-Gili Tramena	Juta USD	800,60	957,52	1.145,19	1.369,65	1.659,00
		Tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena	Orang	544.460	589.502	638.270	691.073	748.244
		Investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena	Juta Rupiah	5.598.319,34	6.252.170,90	6.982.388,58	7.797.891,49	8.708.640,46
B.	Pengembangan 6 Destinasi Pariwisata Prioritas (Manado-Likupang, Bangka-Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai)							
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang	Juta Rupiah	2.837.523,71	2.979.399,89	3.128.369,89	3.284.788,38	3.449.027,80

SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Kepariwisataan Manado-Likupang	Pendapatan dari wisatawan nusantara Manado-Likupang	Miliar Rupiah	8.982,47	10.572,37	12.443,67	14.646,20	17.232,90
		Devisa Pariwisata Manado-Likupang	Juta USD	267,09	297,81	332,06	370,24	427,00
		Tenaga kerja pariwisata Manado-Likupang	Orang	219.919	223.800	227.750	231.769	235.860
		Investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	Juta Rupiah	965.762,85	1.078.558,41	1.204.527,84	1.345.209,78	1.502.322,56
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Bangka-Belitung	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung	Juta Rupiah	3.614.153,73	3.792.692,93	3.980.051,96	4.176.666,53	4.398.051,36
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Bangka Belitung	Miliar Rupiah	13.161,89	14.925,58	16.925,61	19.193,64	21.763,57
		Devisa Pariwisata Bangka Belitung	Juta USD	41,54	48,60	56,86	66,52	78,30
		Tenaga Kerja Pariwisata Bangka Belitung	Orang	109.216	113.192	117.313	121.584	126.011
		Investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	Juta Rupiah	657.861,88	734.696,38	820.504,70	916.334,93	1.023.357,60
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Raja Ampat	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat	Juta Rupiah	18.196,50	19.106,32	20.061,64	21.064,72	22.117,96
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Raja Ampat	Miliar Rupiah	290,40	332,80	381,39	437,07	501,08
		Devisa Pariwisata dari Raja Ampat	Juta USD	42,44	47,96	54,19	61,23	70,30
		Tenaga kerja pariwisata Raja Ampat	Orang	9.054	9.623	10.227	10.869	11.552

SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Investasi sektor pariwisata Raja Ampat	Juta Rupiah	15.683,97	17.515,77	19.561,51	21.846,18	24.397,69
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru	Juta Rupiah	19.273.275,88	20.225.375,70	21.224.509,26	22.273.000,02	23.453.583,72
		Pendapatan dari wisatawan nusantara di Bromo-Tengger-Semeru	Miliar Rupiah	1.112,12	1.474,67	1.955,41	2.592,87	3.437,90
		Devisa Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Juta USD	7,21	9,46	12,41	16,28	22,21
		Tenaga kerja pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Orang	3.954.841	4.121.599	4.295.388	4.476.505	4.665.259
		Investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Juta Rupiah	971.309,16	1.084.752,49	1.211.445,36	1.352.935,22	1.510.950,29
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Wakatobi	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi	Juta Rupiah	39.122,37	41.055,01	43.083,13	45.211,44	47.607,88
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Wakatobi	Miliar Rupiah	132,95	163,66	201,46	248,00	305,40
		Devisa Pariwisata Wakatobi	Juta USD	9,38	11,84	14,93	18,84	23,76
		Tenaga kerja pariwisata Wakatobi	Orang	243.687	256.301	269.569	283.523	298.200
		Investasi sektor pariwisata Wakatobi	Juta Rupiah	45.520,70	53.701,14	61.581,79	70.574,60	80.832,32
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai	Juta Rupiah	2.849,87	2.992,37	3.141,99	3.299,09	3.464,04
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Morotai	Miliar Rupiah	159,98	177,57	197,11	218,79	242,5

SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Destinasi Pariwisata Morotai	Devisa Pariwisata Morotai	Juta USD	0,78	0,89	1,01	1,14	1,56
		Tenaga kerja pariwisata Morotai	Orang	82.835	86.163	89.625	93.226	96.971
		Investasi sektor pariwisata Morotai	Juta Rupiah	49.626,20	55.422,25	61.895,25	69.124,27	77.197,58
C.	Penguatan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, <i>Greater Jakarta</i> , dan Kepulauan Riau)							
1.	Meningkatnya Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Bali	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali	Juta Rupiah	60.288.199,30	63.302.609,27	66.467.739,73	69.791.126,72	73.280.683,05
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Bali	Miliar Rupiah	123.500,99	136.347,00	150.529,20	166.186,58	183.472,56
		Devisa pariwisata Bali	Juta USD	12.665,99	13.319,94	14.007,65	14.730,86	15.540,00
		Tenaga kerja pariwisata Bali	Orang	644.270	651.718	659.253	666.874	674.584
		Investasi sektor pariwisata Bali	Juta Rupiah	9.413.987,20	10.513.486,87	11.741.401,79	13.112.730,13	14.644.221,75
2.	Meningkatnya Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata <i>Greater Jakarta</i>	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Greater Jakarta</i>	Juta Rupiah	211.658.892,86	222.241.837,50	233.353.929,38	245.021.625,84	257.272.707,14
		Pendapatan dari wisatawan nusantara <i>Greater Jakarta</i>	Miliar Rupiah	421.993,70	452.039,65	484.224,87	518.701,68	555.633,24
		Devisa Pariwisata Jakarta	Juta USD	3.439,37	3.680,13	3.937,74	4.213,38	4.708,60
		Tenaga kerja pariwisata <i>Greater Jakarta</i> (DKI)	Orang	1.537.529	1.557.469	1.577.668	1.598.129	1.618.855
		Tenaga kerja pariwisata <i>Greater Jakarta</i> (Jawa Barat)	Orang	5.591.063	5.811.446	6.040.515	6.278.613	6.526.097
		Tenaga kerja pariwisata <i>Greater Jakarta</i> (Banten)	Orang	1.523.452	1.635.835	1.756.507	1.886.081	2.025.213

SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Investasi sektor pariwisata <i>Greater</i> Jakarta	Juta Rupiah	14.130.860,16	15.784.170,80	17.630.918,78	19.693.736,28	21.997.903,42
3.	Meningkatnya Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Kepulauan Riau	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau	Juta Rupiah	6.947.814,54	7.295.205,27	7.659.965,53	8.042.963,81	8.445.112,00
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Kepulauan Riau	Miliar Rupiah	5.819,81	6.925,58	8.241,44	9.807,31	11.642,70
		Devisa Pariwisata Kepulauan Riau	Juta USD	2.870,43	3.243,58	3.665,25	4.141,73	4.770,20
		Tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau	Orang	294.642	317.193	341.471	367.607	395.744
		Investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	Juta Rupiah	2.937.364,16	3.280.431,44	3.663.567,00	4.091.450,60	4.569.308,55
D.	Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau							
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Bahari dan Danau Serta Pemanfaatan Jasa Kelautan Berkelanjutan	Prioritisasi Destinasi Pariwisata Prioritas berbasis bahari dan danau	Lokasi Destinasi Pariwisata Bahari	10	10	10	10	10
		Jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas	Ribu Perjalanan	13.686,56	14.435,13	15.231,82	16.080,40	16.985,12
		Jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas	Ribu Kunjungan	12.204,23	13.144,47	14.135,61	15.183,99	16.275,78

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan Kementerian dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 untuk postur alokasi anggaran disusun secara proporsional terhadap kontribusi indikator kinerja sektor pariwisata baik yang diartikulasikan sesuai dengan arah kebijakan sektor maupun yang diamanatkan dalam penugasan RPJMN Tahun 2025-2029. Sementara itu untuk postur penerimaan, umumnya terdapat 4 (empat) komponen sumber penerimaan yaitu 1) Rupiah Murni (RM), 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak, 3) Badan Layanan Umum (BLU), dan 4) Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Pada postur alokasi pembiayaan kerangka pendanaan akan diproyeksikan sesuai dengan proporsi beban kinerja setiap unit atau kedeputian. Adapun penganggaran yang dikategorisasikan berdasarkan urusan secara umum pembobotannya untuk Satker Pusat sebesar 60% (enam puluh persen), untuk Badan Pelaksana Otorita sebesar 5% (lima persen) dan untuk Politeknik Pariwisata sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Adapun untuk postur alokasi anggaran Kementerian, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tabel Postur Alokasi Anggaran Kementerian Pariwisata

Sasaran Strategis	Satuan Kerja	Prakiraan Kebutuhan (%)
		2025 - 2029
SS 1 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataaan	Satker Pusat	60%
	Badan Pelaksana Otorita	5%
	Politeknik Pariwisata	35%
SS 2 Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	Satker Pusat	60%
	Badan Pelaksana Otorita	5%
	Politeknik Pariwisata	35%

Sementara itu, untuk estimasi rasio anggaran unit atau kedeputian mulai dari eselon I sampai dengan eselon II disajikan dalam tabel 4.4. berikut ini:

Tabel 4.4 Tabel Rasio Proyeksi Alokasi Anggaran Kementerian Pariwisata, per-Unit/Deputi Tahun Anggaran 2025–2029

Unit Kerja	Kebutuhan Pertahun (Indikator / Persentase Alokasi Anggaran)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	20 IK 2,5%	20 IK 2,5%	20 IK 2,5%	20 IK 2,5%	20 IK 2,5%
Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	4 IK 0,41%	4 IK 0,41%	4 IK 0,41%	4 IK 0,41%	4 IK 0,41%
Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri	4 IK 0,41%	4 IK 0,41%	4 IK 0,41%	4 IK 0,41%	4 IK 0,41%
Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi	5 IK 0,41%	5 IK 0,41%	5 IK 0,41%	5 IK 0,41%	5 IK 0,41%
Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat	3 IK 0,41%	3 IK 0,41%	3 IK 0,41%	3 IK 0,41%	3 IK 0,41%
Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional	2 IK 0,41%	2 IK 0,41%	2 IK 0,41%	2 IK 0,41%	2 IK 0,41%
Asisten Deputi Manajemen Strategis	1 IK 0,41%	1 IK 0,41%	1 IK 0,41%	1 IK 0,41%	1 IK 0,41%
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	19 IK 2,9%	19 IK 2,9%	19 IK 2,9%	19 IK 2,9%	19 IK 2,9%
Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	4 IK 0,48%	4 IK 0,48%	4 IK 0,48%	4 IK 0,48%	4 IK 0,48%
Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata	4 IK 0,48%	4 IK 0,48%	4 IK 0,48%	4 IK 0,48%	4 IK 0,48%
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%
Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata	3 IK 0,48%	3 IK 0,48%	3 IK 0,48%	3 IK 0,48%	3 IK 0,48%
Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%
Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%	5 IK 0,48%
Deputi Bidang Industri dan Investasi	27 IK 2,0%	27 IK 2,0%	27 IK 2,0%	27 IK 2,0%	27 IK 2,0%
Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi	4 IK 0,40%	4 IK 0,40%	4 IK 0,40%	4 IK 0,40%	4 IK 0,40%

Unit Kerja	Kebutuhan Tahunan (Indikator / Persentase Alokasi Anggaran)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%
Asisten Deputi Manajemen Industri	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%
Asisten Deputi Manajemen Investasi	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%
Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan	2 IK 0,40%	2 IK 0,40%	2 IK 0,40%	2 IK 0,40%	2 IK 0,40%
Asisten Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%	3 IK 0,40%
Deputi Bidang Pemasaran	36 IK 10,7%	36 IK 10,7%	36 IK 10,7%	36 IK 10,7%	36 IK 10,7%
Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%
Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata	2 IK 1,78%	2 IK 1,78%	2 IK 1,78%	2 IK 1,78%	2 IK 1,78%
Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara	3 IK 1,78%	3 IK 1,78%	3 IK 1,78%	3 IK 1,78%	3 IK 1,78%
Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%
Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%
Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%	4 IK 1,78%
Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)	38 IK 7,7%	38 IK 7,7%	38 IK 7,7%	38 IK 7,7%	38 IK 7,7%
Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)	4 IK 1,28%	4 IK 1,28%	4 IK 1,28%	4 IK 1,28%	4 IK 1,28%
Asisten Deputi Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran	7 IK 1,28%	7 IK 1,28%	7 IK 1,28%	7 IK 1,28%	7 IK 1,28%
Asisten Deputi <i>Event</i> Daerah	4 IK 1,28%	4 IK 1,28%	4 IK 1,28%	4 IK 1,28%	4 IK 1,28%
Asisten Deputi <i>Event</i> Nasional	2 IK 1,28%	2 IK 1,28%	2 IK 1,28%	2 IK 1,28%	2 IK 1,28%
Asisten Deputi <i>Event</i> Internasional	3 IK 1,28%	3 IK 1,28%	3 IK 1,28%	3 IK 1,28%	3 IK 1,28%

Unit Kerja	Kebutuhan Tahunan (Indikator / Persentase Alokasi Anggaran)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Asisten Deputi Strategi <i>Event</i>	1 IK 1,28%	1 IK 1,28%	1 IK 1,28%	1 IK 1,28%	1 IK 1,28%
Sekretariat Kementerian	1 IK 31,6%	1 IK 31,6%	1 IK 31,6%	1 IK 31,6%	1 IK 31,6%
Biro Umum dan Hukum	5 IK 5,26%	5 IK 5,26%	5 IK 5,26%	5 IK 5,26%	5 IK 5,26%
Biro Perencanaan dan Keuangan	9 IK 5,26%	9 IK 5,26%	9 IK 5,26%	9 IK 5,26%	9 IK 5,26%
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	5 IK 5,26%	5 IK 5,26%	5 IK 5,26%	5 IK 5,26%	5 IK 5,26%
Biro Komunikasi	4 IK 5,26%	4 IK 5,26%	4 IK 5,26%	4 IK 5,26%	4 IK 5,26%
Inspektorat	3 IK 5,26%	3 IK 5,26%	3 IK 5,26%	3 IK 5,26%	3 IK 5,26%
Biro Data dan Sistem Informasi	4 IK 5,26%	4 IK 5,26%	4 IK 5,26%	4 IK 5,26%	4 IK 5,26%
Politeknik	72 IK 37,5%	72 IK 37,5%	72 IK 37,5%	72 IK 37,5%	72 IK 37,5%
Badan Otorita	60 IK 5,2%	60 IK 5,2%	60 IK 5,2%	60 IK 5,2%	60 IK 5,2%

Keterangan : IK = Indikator Kinerja

Catatan:

- 1) Disusun berdasarkan rata-rata proporsi anggaran tahun 2025-2026
- 2) Anggaran per tahun bersifat dinamis, mengikuti ketersediaan dan arahan Menteri Pariwisata

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan K/L untuk jangka menengah. Renstra disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

Selaras dengan amanat dalam RPJMN, Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 telah mengacu pada arah kebijakan PN 3, dengan Program Prioritas Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan serta juga mendukung PN 2 dengan Kegiatan Prioritas Pariwisata berbasis Bahari dan Danau. Kedua PN tersebut telah dituangkan dalam bentuk sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan yang mendukung pengembangan 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu Lombok-Gili Tramen, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai serta penguatan 3 (tiga) Destinasi Prioritas Regeneratif yaitu Bali, Kepulauan Riau dan *Greater Jakarta*.

Dokumen Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Renstra unit eselon I Kementerian. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kementerian dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi atas Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra merupakan bagian integral dari siklus manajemen pembangunan nasional, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui pengendalian dan evaluasi, Kementerian dapat (1) memantau dan mengoreksi penyimpangan serta memastikan program dan kegiatan, implementasi strategi pembangunan selaras dengan arah kebijakan dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra; (2) mengidentifikasi hambatan dan risiko yang mempengaruhi pencapaian hasil; dan (3) memberikan dasar bagi perumusan langkah korektif dan penyesuaian kebijakan agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Oleh karena itu Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 perlu dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Kementerian. Renstra dan RKT dimaksud yang akan menjadi pedoman utama seluruh unit kerja dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan, ke dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang di lingkungan Kementerian. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan seluruh pegawai dapat mengetahui peran dan kontribusinya masing-masing terhadap seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029.

Sebagai bagian akhir dari siklus perencanaan strategis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian berjalan selaras dengan visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Hasil pengendalian dan evaluasi akan menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan, penyesuaian strategi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program di periode berjalan maupun perencanaan strategis berikutnya. Dengan demikian, keberlanjutan pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas kinerja dan mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata yang berdaya saing, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kementerian Pariwisata								1.384.100	2.114.300	2.458.400	2.563.300	2.746.478	
	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataaan							532.900	1.076.500	1.299.100	1.294.100	1.356.478	
	IKSS 1.1 Rasio PDB Pariwisata (%)		4,2-4,3	4,60 - 4,70	4,70 - 4,80	4,80 - 4,90	4,90-5,00						
	IKSS 1.2. Devisa Pariwisata (miliar USD)		17,1-18,3	22,00 - 24,70	25,50 - 28,60	29,30 - 32,90	32,00-39,40						
	IKSS 1.3 Pengeluaran wisatawan mancanegara (USD/kunjungan)		1.220	1.372-1.404	1.447-1.497	1.527-1.578	1.600-1.672						
	IKSS 1.4 Tenaga kerja pariwisata (juta orang)		25,75	26,53	27,33	28,15	29,00						
	IKSS 1.5 Kunjungan wisatawan mancanegara (juta kunjungan)		14,0-15,0	16,0-17,6	17,6-19,1	19,2-20,9	20,0-23,5						
	IKSS 1.6 Perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)		1.084	1.176	1.275	1.383	1.500						
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur							851.200	1.037.800	1.159.300	1.269.200	1.390.000	
	IKSS 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)		86,5	87,5	88,5	89,5	90,5						
Program 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata								558.739	923.563	1.015.085	1.053.208	1.085.878	Deputi Bidang Sumber Daya

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													dan Kelembagaan
	Sasaran Program (SP) 1.1 : Tersempainya Tenaga Kerja Pariwisata pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas							9.735	5.840	6.838	7.873	8.958	
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Bali (orang)	Bali	644.270	651.718	659.253	666.874	674.584						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Greater Jakarta (DKI) (orang)	DKI Jakarta	1.537.529	1.557.469	1.577.668	1.598.129	1.618.855						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Greater Jakarta (Jawa Barat) (orang)	Jawa Barat	5.591.063	5.811.446	6.040.515	6.278.613	6.526.097						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Greater Jakarta (Banten) (orang)	Banten	1.523.452	1.635.835	1.756.507	1.886.081	2.025.213						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau (orang)	Kepulaua n Riau	294.642	317.193	341.471	367.607	395.744						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Borobudur- Yogyakarta-Prambanan (Jawa Tengah) (orang)	Jawa Tengah	3.280.514	3.408.096	3.540.640	3.678.338	3.821.392						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Borobudur- Yogyakarta-Prambanan (DIY) (orang)	DIY	454.432	459.686	465.000	470.376	475.814						
	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Danau Toba (orang)	Sumatera Utara	1.199.556	1.227.710	1.256.524	1.286.014	1.316.197						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena (orang)	NTB	544.460	589.502	638.270	691.073	748.244						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Tenaga Kerja pariwisata Manado Likupang (orang)	Sulawesi Utara	219.919	223.800	227.750	231.769	235.860						
	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Bangka Belitung (orang)	Bangka Belitung	109.216	113.192	117.313	121.584	126.011						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Raja Ampat (orang)	Papua Barat Daya	9.054	9.623	10.227	10.869	11.552						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo (orang)	NTT	304.910	324.957	346.323	369.094	393.362						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Bromo-Tengger-Semeru (orang)	Jawa Timur	3.954.841	4.121.599	4.295.388	4.476.505	4.665.259						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Wakatobi (orang)	Sulawesi Tenggara	243.687	256.301	269.569	283.523	298.200						
	Jumlah Tenaga kerja pariwisata Morotai (orang)	Maluku Utara	82.835	86.163	89.625	93.226	96.971						
	SP 1.2 : Termanfaatkannya Kerja Sama dan Kebijakan Strategis Bidang Kepariwisata							14.590	17.940	18.850	19.980	20.770	
	Presentase Tindak Lanjut Kerja Sama dan Kebijakan Strategis Bidang Kepariwisata (%)		50	50	50	60	70						
	SP 1.3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM Kepariwisata							775	2.340	1.030	1.150	1.300	
	Persentase Lulusan Politeknik Pariwisata yang Terserap di Sektor Pariwisata ≤ 3 bulan (%)		55	57	59	60	62						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas Masyarakat								7.000	1.858	1.858	1.858	1.858	Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat
	Sasaran Kegiatan (SK) 1 : Terfasilitasi Masyarakat melalui Pelatihan												
	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi melalui pelatihan kapasitas berbasis pariwisata berkelanjutan (orang)		210	480	528	581	639	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi melalui pelatihan soft skill (orang)		210	600	660	726	799	2.850	350	350	350	350	
	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi melalui pelatihan keterampilan manajemen (orang)		210	400	440	484	532	2.150	508	508	508	508	
Kegiatan 2 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri								2.735	3.982	4.980	6.015	7.100	Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
	SK 2.1 Terfasilitasinya Sertifikasi SDM Pariwisata												
	Jumlah Standar Kompetensi Pariwisata yang disusun dan dimutakhirkan (NSPK)		3	4	5	5	5	300	400	500	500	500	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang mengikuti Uji Kompetensi (orang)		2.000	2.000	2.500	3.000	3.500	1.150	1.562	1.700	1.975	2.300	
	SK 2.2 Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi												
	Jumlah Kurikulum dan Modul Pariwisata yang disusun dan dimutakhirkan (NSPK)		105	105	105	105	105	525	500	500	500	500	
	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)		250	300	400	500	600	760	1.520	2.280	3.040	3.800	
Kegiatan 3 : Pengembangan Manajemen Strategis								7.620	8.370	9.280	10.410	11.200	Asisten Deputi Manajemen Strategis
	SK 3.1 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Kepariwisata												
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Bidang Kepariwisata yang dihasilkan (rekomendasi kebijakan)		3	3	4	4	5	7.190	7.940	8.850	9.980	10.770	
Kegiatan 4 : Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Internasional								7.400	10.000	10.000	10.000	10.000	Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional
	SK 4.1 Terselenggaranya Kerjasama Internasional Bidang Pariwisata												
	Jumlah Kerjasama Internasional bidang pariwisata (kesepakatan)		3	3	3	3	3	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah NSPK peningkatan kapasitas SDM aparatur (NSPK)		4	4	4	5	5	400	450	480	500	550	
	SK 5.3 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata												
	Jumlah Kegiatan Layanan Pembinaan, Fasilitasi, Koordinasi dan Layanan Konsultasi Pendidikan Vokasi (kegiatan)		5	5	5	5	5	1.474	1.621	1.783	1.961	2.157	
	Jumlah Pedoman Teknis/Produk Hukum Pembinaan, Fasilitasi, Koordinasi dan Layanan Konsultasi Pendidikan Vokasi (NSPK)		1	1	1	1	1	36	40	44	48	48	
Kegiatan 6 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Bali								136.214	142.450	147.950	153.300	158.800	Politeknik Pariwisata Bali
	SK 6.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Bali												
	Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%)		56	58	60	62	64	34.329	35.000	35.500	36.000	36.500	
	Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%)		10	12	15	17	20	10.172	11.000	11.500	12.000	12.500	
	Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau		20	22	25	27	30	8.425	9.000	9.500	10.000	10.500	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%)		35	35	36	36	38	543	1.000	1.500	2.000	2.500	
	SK 6.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata Bali yang berdampak pada kinerja strategis												
	Nilai Indeks kepuasan layanan akademik mahasiswa (skala 1-4)		3,5	3,6	3,65	3,7	3,8	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai)		80	80	81	81	82	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai)		90,78	90,96	91,14	91,32	91,50	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	
Kegiatan 7 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Makassar								80.105	93.553	102.816	111.106	114.742	Politeknik Pariwisata Makassar
	SK 7.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Makassar												
	Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%)		50	59	59	64	64	9027.8	11,827	11,827	11,827	11,827	
	Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%)		35	35	42	42	50	1990	1990	3,981	3,981	4,977	
	Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional (%)		21	21	23	23	25	2042	2,042	2,062	2,062	2,162	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%)		25	37	50	75	100	1718	2.118	2.518	2.918	3.318	
	SK 7.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata Makassar yang berdampak pada kinerja strategis												
	Indeks kepuasan layanan akademik/mahasiswa (skala 1-4)		3	3,25	3,25	3,5	3,5	2656	2.656	2.656	2.656	2.656	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai)		80	80	81	81	81	46326	56.326	61.326	66.326	68.326	
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai)		92	93	93	94	94	865	865	865	865	865	
Kegiatan 8 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Medan								109.109	157.860	167.950	175.940	184.020	Politeknik Pariwisata Medan
	SK 8.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Medan												
	Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%)		51	52	54	56	60	12.500	14.000	14.500	15.000	15.600	
	Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%)		20	21	21	22	22	1.852	2.000	2.200	2.300	2.400	
	Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau		21	23	25	27	29	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%)</i>		11	22	33	44	56	790	820	850	870	880	
	SK 8.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata Medan yang berdampak pada kinerja strategis												
	Indeks kepuasan layanan akademik/ mahasiswa (skala 1-4)		3,15	3,25	3,35	3,45	3,55	6.000	45.000	50.000	55.000	60.000	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai)		81	81	82	82	83	36.200	40.000	42.000	43.000	44.000	
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai)		93,5	94	94	94,5	95	36.200	40.000	42.000	43.000	44.000	
Kegiatan 9 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Palembang								110.138	122.088	127.078	131.028	135.028	Politeknik Pariwisata Palembang
	SK 9.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Palembang												
	Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%)		50	52	54	56	58	14183	14.183	14.283	14.283	14.383	
	Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%)		2	4	5	6	7	4158	4.558	4.958	5.358	5.758	
	Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional (%)		10	10	12	12	14	1180	1.580	1.980	2.380	2.780	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%)		25	25	50	50	75	401	401	401	401	401	
	SK 9.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata Palembang yang berdampak pada kinerja strategis												
	Indeks kepuasan layanan akademik/mahasiswa (skala 1-4)		3	3,1	3,2	3,3	3,5	24515	26.515	28.515	30.515	32.515	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai)		81	81	81	81	81	31487	40.487	42.487	43.487	44.487	
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai)		90,25	90,75	91,25	91,75	92	31487	31.487	31.487	31.487	31.487	
Kegiatan 10 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Lombok								49.654	192.827	202.808	212.191	220.730	Politeknik Pariwisata Lombok
	SK 10.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Lombok												
	Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%)		53	55	57	60	63	120	150	200	200	200	
	Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%)		4	4	5	5	6	1.531	1.883	2.000	2.000	2.000	
	Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau		78	80	82	84	86	1.448	2.567	2.600	3.000	3.000	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Politeknik Pariwisata Lombok												
	Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%)		39	42	45	48	51	450	1.500	1.575	1.650	1.725	
	SK 10.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Lombok Pariwisata Lombok yang berdampak pada kinerja strategis												
	Nilai Indeks kepuasan layanan akademik/ mahasiswa (skala 1-4)		3	3	3	3,5	3,5	34.847	171.525	180.174	188.616	196.968	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai)		80	81	81,5	82	83	61	95	97	100	100	
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai)		95	95,5	96	96,5	97	405	405	1.303	1.355	1.408	
Kegiatan 11 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata NHI Bandung								48.420	188.665	239.765	240.640	241.530	Politeknik Pariwisata NHI Bandung
	SK 11.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata NHI Bandung												
	Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%)		55	58	60	62	64	850	860	870	880	900	
	Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%)		50	55	60	65	65	350	360	375	385	385	
	Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh		25	26	27	28	28	5.500	5.700	5.900	6.200	6.200	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Politeknik Pariwisata NHI Bandung												
	Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%)		50	50	50	55	55	550	550	550	580	580	
	SK 11.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang berdampak pada kinerja strategis												
	Indeks kepuasan layanan akademik/ mahasiswa (skala 1-4)		3	3,10	3,20	3,30	3,50	30.925	170.925	221.425	221.925	222.425	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai)		81	81,50	81,75	82,50	83	55	55	55	55	55	
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai)		90	91	91,5	91,75	92	35	35	35	35	35	
Program 2 : Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan								31.700	39.680	79.970	95.650	111.145	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
	SP 2.1. Meningkatnya daya saing kepariwisataan Indonesia												
	Indeks Pembangunan Pariwisata (<i>Travel & Tourism Development Index</i> , *terbit bienial tahun genap) (peringkat)		22*	22	22*	20	20*						
	Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (nilai)		4.03*	4,05	4.05*	4,07	4.07*						
	Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas		10	10	10	10	10						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	berbasis bahari dan danau (lokasi destinasi pariwisata bahari)												
	SP 2.2 Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Kawasan Otoritatif Danau Toba							10,197	205,088	256,254	230,053	198,990	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kunjungan)		250	1.250	2.250	3.250	4.250						
	Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (perjalanan)		200.000	225.000	247.500	272.250	299.475						
	Jumlah Investasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (USD)		2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000						
	Realisasi Jumlah PNB BLU Badan Pelaksana Otoritatif Danau Toba (juta rupiah)		4.000	4.500	5.000	5.500	6.000						
	SP 2.3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Kawasan Otoritatif Borobudur							5.755	138.075	179.834	191.138	214.471	Badan Pelaksana Otorita Borobudur
	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kunjungan)		30	40	50	65	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (perjalanan)		3.850	4.040	4.230	4.435	4.640						
	Jumlah Investasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (USD)		62.000	75.000	90.000	500.000	1.000.000						
	Realisasi Jumlah PNBPN BLU Badan Pelaksana Otoritatif Borobudur (juta rupiah)		831	995	1.160	1.267	1.428						
	SP 2.4: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo							9986	71.600	93.250	120.000	168.500	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo
	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (kunjungan)		300	400	500	600	700						
	Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (perjalanan)		3.000	4.000	5.000	6.000	7.000						
	Jumlah Investasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (USD)		200.000	300.000	400.000	500.000	600.000						
	Realisasi Jumlah PNBPN BLU Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (juta rupiah)		250	975	1.500	2.500	3.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 12 : Terwujudnya Perancangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan								4.000	4.500	16.000	14.000	15.000	Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata
	SK 12.1 Terwujudnya Perancangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan												
	Jumlah Fasilitas Penerapan Pariwisata Berkelanjutan (kegiatan)		4	7	8	9	10	1.500	2.000	6.000	7.000	8.000	
	SK 12.2 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata (rekendasi kegiatan)		4	6	3	1	1	1.000	1.000	6.000	2.000	2.000	
	SK 12.3 Terselenggaranya Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional												
	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)		1	1	1	1	1	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
	SK 12.4 Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau melalui penyusunan dokumen perencanaan pariwisata												
	Jumlah dokumen perencanaan pariwisata prioritas berbasis bahari		1	1	2	3	3	500	500	2.000	3.000	3.000	

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	aksesibilitas destinasi pariwisata di wilayah I												
	Jumlah Dokumen Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (NSPK)		0	1	3	3	4	0	100	3.300	3.500	3.800	
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan)		12	14	14	16	16	5.000	4.750	6.000	7.000	8.000	
	Jumlah Fasilitas Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang)		0	50	500	600	700	0	100	5.500	6.100	6.600	
	Jumlah Pendukung Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (unit)		0	1	40	60	80	0	50	8.500	12.800	17.000	
	SK 15.2 Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau melalui Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I												
	Jumlah fasilitas pengembangan amenitas dan aksesibilitas pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau (kegiatan)		1	1	1	1	1	750	750	1.000	1.500	2.000	
Kegiatan 16 : Peningkatan kualitas dan kuantitas amenitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata di wilayah II								5.550	5.550	23.200	29.730	35.700	Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Pariwisata Wilayah II
	16.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas amenities dan aksesibilitas destinasi pariwisata di wilayah II												
	Jumlah Dokumen Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (NSPK)		0	1	3	3	3	0	100	2.100	2.300	2.500	
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan)		6	8	10	13	15	3.050	2.800	5.100	6.630	7.650	
	Jumlah Fasilitas Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (orang)		0	50	750	750	750	0	100	5.000	5.500	6.050	
	Jumlah Pendukung Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (unit)		0	1	40	60	80	0	50	8.500	12.800	17.000	
	SK 16.2 Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau melalui Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II												
	Jumlah fasilitas pengembangan amenities		5	5	5	5	5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan aksesibilitas pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau (kegiatan)												
Kegiatan 17 : Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba								10,197	205,088	256,254	230,053	198,990	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
	SK 17.1 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba												
	Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (promosi)		2	3	3	3	3	23	25	28	31	34	
	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kegiatan)		2	3	3	3	3	109	120	132	145	160	
	SK 17.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba												
	Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif		2	5	5	5	5	292	321	353	389	428	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba												
	Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kesepakatan)		1	1	1	2	2	1.485	2.800	2.940	5.600	5.880	
	Jumlah usaha pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (UMKM)		5	5	5	5	5	798	1.152	1.209	1.269	1.332	
	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kegiatan)		1	1	1	1	1	386	1.600	1.700	1.800	1.900	
	Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Danau Toba (kegiatan)		2	2	2	2	2	652	1.100	1.200	1.300	1.400	
Kegiatan 18 : Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Borobudur								5.755	138.075	179.834	191.138	214.471	Badan Pelaksana Otorita Borobudur
	SK 18.1 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur												
	Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif		1	1	2	2	2	100	284	595	625	657	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pariwisata Borobudur (promosi)												
	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kegiatan)		1	1	1	2	2	559	587	617	1.295	1.360	
	SK 18.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur												
	Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (promosi)		1	2	2	2	2	170	358	376	395	415	
	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kegiatan)		2	3	3	3	3	1.000	2.182	2.291	2.406	2.526	
	SK 18.3 Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur												
	Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Borobudur (unit)		1	2	2	2	2	300	8.840	18.665	15.230	16.166	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (km/hektar/wilayah)		3	3	3	3	3	775	105.110	118.990	120.110	138.346	
	Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Borobudur (unit)		1	1	2	2	3	851	18.014	32.900	44.677	47.601	
	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kegiatan)		2	2	2	2	2	300	325	350	400	800	
	SK 18.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur												
	Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Borobudur (kesepakatan)		1	1	2	2	2	1.700	1.700	3.400	3.400	3.400	
	Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (UMKM)		3	3	3	3	3	300	1.000	2.000	3.000	4.000	
	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kegiatan)		1	1	1	1	2	300	325	350	400	800	
	Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan		2	2	2	2	2	652	1.100	1.200	1.300	1.400	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pariwisata Borobudur (kegiatan)												
Kegiatan 19 : Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores								9986	71.600	93.250	120.000	168.500	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo
	SK 19.1 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores												
	Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (promosi)		2	2	3	3	4	150	300	500	750	1.000	
	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (kegiatan)		1	2	3	3	3	250	1.000	2.000	3.000	4.000	
	SK 19.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo												
	Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (promosi)		2	2	3	3	4	100	300	500	750	1.000	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores												
	Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo (kesepakatan)		1	2	2	2	2	200	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (UMKM)		30	30	30	30	30	300	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (kegiatan)		1	1	1	1	2	100	250	300	400	400	
	Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (kegiatan)		5	6	7	8	9	500	500	750	1,000	1,000	
Program 3: Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata yang Berkualitas								19.367,00	28.500,00	35.420,00	42.900,00	51.740,00	Deputi Bidang Industri dan Investasi
	SP 3.1 Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas							5.694	10.000	11.820	13.800	16.640	
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur- Yogyakarta-Prambanan (juta rupiah)		22.023.561,06	23.124.739,11	24.280.976,07	25.495.024,87	26.769.776,11						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali (juta rupiah)		60.288.199,30	63.302.609,27	66.467.739,73	69.791.126,72	73.280.683,05						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau (juta rupiah)		6.947.814,54	7.295.205,27	7.659.965,53	8.042.963,81	8.445.112,00						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta (juta rupiah)		211.658.892,86	222.241.837,5	233.353.929,38	245.021.625,84	257.272.707,14						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramena (juta rupiah)		2.432.513,02	2.554.138,68	2.681.845,61	2.815.937,89	2.956.734,78						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang (juta rupiah)		2.837.523,71	2.979.399,89	3.128.369,89	3.284.788,38	3.449.027,80						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung (juta rupiah)		3.614.153,73	3.792.692,93	3.980.051,96	4.176.666,53	4.398.051,36						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba (juta rupiah)		2.417.786,51	2.538.675,84	2.665.609,63	2.798.890,11	2.938.834,62						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat (juta rupiah)		18.196,50	19.106,32	20.061,64	21.064,72	22.117,96						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo (juta rupiah)		42.889,25	45.063,74	47.348,47	49.749,04	52.062,72						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tenger-Semeru (juta rupiah)		19.273.275,88	20.225.375,70	21.224.509,26	22.273.000,02	23.453.583,72						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi (juta rupiah)		39.122,37	41.055,01	43.083,13	45.211,44	47.607,88						
	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai (juta rupiah)		2.849,87	2.992,37	3.141,99	3.299,09	3.464,04						
	SP 3.2 Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata							13.673	18.500	23.600	29.100	35.100	
	Nilai investasi sektor pariwisata Bali (juta rupiah)	Bali	9.413.987,20	10.513.486,87	11.741.401,79	13.112.730,13	14.644.221,75						
	Nilai investasi sektor pariwisata Greater Jakarta (juta rupiah)	DKI Jakarta	14.130.860,16	15.784.170,80	17.630.918,78	19.693.736,28	21.997.903,42						
	Nilai investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau (juta rupiah)	Kepulauan Riau	2.937.364,16	3.280.431,44	3.663.567,00	4.091.450,60	4.569.308,55						
	Nilai investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (juta rupiah)	Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	1.191.228,32	1.330.356,95	1.485.735,01	1.659.260,33	1.853.052,41						
	Nilai investasi sektor pariwisata Labuan Bajo (juta rupiah)	Nusa Tenggara Timur	663.817,72	741.347,82	827.932,99	924.630,81	1.032.622,38						
	Nilai investasi sektor pariwisata Danau Toba (juta rupiah)	Sumatera Utara	513.030,98	572.950,06	639.867,34	714.600,17	798.061,37						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramen (juta rupiah)	Nusa Tenggara Barat	5.598.319,34	6.252.170,90	6.982.388,58	7.797.891,49	8.708.640,46						
	Nilai investasi sektor pariwisata Manado-Likupang (juta rupiah)	Sumatera Utara	965.762,85	1.078.558,41	1.204.527,84	1.345.209,78	1.502.322,56						
	Nilai investasi sektor pariwisata Bangka Belitung (juta rupiah)	Bangka Belitung	657.861,88	734.696,38	820.504,70	916.334,93	1.023.357,60						
	Nilai investasi sektor pariwisata Raja Ampat (juta rupiah)	Papua Barat Daya	15.683,97	17.515,77	19.561,51	21.846,18	24.397,69						
	Nilai investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru (juta rupiah)	Jawa Timur	971.309,16	1.084.752,49	1.211.445,36	1.352.935,22	1.510.950,29						
	Nilai investasi sektor pariwisata Wakatobi (juta rupiah)	Sulawesi Tenggara	45.520,70	53.701,14	61.581,79	70.574,60	80.832,32						
	Nilai investasi sektor pariwisata Morotai (juta rupiah)	Maluku Utara	49.626,20	55.422,25	61.895,25	69.124,27	77.197,58						
Kegiatan 20 : Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha								2.572	5.000	5.820	6.600	8.000	Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha
	SK 20.1 Meningkatkan badan usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pada destinasi regeneratif dan destinasi prioritas												
	Jumlah badan usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan penerapan standardisasi dan		50	100	100	100	150	875	1.360	1.600	1.800	2.500	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Regeneratif dan Destinasi Prioritas												
	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)		1	1	1	1	1	1.150	650	780	936	1.123	
	SK 21.2 Meningkatkan Industri Pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas												
	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)		1	1	1	1	1	424	600	720	864	1.037	
	SK 21.3 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Manajemen Industri												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Manajemen Industri (rekomendasi kebijakan)		1	1	1	1	1	1.548	3.750	4.500	5.400	6.480	
Kegiatan 22 : Peningkatan Manajemen Investasi								5.383	7.000	8.600	10.600	13.100	Asisten Deputi Manajemen Investasi
	SK 22.1 Meningkatkan minat dan rencana investasi pariwisata												
	Jumlah Promosi Investasi Destinasi Regeneratif dan		4	4	8	11	13	3.652	3.280	4.300	5.600	7.300	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Destinasi Prioritas (promosi)												
	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (badan usaha)		90	100	120	145	175	1.231	1.720	2.100	2.500	3.000	
	SK 22.2 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Manajemen Investasi												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Manajemen Investasi (rekomendasi kebijakan)		1	2	2	2	2	500	2.000	2.200	2.500	2.800	
Kegiatan 23 : Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan								4.900	6.500	8.000	9.500	11.000	Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan
	SK 23.1 Meningkatnya Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitas, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata Regeneratif dan destinasi prioritas												
	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitas, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata Regeneratif dan		30	40	50	60	70	4.000	5.500	7.000	8.500	10.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	destinasi prioritas (badan usaha)												
	SK 23.2 Tersusunnya NSPK Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan												
	Jumlah NSPK Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan (NSPK)		1	1	1	1	1	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kegiatan 24 : Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan								3.390	5.000	7.000	9.000	11.000	Asisten Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan
	SK 24.1 Meningkatnya Badan Usaha yang mendapat akses pasar dan akses permodalan di Destinasi Pariwisata Regeneratif dan destinasi prioritas												
	Jumlah Badan Usaha yang memperoleh Akses Permodalan (badan usaha)		200	180	200	225	250	1.695	2.350	3.500	4.500	5.500	
	Jumlah Badan Usaha yang memperoleh Akses Pasar (badan usaha)		225	110	180	205	230	1695	2.350	3.000	4.000	5.000	
	SK 24.2 Tersusunnya NSPK Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan												
	Jumlah NSPK Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan (NSPK)		0	1	1	1	1	0	300	500	500	500	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program 4: Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Berkualitas								208.045	484.800	464.300	491.295	516.788	Deputi Bidang Pemasaran
	SP 4.1 Meningkatnya Devisa Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas												
	Devisa Pariwisata Bali (juta USD)	Bali	12.665,99	13.319,94	14.007,65	14.730,86	15.540,00						
	Devisa Pariwisata Jakarta (juta USD)	DKI Jakarta	3.439,37	3.680,13	3.937,74	4.213,38	4.708,60						
	Devisa Pariwisata Kepulauan Riau (juta USD)	Kepulauan Riau	2.870,43	3.243,58	3.665,25	4.141,73	4.770,20						
	Devisa Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (juta USD)	Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	718,37	767,94	820,92	877,57	931,00						
	Devisa Pariwisata Labuan Bajo (juta USD)	Nusa Tenggara Timur	283,52	347,12	424,98	520,32	637,04						
	Devisa Pariwisata Danau Toba (juta USD)	Sumatera Utara	163,91	184,40	207,45	233,38	263,80						
	Devisa Pariwisata Lombok-Gili Tramenan (juta USD)	Nusa Tenggara Barat	800,60	957,52	1.145,19	1.369,65	1.659,00						
	Devisa Pariwisata Manado-Likupang (juta USD)	Sumatera Utara	267,09	297,81	332,06	370,24	427,00						
	Devisa Pariwisata Bangka Belitung (juta USD)	Bangka Belitung	41,54	48,60	56,86	66,52	78,30						
	Devisa Pariwisata Raja Ampat (juta USD)	Papua Barat Daya	42,44	47,96	54,19	61,23	70,30						
	Devisa Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru (juta USD)	Jawa Timur	7,21	9,46	12,41	16,28	22,21						
	Devisa Pariwisata Wakatobi (juta USD)	Sulawesi Tenggara	9,38	11,84	14,93	18,84	23,76						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Devisa Pariwisata Morotai (juta USD)	Maluku Utara	0,78	0,89	1,01	1,14	1,56						
	SP 4.2 Meningkatnya belanja rata-rata wisatawan mancanegara rekreasi												
	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Rekreasi (USD/Kunjungan)		1.257	1.413-1.446	1.490-1.542	1.573-1.625	1.648-1.722						
	SP 4.3 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Rekreasi							45.782	77.000	39.000	47.620	47.620	
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Rekreasi (juta kunjungan)		11,2-12	12,8-14,08	14,08-15,28	15,36-16,72	16-18,8						
	SP 4.4 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Rekreasi pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas												
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Rekreasi pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (ribu kunjungan)		9.763,38	10.515,58	11.308,49	12.147,19	13.020,62						
	SP 4.5 Meningkatnya Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan Tujuan Utama Rekreasi												
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara		488	529	574	622	675						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dengan Tujuan Utama Rekreasi (juta perjalanan)												
	SP 4.6 Meningkatnya Citra Pariwisata Indonesia							123.825	350.000	367.500	385.875	405.168	
	<i>Brand Awareness Index (BAI) Wonderful Indonesia (nilai)</i>		2,5	2,5	2,7	2,7	2,7						
Kegiatan 25 : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I								12.765	19.000	19.000	21.700	21.700	Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I
	SK 25.1 Terlaksananya Promosi Pariwisata Mancanegara I												
	Jumlah Promosi Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas di Pasar Mancanegara I (promosi)		7	9	11	13	15						
	SK 25.2 Meningkatnya Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi di Pasar Mancanegara I												
	Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi di Pasar Mancanegara I (USD/kunjungan)		648	733-750	773-800	816-843	855-893						
	SK 25.3 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara I												
	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar		5,1	5,8	6,4	6,9	7,2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Mancanegara I (juta kunjungan)												
	SK 25.4 Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara I di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas												
	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara I di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (ribu kunjungan)		3.415	3.678	3.956	4.249	4.555						
Kegiatan 26 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara II								13.515	20.000	20.000	25.920	25.920	Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II
	SK 26.1 Terlaksananya Promosi Pariwisata Mancanegara II												
	Jumlah Promosi Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas di Pasar Mancanegara II (promosi)		8	9	10	12	14						
	SK 26.2 Meningkatkan Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi di Pasar Mancanegara II												
	Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi di Pasar Mancanegara II (USD/kunjungan)		1236	1397-1429	1473-1524	1555-1607	1629-1702						

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara Rekreasi (promosi)		15	18	20	22	25	19.219	28.900	28.900	28.900	32.000	
	SK 28.2 Meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara rekreasi di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas												
	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara rekreasi di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (ribu perjalanan)		7.528	7.939	8.378	8.844	9.342						
	SK 28.3 Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara Rekreasi pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas												
	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara Rekreasi pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (promosi)		11	11	11	11	11	19.219	28.900	28.900	28.900	32.000	
Kegiatan 29 : Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata								123.825	350.000	367.500	385.875	405.168	Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
	SK 29.1 Meningkatkan pengenalan dan citra positif <i>Brand Wonderful</i> Indonesia di pasar wisata utama												
	Jumlah Publikasi Pemasaran Pariwisata untuk Pasar Wisatawan		13	13	13	13	13						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Wisatawan Nusantara pada Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas												
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Bali (miliar rupiah)	Bali	123.500,99	136.347,00	150.529,20	166.186,58	183.472,56						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Greater Jakarta	DKI Jakarta	421.993,70	452.039,65	484.224,87	518.701,68	555.633,24						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Kepulauan Riau (miliar rupiah)	Kepulauan Riau	5.819,81	6.925,58	8.241,44	9.807,31	11.642,70						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (miliar rupiah)	Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	23.672,34	25.282,06	27.001,24	28.837,32	30.776,00						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo (miliar rupiah)	Nusa Tenggara Timur	1.175,23	1.417,33	1.709,30	2.061,42	2.488,59						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba (miliar rupiah)	Sumatera Utara	2.048,41	2.179,51	2.319,00	2.467,42	2.619,69						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramen (miliar rupiah)	Nusa Tenggara Barat	14.850,43	17.550,24	20.740,87	24.511,56	28.971,58						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Manado-Likupang (miliar rupiah)	Sumatera Utara	8.982,47	10.572,37	12.443,67	14.646,20	17.232,90						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Bangka Belitung (miliar rupiah)	Kepulauan Bangka Belitung	13.161,89	14.925,58	16.925,61	19.193,64	21.763,57						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Raja Ampat (miliar rupiah)	Papua Barat Daya	290,40	332,80	381,39	437,07	501,08						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Bromo-Tengger-Semeru (miliar rupiah)	Jawa Timur	1.112,12	1.474,67	1.955,41	2.592,87	3.437,90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Wakatobi (miliar rupiah)	Sulawesi Tenggara	132,95	163,66	201,46	248,00	305,40						
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Morotai (miliar rupiah)	Maluku Utara	159,98	177,57	197,11	218,79	242,50						
	SP 5.5 Termanfaatkannya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Event												
	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Event (%)		50	80	80	80	80						
Kegiatan 30 : Pengembangan Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran Berkualitas								8.146	8.146	9.600	10.800	12.000	Asisten Deputi Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran
	SK 30.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Konferensi dan Event Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran yang Berkualitas												
	<i>Bidding dan Delegate Boosting</i> MICE yang diselenggarakan (kegiatan)		1	1	2	3	4	400	400	1.000	1.500	2.000	
	<i>Event</i> Konferensi MICE yang diselenggarakan (kegiatan)		5	5	6	7	8	4.846	4.846	5.500	6.000	6.500	
	Event MICE Dalam Negeri yang Didukung (kegiatan)		15	15	16	17	18	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Event Daerah untuk Wisatawan Bisnis pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas												
	Promosi dan Publikasi Event Daerah untuk Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (promosi)		1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	SK 31.4 Terlaksananya Event Daerah di Destinasi Regeneratif dan Prioritas												
	Pelaksanaan dan Pendukung Event Daerah di Destinasi Regeneratif dan Prioritas (kegiatan)		60	60	60	60	60	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000	
Kegiatan 32 : Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Nasional Berkualitas								28.350	31.175	34.300	37.800	41.500	Asisten Deputi Event Nasional
	SK 32.1 Terlaksananya Event Nasional di Destinasi Regeneratif dan Prioritas												
	Pelaksanaan dan Pendukung Event Nasional di Destinasi Regeneratif dan Prioritas (kegiatan)		31	32	34	36	38	28.350	31.175	34.300	37.800	41.500	
	SK 32.2 Terlaksananya Event Nasional												
	Promosi dan Publikasi Event Nasional (promosi)		3	3	4	4	4	4.160	4.160	4.600	5.050	5.550	
Kegiatan 33 : Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Internasional								16.900	18.590	20.449	22.493	24.743	Asisten Deputi Event Internasional

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Event Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran, <i>Event</i> Daerah, <i>Event</i> Nasional dan <i>Event</i> Internasional Pariwisata (rekomendasi kebijakan)		1	1	1	1	1	8.000	8.800	9.680	10.648	11.713	
Program 6. Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								128.579	145.927	158.777	173.626	187.779	Sekretaris Kementerian
	SP 6.1. Meningkatkan Kualitas Governans Kementerian Pariwisata												
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata (nilai)		86,5	87,5	88,5	89,5	90,5						
	SP 6.2. Meningkatkan Kualitas Governans Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan							15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
	Indeks Kualitas Governans Pada Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (nilai)		78,6	80	81,4	82,8	84,2						
	SP 6.3. Meningkatkan Kualitas Governans Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur							21.000	22.100	23.200	24.300	25.400	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
	Indeks Kualitas Governans Pada Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (nilai)		78,6	80	81,4	82,8	84,2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SP 6.4. Meningkatnya Kualitas Governans Deputy Bidang Industri dan Investasi							12.676	13.000	16.900	21.971	28.512	Deputi Bidang Industri dan Investasi
	Indeks Kualitas Governans Pada Deputy Bidang Industri dan Investasi (nilai)		78,6	80	81,4	82,8	84,2						
	SP 6.5 Meningkatnya Kualitas Governans Deputy Bidang Pemasaran							15.000	18.000	19.000	20.000	21.000	Deputi Bidang Pemasaran
	Indeks Kualitas Governans Pada Deputy Bidang Pemasaran (nilai)		78,6	80	81,4	82,8	84,2						
	SP 6.6 Meningkatnya Kualitas Governans Deputy Bidang Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event)							15.000	16.500	18.150	20.000	21.910	Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)
	Indeks Kualitas Governans Deputy Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Event) (nilai)		78,6	80	81,4	82,8	84,2						
	SP 6.7 Meningkatnya Kualitas Governans Badan Pelaksana Otorita Pariwisata												Badan Pelaksana Otorita Pariwisata
	Indeks Kualitas Governans Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (nilai)		78,6	80	81,4	82,8	84,2						
	Indeks Kualitas Governans Badan Pelaksana Otorita Borobudur (nilai)		78,6	80	81,4	82,8	84,2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Kualitas Governans Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (nilai)		78,6	80	81,4	82,8	84,2						
Kegiatan 35 : Transformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata yang berdampak pada kinerja program								64.102	72.026	78.676	86.353	91.865	Sekretariat Kementerian
	SK 35.1 Terwujudnya Pengawasan Intern yang memberikan Nilai Tambah bagi Pencapaian Tujuan Kementerian Pariwisata							8.114	13.754	15.130	16.642	18.307	Inspektorat
	Nilai Kapabilitas APIP (nilai 1-5)		3,35	3,40	3,45	3,50	3,55						
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI (%)		70	72	74	76	78						
	SK 35.2 Meningkatkan Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Inspektorat							1.324	3.245	3.888	4.275	8.159	Inspektorat
	Tingkat Kepuasan Satker terhadap Layanan Inspektorat (skala 1-4)		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45						
	SK 35.3 Terwujudnya Manajemen BMN, Kearsipan, Regulasi, Kebijakan, dan Pengadaan yang Akuntabel dan Berkualitas							22.190	45.941	50.534	55.578	61.116	Biro Umum dan Hukum
	Indeks Pengelolaan Aset (nilai 1-4)		3,44	3,48	3,52	3,56	3,6						
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (nilai)		86	87	88	89	90						
	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang/Jasa (nilai)		65	70	75	80	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Reformasi Hukum (nilai)		95	95	95	95	95						
	SK 35.4 Meningkatkan Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Umum dan Hukum							117.652	128.856	141.252	154.777	172.630	Biro Umum dan Hukum
	Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Umum dan Hukum (skala 1-4)		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45						
	SK 35.5 Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik							14.773	28.500	31.350	34.400	37.800	Biro Komunikasi
	Indeks kualitas pelayanan publik (nilai 1-5)		4	4	4,05	4,05	4,05						
	Indeks keterbukaan informasi publik (nilai)		93,05	93,05	93,10	93,10	93,10						
	Rasio berita positif dan netral terkait Kementerian Pariwisata di media (%)		83	83	83,5	83,5	83,5						
	SK 35.6 Meningkatkan Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Komunikasi							1.133	1.500	1.680	1.848	2.032	Biro Komunikasi
	Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Komunikasi (skala 1- 4)		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45						
	SK 35.7 Terwujudnya Manajemen Kinerja dan Keuangan yang Berbasis Risiko							4.942	6.000	7.507	8.238	9.040	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Nilai SAKIP (nilai)		80	80,5	81	81,5	82						
	Opini BPK (predikat)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (nilai)		100	100	100	100	100						
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (predikat)		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) (nilai)		94,5	95	95,5	96	96,5						
	Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN) (nilai)		93	93,5	94	94,5	95						
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (skala 1-5)		3,8	3,85	3,9	3,95	4						
	Indeks Kualitas Kebijakan (nilai)		88	89	90	91	92						
	SK 35.8 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan							203.031	246.546	271.201	298.321	328.153	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan (skala 1-4)		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45						
	SK 35.9 Meningkatkan Nilai Profesionalitas SDM dan Kualitas Kelembagaan Kementerian Pariwisata							4.686	8.257	9.807	9.991	10.991	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	Nilai Sistem Merit (nilai 1-500)		335	340	345	350	355						
	Indeks BerAKHLAK (nilai)		81	83	85	87	89						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (%)		90	N/A	90	N/A	96						
	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Organisasi (skala 1-5)		5	5	5	5	5						
	SK 35.10 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi							238	742	816	898	988	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (skala 1-4)		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45						
	SK 35.11 Tersedianya Data dan Informasi untuk mendukung Pengembangan Kepariwisataaan							12.192	7.901	8.691	9.562	10.517	Biro Data dan Sistem Informasi
	Indeks Pemerintahan Berbasis Digital (skala 1-5)		N/A	1,7	N/A	1,9	N/A						
	Tingkat Kematangan Implementasi Arsitektur Pemerintahan Berbasis Digital (skala 0-5)		1	2	3	3	3						
	Indeks Pembangunan Statistik (skala 1-5)		N/A	3	N/A	3,1	N/A						
	SK 35.12. Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Data dan Sistem Informasi							1.787	6.002	6.602	7.262	7.988	Biro Data dan Sistem Informasi
	Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Biro Data dan Sistem Informasi (skala 1-4)												
Kegiatan 36 Transformasi Birokrasi Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang berdampak pada kinerja program								15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
	SK 36.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang berdampak pada kinerja program												
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (nilai)		91,5	92	92,5	93	93,5	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Nilai SAKIP Internal Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (nilai)		80	80	80	80	80	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (%)		70	70	70	70	70	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	SK 36.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan												
	Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (skala 1-4)		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 37 : Transformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yang berdampak pada kinerja program								21.000	22.100	23.200	24.300	25.400	Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
	SK 37.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yang berdampak pada kinerja program												
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (nilai)		91,5	92	92,5	93	93,5	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	
	Nilai SAKIP Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (nilai)		83	83,5	84	84,5	85	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (%)		70	72	74	76	78	500	700	900	1.100	1.300	
	SK 37.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi BidangPengembangan Destinasi dan Infrastruktur												
	Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (skala 1-4)												
Kegiatan 38 : Transformasi Birokrasi Deputi Bidang Industri dan Investasi yang berdampak pada kinerja program								12.676	13.000	16.900	21.971	28.512	Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi
	SK 38.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Industri dan Investasi yang berdampak pada kinerja program												
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Industri dan Investasi (nilai)		91,5	92	92,5	93	93,5	1.718	2.500	3.250	4.225	5493	
	Nilai SAKIP Internal Deputi Bidang Industri dan Investasi (nilai)		79,05	79,2	79,35	79,5	79,65	1.287	1.300	1.690	2.197	2856	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Deputi Bidang Industri dan Investasi (%)		70%	72%	74%	76%	78%	150	150	195	254	330	
	SK 38.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi												
	Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	9.521	9.050	11.765	15.295	19.833	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) yang berdampak pada kinerja program												
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) (nilai)		91,5	92	92,5	93	93,5	600	800	1.000	1.200	1.400	
	Nilai SAKIP Internal Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) (nilai)		81,65	81,75	81,75	81,8	81,85	2.250	2.500	2.750	3.000	3.260	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) (%)		70	71	72	73	74	150	200	250	300	350	
	SK 40.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)												
	Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) (skala 1-4)		3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	12.000	13.000	14.150	15.500	16.900	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 41 : Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba								17.978	24.803	27.283	30.011	32.994	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
	SK 41.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba												
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (nilai)		91,5	92	92,5	93	93,5						
	Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (nilai)		72	75	75	80	80						
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (%)		80	80	80	80	80						
Kegiatan 42 : Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Borobudur								17.836	21.544	23.698	26.065	28.665	Badan Pelaksana Otorita Borobudur
	SK 42.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Borobudur												
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Borobudur (nilai)		91,5	92	92,5	93	93,5						
	Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Borobudur (nilai)		72	75	75	80	80						
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Badan Pelaksana Otorita Borobudur (%)		80	80	80	80	80						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 43 : Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores								13.877	18.224	20.031	22.017	24.202	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
	SK 43.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores												
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (nilai)		91,5	92	92,5	93	93,5						
	Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (nilai)		72	75	77	80	83						
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (%)		80	80	80	80	80						

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
03.05.01 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan																						
Aksesibilitas Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan																						
	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan)	0	1	2	2	2	0	300	600	600	600	0	0	0	0	0	0	300	600	600	600
	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi DIY	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah (kegiatan)	1	1	2	2	2	300	300	600	600	600	0	0	0	0	0	300	300	600	600	600
Pengembangan Atraksi Berbasis Pelestrarian Kearifan Budaya Jawa dan ziarah, termasuk <i>Event</i> berkualitas dan warisan Geologi di BorobudurYogyakarta-Prambanan																						
	<i>Bidding</i> dan <i>Delegate Boosting</i> MICE yang diselenggarakan - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah <i>Bidding</i> dan <i>Delegate Boosting</i> MICE yang diselenggarakan (kegiatan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Nasional - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Nasional (kegiatan)	6	1	1	1	1	600	200	200	200	200	0	0	0	0	0	600	200	200	200	200
	Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional	Jumlah Pelaksanaan	3	1	1	1	1	800	200	200	200	200	0	0	0	0	0	800	200	200	200	200

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	- Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional (kegiatan)																				
	Pendukung <i>Event</i> Daerah - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Pendukung <i>Event</i> Daerah (kegiatan)	8	1	1	1	1	800	200	200	200	200	0	0	0	0	0	800	200	200	200	200
	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	<i>Event</i> Konferensi yang diselenggarakan - Provinsi DIY	Jumlah <i>Event</i> Konferensi yang diselenggarakan (kegiatan)	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200
	<i>Event</i> MICE Dalam Negeri yang Didukung - Provinsi DIY	Jumlah <i>Event</i> MICE Dalam Negeri yang Didukung (kegiatan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Nasional - Provinsi DIY	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Nasional (kegiatan)	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional - Provinsi DIY	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional (kegiatan)	4	1	1	1	1	800	200	200	200	200	0	0	0	0	0	800	200	200	200	200
	Pendukungn Event Daerah - Provinsi Jawa DIY	Jumlah Pendukungn Event Daerah (kegiatan)	3	1	1	1	1	600	200	200	200	200	0	0	0	0	0	600	200	200	200	200
	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi DIY	Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi DIY	Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi DIY	Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi)	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	0	1	0	1	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi DIY	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	1	0	1	1	0	375	0	375	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375
	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah Fasilitasi Pengembangan	3	3	3	4	4	750	750	800	850	900	0	0	0	0	0	750	750	800	850	900

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)																				
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi DIY	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	1	1	2	0	250	250	250	400	0	0	0	0	0	0	250	250	250	400
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	0	0	1	1	250	0	0	500	500	0	0	0	0	0	250	0	0	500	500
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi DIY	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	0	1	0	1	250	0	500	0	500	0	0	0	0	0	250	0	500	0	500
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	0	1	0	1	0	0	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi DIY	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	0	0	1	0	350	0	0	220	0	0	0	0	0	0	350	0	0	220	0
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan																						
	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Jawa Tengah	Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)																				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi DIY	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang)	0	0	50	50	50	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi DIY	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas	0	0	100	50	50	0	0	600	300	300	0	0	0	0	0	0	0	600	300	300

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pariwisata Wilayah I (orang)																				
Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	100	100	150	150	150	118,5	71,50	172,22	172,22	172,22	0	0	0	0	0	118,5	71,50	172,22	172,22	172,22
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi DIY	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	150	200	250	250	250	112	149,51	186,89	186,89	186,89	0	0	0	0	0	112	149,51	186,89	186,89	186,89
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi	50	100	150	150	150	100	390,46	1.026,03	1.026,03	1.026,03	0	0	0	0	0	100	390,46	1.026,03	1.026,03	1.026,03
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi DIY	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	25	100	150	150	150	50	342,57	1.081,27	1.081,27	1.081,27	0	0	0	0	0	50	342,57	1.081,27	1.081,27	1.081,27
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui	25	20	22	25	25	100	90	90	90	90	0	0	0	0	0	100	90	90	90	90

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Jawa Tengah	Pelatihan Kapasitas Berkelanjutan (orang)																				
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi DIY	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berkelanjutan (orang)	100	30	33	35	40	350	100	100	100	100	0	0	0	0	0	350	100	100	100	100
Pemasaran Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan																						
	Publikasi - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Publikasi	1	1	2	2	2	200	200	400	400	400	0	0	0	0	0	200	200	400	400	400
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara	1	1	2	2	3	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
	Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I	1	1	0	1	0	100	200	0	200	0	0	0	0	0	0	100	200	0	200	0
	Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II	1	1	1	1	1	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
	Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	Publikasi - Provinsi DIY	Jumlah Publikasi	1	1	2	2	2	200	200	400	400	400	0	0	0	0	0	200	200	400	400	400

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi DIY	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara	1	1	2	2	3	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	0	0	0	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
	Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi DIY	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I	1	1	0	1	0	90	200	0	200	0	0	0	0	0	0	90	200	0	200	0
	Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi DIY	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi DIY	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	Promosi Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur	Jumlah Promosi Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur	2	3	4	4	4	270	642	971	1.020	1.072	0	0	0	0	0	270	642	971	1.020	1.072
Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan																						
	Promosi Investasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Promosi Investasi Pariwisata	1	1	2	2	2	100	120	288	346	415	0	0	0	0	0	100	120	288	346	415
	Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha)	10	11	12	16	19	62	86	105	125	150	0	0	0	0	0	62	86	105	125	150
	Fasilitasi Akses Permodalan Usaha	Jumlah Badan Usaha yang	0	25	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	mendapat akses permodalan (badan usaha)																				
	Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)	1	0	0	0	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	0	0	0	0
	Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)	1	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0
	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha)	0	25	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Promosi Investasi Pariwisata - Provinsi DIY	Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi)	1	1	2	2	2	100	120	288	346	415	0	0	0	0	0	100	120	288	346	415
	Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata - Provinsi DIY	Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha)	10	11	12	15	18	62	86	105	125	150	0	0	0	0	0	62	86	105	125	150
	Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan -Provinsi DIY	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha)	5	7	9	9	12	500	750	1000	1000	1250	0	0	0	0	0	500	750	1000	1000	1250
	Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata - Provinsi DIY	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)	1	0	0	0	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	0	0	0	0
	Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata - Provinsi DIY	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan	1	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Destinasi Prioritas (industri)																				
	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata - Provinsi DIY	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha)	0	25	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0
	Kerja sama Investasi Badan Pelaksana Otorita Borobudur	Jumlah Kerja sama Investasi Badan Pelaksana Otorita Borobudur	1	2	2	2	2	300	8.840	18.665	15.230	16.166	0	0	0	0	0	300	8.840	18.665	15.230	16.166
	Pendampingan Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur	Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur yang memperoleh pendampingan	1	1	1	1	1	775	105.110	118.990	120.110	138.346	0	0	0	0	0	775	105.110	118.990	120.110	138.346
Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Borobudur-Yogyakarta-Prambanan																						
	Pendampingan Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan)	0	1	1	2	2	0	100	100	200	200	0	0	0	0	0	0	100	100	200	200
	Pendampingan Peningkatan Kualitas,	Jumlah Pendampingan	0	0	1	1	1	0	0	100	150	150	0	0	0	0	0	0	0	100	150	150

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi DIY	Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan)																				
03.05.02 Penguatan Destinasi Regeneratif Bali																						
Penataan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata Sarbagita																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Wisata (rekomendasi kebijakan)	0	0	1	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataaan Nasional - Provinsi Bali	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (IPKN) (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
Pengembangan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas Bali Utara																						
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Bali	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	1	0	1	1	0	375	0	375	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375
	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Bali	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan)	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bali	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Bali	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (orang)	0	50	50	50	50	0	100	300	300	300	0	0	0	0	0	0	100	300	300	300
Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial Bali																						
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bali	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	1	0	0	1	250	250	0	0	500	0	0	0	0	0	250	250	0	0	500
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bali	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
	Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Bali	Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	200	200	250	250	0	0	0	0	0	0	200	200	250	250

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha)	10	12	12	15	15	1.400	1.750	1.750	2.000	2.000	0	0	0	0	0	1.400	1.750	1.750	2.000	2.000
Pengembangan SDM dan Kebudayaan Bali																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Bali	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	150	200	200	200	200	109	139	222	222	222	0	0	0	0	0	109	139	222	222	222
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Bali	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	100	0	50	50	50	80	0	529,58	529,58	529,58	0	0	0	0	0	80	0	529,58	529,58	529,58
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Bali	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang)	75	40	45	50	55	200	154	157	159	159	0	0	0	0	0	200	154	157	159	159

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Promosi dan <i>Branding</i> Bali sebagai Destinasi Terbaik Dunia																						
	Publikasi - Provinsi Bali	Jumlah Publikasi (promosi)	2	2	3	3	3	400	400	600	600	600	0	0	0	0	0	400	400	600	600	600
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Bali	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi)	2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Bali	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara (promosi)	1	2	1	1	1	200	400	200	200	200	0	0	0	0	0	200	400	200	200	200
	Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Bali	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi)	2	2	2	2	2	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150
	Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Bali	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi)	2	2	2	2	2	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200
	Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha)	25	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
03.05.03 Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau																						
Peningkatan Konektivitas Batam-Bintan																						
	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I -	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas	1	1	2	2	2	300	300	600	600	600	0	0	0	0	0	300	300	600	600	600

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Provinsi Kepulauan Riau	Pariwisata Wilayah I (kegiatan)																				
Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim dan Wisata Kesehatan																						
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	1	1	2	0	100	100	150	200	0	0	0	0	0	0	100	100	150	200
Penguatan Identitas KTA Batam, Bintan dan Natuna																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	0	1	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	0	0	1	1	0	0	0	375	375	0	0	0	0	0	0	0	375	375	
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I -	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas	0	0	50	50	50	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Provinsi Kepulauan Riau	Pariwisata Wilayah I (orang)																				
Pengelolaan Risiko Lingkungan dan sosial Kepulauan Riau																						
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata	0	0	1	0	1	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
	Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	200	200	250	250	0	0	0	0	0	0	200	200	250	250
	Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha)	3	3	5	5	7	500	500	700	700	1000	0	0	0	0	0	500	500	700	700	1000
Pengembangan SDM Pariwisata dan Kebudayaan Melayu Kepulauan Riau																						

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	100	100	150	150	150	69	76	198	198	198	0	0	0	0	0	69	76	198	198	198
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	0	0	50	50	50	0	0	722	722	722	0	0	0	0	0	0	0	722	722	722
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang)	0	35	40	45	50	0	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	130	130	130	130
03.05.04 Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta																						
Transformasi Jakarta sebagai Kota Global																						
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi Jawa Barat	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi Banten	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	0	1	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	0	1	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Banten	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	0	1	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
	Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses permodalan (badan usaha)	25	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan																							
	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan)	0	1	2	2	2	0	300	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	300	600	600	600
	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Barat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan)	0	1	2	2	2	0	300	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	300	600	600	600
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi DKI Jakarta	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang)	0	0	100	100	100	0	0	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Barat	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang)	0	0	100	100	150	0	0	600	600	900	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	900
	Bimbingan Teknis Pengembangan	Jumlah orang yang memperoleh	0	0	50	50	100	0	0	300	300	600	600	0	0	0	0	0	0	300	300	600	600

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Banten	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang)																				
Penguatan Destinasi Wisata Urban dan MICE																						
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Barat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	1	1	1	2	100	150	150	150	200	0	0	0	0	0	100	150	150	150	200
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Banten	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	1	1	1	2	100	150	150	150	200	0	0	0	0	0	100	150	150	150	200
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi)	1	2	2	2	2	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pengarusutamaan pariwisata berkelanjutan																						
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	0	1	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di	0	0	1	1	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Banten	Jumlah Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375
	Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha)	10	12	12	15	15	1300	1500	1500	1700	1700	0	0	0	0	0	1300	1500	1500	1700	1700
Pengembangan SDM Pariwisata berstandar Internasional																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	350	100	100	100	100	200	57	99	99	99	0	0	0	0	0	200	57	99	99	99
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi DKI Jakarta	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	0	0	50	50	50	0	0	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	387	387	387
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas	0	45	50	55	60	0	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	170	170	170	170

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi DKI Jakarta	Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang)																				
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Jawa Barat	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	250	200	300	350	400	150	131	361	421	481	0	0	0	0	0	150	131	361	421	481
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Jawa Barat	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berkompetensi (orang)	125	100	150	150	150	147	378	568	568	568	0	0	0	0	0	147	378	568	568	568
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Jawa Barat	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berkelanjutan Berkelanjutan (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Banten	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	100	0	100	100	100	50	0	130	130	130	0	0	0	0	0	50	0	130	130	130
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja	50	0	50	0	50	25	0	391	0	391	0	0	0	0	0	25	0	391	0	391

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/P rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Event MICE Dalam Negeri yang Didukung - Provinsi NTB	Jumlah Event MICE Dalam Negeri yang Didukung (kegiatan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional - Provinsi NTB	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional (kegiatan)	3	1	1	1	1	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional - Provinsi NTB	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional (kegiatan)	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200
	Pendukung Event Daerah - Provinsi NTB	Jumlah Pendukung Event Daerah (kegiatan)	4	1	1	1	1	800	200	200	200	200	0	0	0	0	0	800	200	200	200	200
	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi NTB	Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi NTB	Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi NTB	Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi)	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi NTB	Jumlah Fasilitasi Pengembangan	0	1	1	1	1	0	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	375	375	375	375

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Desa Wisata (kegiatan)																				
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTB	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	2	2	3	0	150	200	200	300	0	0	0	0	0	0	150	200	200	300
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTB	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	0	0	1	1	250	0	0	500	500	0	0	0	0	0	250	0	0	500	500
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTB	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	2	0	1	1	1	700	0	220	220	220	0	0	0	0	0	700	0	220	220	220
Pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Lombok-Gili-Tramena																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi NTB	Jumah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	1	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataaan Nasional - Provinsi NTB	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis	0	0	50	50	50	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi NTB	Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang)																				
Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Lombok-Gili-Tramena																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi NTB	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	250	100	100	100	100	70	77	132	132	132	0	0	0	0	0	70	77	132	132	132
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi NTB	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	150	100	100	100	100	204	416	689	689	689	0	0	0	0	0	204	416	689	689	689
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi NTB	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang)	50	40	40	46	50	200	150	150	150	150	0	0	0	0	0	200	150	150	150	150
Pengembangan pariwisata Lombok-Gili-Tramena																						
	Publikasi - Provinsi NTB	Jumlah Publikasi (promosi)	1	1	2	2	2	200	200	400	400	400	0	0	0	0	0	200	200	400	400	400

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Internasional - Provinsi Sulawesi Utara	dipromosikan di Pasar Internasional (promosi)																				
	MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	375	375	375	375
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	150	150	200	200	0	0	0	0	0	0	150	150	200	200
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	0	1	1	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	0	1	1	1	350	0	220	220	220	0	0	0	0	0	350	0	220	220	220

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Manado/Likupang																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	1	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang)	0	0	50	50	50	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300
Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Manado/Likupang																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	50	200	200	200	200	30	151	261	261	261	0	0	0	0	0	30	151	261	261	261
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan	0	0	50	0	50	0	0	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	476	0	476

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kompetensi - Provinsi Sulawesi Utara	Berbasis Kompetensi (orang)																				
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang)	0	30	30	32	35	0	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110
Pengembangan pariwisata Manado/Likupang																						
	Publikasi - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Publikasi (promosi)	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi)	1	1	1	1	1	400	400	500	500	500	0	0	0	0	0	400	400	500	500	500
	Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi)	0	0	1	0	1	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi)	0	1	0	1	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
	Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi)	0	0	1	0	1	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Destinasi Prioritas (industri)																				
	Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)	0	0	0	0	1	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0
	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha)	0	0	50	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0
Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Manado/Likupang																						
	Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan)	0	0	1	1	2	0	0	200	200	300	0	0	0	0	0	0	0	200	200	300
03.05.07 Pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung																						
Aksesibilitas Pariwisata Bangka Belitung																						

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan)	0	1	2	2	2	0	300	600	600	600	0	0	0	0	0	0	300	600	600	600
Pengembangan atraksi termasuk <i>Event</i> berkualitas dan warisan geologi Bangka Belitung																						
	Pendukung <i>Event</i> Daerah - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Pendukung <i>Event</i> Daerah (kegiatan)	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200
	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	0	1	1	1	0	0	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	375	375	375

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	1	1	2	0	150	200	200	300	0	0	0	0	0	0	150	200	200	300
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	0	1	1	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	0	1	1	1	0	0	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	220	220	220
Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Bangka Belitung																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	1	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan	0	0	50	50	100	0	0	300	300	600	0	0	0	0	0	0	0	300	300	600

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pariwisata Wilayah I - Provinsi Bangka Belitung	Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang)																				
Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bangka Belitung																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	0	100	100	100	100	0	74	130	130	130	0	0	0	0	0	0	74	130	130	130
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	0	0	50	0	50	0	0	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	366	0	366
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang)	0	30	30	35	39	0	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110
Pengembangan pariwisata Bangka Belitung																						
	Publikasi - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Publikasi (promosi)	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200

[illegible]

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha)	0	0	0	0	50	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Bangka Belitung																						
	Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan)	0	0	1	1	2	0	0	250	300	250	0	0	0	0	0	0	0	250	300	250
03.05.08 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba																						
Aksesibilitas Pariwisata Danau Toba																						
	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan)	2	2	2	2	2	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600
Pengembangan atraksi termasuk <i>Event</i> berkualitas dan warisan geologi Danau Toba																						
	Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional	Jumlah Pelaksanaan	2	1	1	1	1	400	200	200	200	200	0	0	0	0	0	400	200	200	200	200

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	- Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional (kegiatan)																				
	Pendukung <i>Event</i> Daerah - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Pendukung <i>Event</i> Daerah (kegiatan)	3	1	1	1	1	600	200	200	200	200	0	0	0	0	0	600	200	200	200	200
	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi)	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	375	375	375	375
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	0	1	1	1	0	0	250	300	350	0	0	0	0	0	0	0	250	300	350
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di	Jumlah Penerapan Pariwisata	0	1	0	0	1	0	250	0	0	500	0	0	0	0	0	0	250	0	0	500

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Destinasi Pariwisata - Provinsi Sumatera Utara	Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)																				
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	2	0	1	1	1	700	0	220	220	220	0	0	0	0	0	700	0	220	220	220
Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Danau Toba																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	1	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)	1	1	1	1	1	978	35	100	100	100	0	0	0	0	0	978	35	100	100	100
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang)	0	0	50	50	50	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300
	Prasarana Bidang Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Jumlah Prasarana Bidang Pariwisata Badan Pelaksana	2	2	2	2	2	677	2.500	3.000	3.500	4.000	0	0	0	0	0	677	2.500	3.000	3.500	4.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Otorita Danau Toba (unit)																				
Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Danau Toba																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	40	100	150	200	200	29	79	185	235	235	0	0	0	0	0	29	79	185	235	235
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	25	100	100	100	100	37	346	781	781	781	0	0	0	0	0	37	346	781	781	781
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang)	175	35	40	45	50	450	150	150	150	150	0	0	0	0	0	450	150	150	150	150
	SDM dan Usaha Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba	Jumlah SDM dan Usaha Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari	5	5	5	5	5	798	1.152	1.209	1.269	1.332	0	0	0	0	0	798	1.152	1.209	1.269	1.332

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Badan Otorita Danau Toba (orang)																				
Pengembangan pariwisata Danau Toba																						
	Publikasi - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Publikasi (promosi)	1	1	2	2	2	200	200	400	400	400	0	0	0	0	0	200	200	400	400	400
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi)	1	1	1	2	2	400	500	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	400	500	500	1.000	1.000
	Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi)	0	0	1	0	1	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi)	0	1	1	1	1	0	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150
	Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi)	0	1	1	1	1	0	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150
	Promosi dan Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Jumlah Promosi dan Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (promosi)	4	8	8	8	8	315	347	381	419	461	0	0	0	0	0	315	347	381	419	461
Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Danau Toba																						

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Promosi Investasi Pariwisata	Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi)	1	1	2	2	2	100	120	288	346	415	0	0	0	0	0	100	120	288	346	415
	Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha)	10	11	14	15	18	123	172	210	250	300	0	0	0	0	0	123	172	210	250	300
	Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha)	0	75	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0
	Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses permodalan (badan usaha)	0	50	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
	Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha)	1	2	2	2	2	150	300	300	300	300	0	0	0	0	0	150	300	300	300	300
	Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai	0	1	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	0

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)																				
	Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)	0	1	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha)	50	0	0	0	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	0	0	0	0
	Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba	Jumlah Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba	1	1	1	2	2	1.485	2.800	2.940	5.600	5.880	0	0	0	0	0	1.485	2.800	2.940	5.600	5.880
Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Danau Toba																						
	Pendampingan Peningkatan Kualitas	Jumlah Pendampingan	0	0	1	1	1	0	0	250	300	350	0	0	0	0	0	0	0	250	300	350

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Provinsi Papua Barat Daya	Destinasi Pariwisata (kegiatan)																				
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	220	220	220	220
Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Raja Ampat																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	0	1	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang)	0	0	50	50	50	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300
Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Raja Ampat																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM	0	0	50	50	50	0	0	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	159	159	159

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pariwisata - Provinsi Papua Barat Daya	Bidang Pariwisata (orang)																				
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	0	0	50	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0
Pengembangan pariwisata Raja Ampat																						
	Publikasi - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah Publikasi (promosi)	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi)	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300
	Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah Promossi Pariwisata Mancanegara I (promosi)	0	0	0	1	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	
	Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi)	1	0	1	1	1	200	0	150	150	150	0	0	0	0	0	200	0	150	150	150
	Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi)	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Raja Ampat																						

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)																				
	Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)	0	0	0	1	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha)	0	0	0	50	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Raja Ampat																						
	Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Papua Barat Daya	Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan)	1	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
03.05.10 Pengembangan destinasi pariwisata Prioritas Labuan Bajo																						
Aksesibilitas Pariwisata Labuan Bajo																						
	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi NTT	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan)	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300
Pengembangan atraksi termasuk <i>Event</i> berkualitas dan warisan geologi Labuan Bajo																						
	<i>Bidding</i> dan <i>Delegate Boosting</i> MICE yang diselenggarakan - Provinsi NTT	Jumlah <i>Bidding</i> dan <i>Delegate Boosting</i> MICE yang diselenggarakan (kegiatan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Event</i> Konferensi yang diselenggarakan - Provinsi NTT	Jumlah <i>Event</i> Konferensi yang diselenggarakan (kegiatan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Event</i> MICE Dalam Negeri yang Didukung - Provinsi NTT	Jumlah <i>Event</i> MICE Dalam Negeri yang Didukung (kegiatan)	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200
	Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Nasional - Provinsi NTT	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Nasional (kegiatan)	1	1	1	1	1	400	200	200	200	200	0	0	0	0	0	400	200	200	200	200
	Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional - Provinsi NTT	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>)	2	1	1	1	1	1.800	200	200	200	200	0	0	0	0	0	1.800	200	200	200	200

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Internasional (kegiatan)																				
	Pendukung <i>Event</i> Daerah - Provinsi NTT	Jumlah Pendukung <i>Event</i> Daerah (kegiatan)	4	1	1	1	1	800	200	200	200	200	0	0	0	0	0	800	200	200	200	200
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi NTT	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	375	375	375	375
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTT	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	200	200	250	300	0	0	0	0	0	0	200	200	250	300
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTT	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	0	1	1	0	250	0	500	500	0	0	0	0	0	0	250	0	500	500
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTT	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	2	0	1	1	1	700	0	220	220	220	0	0	0	0	0	700	0	220	220	220
Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Labuan Bajo																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi NTT	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	1	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi NTT	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi NTT	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang)	0	0	50	50	50	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300
	Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores	Jumlah Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores (unit)	1	1	2	3	4	725	6.000	8.000	10.000	12.000	0	0	0	0	0	725	6.000	8.000	10.000	12.000
Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Labuan Bajo																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi NTT	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	50	100	100	100	100	30	84	139	139	139	0	0	0	0	0	30	84	139	139	139
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi NTT	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan	0	100	100	100	100	0	341	341	341	341	0	0	0	0	0	0	341	341	341	341

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Berbasis Kompetensi (orang)																				
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi NTT	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berkelanjutan Berkelanjutan (orang)	0	35	40	45	50	0	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	130	130	130	130
Pengembangan pariwisata Labuan Bajo																						
	Publikasi - Provinsi NTT	Jumlah Publikasi (promosi)	1	1	2	2	2	200	200	400	400	400	0	0	0	0	0	200	200	400	400	400
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi NTT	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi)	1	1	1	2	2	600	600	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	600	600	600	1.000	1.000
	Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi NTT	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi)	0	1	0	1	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
	Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi NTT	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi)	2	1	1	1	1	200	150	150	150	150	0	0	0	0	0	200	150	150	150	150
	Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi NTT	JumlahPromosi Pariwisata Mancanegara III (promosi)	1	1	1	1	1	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Promosi Pariwisata di Kawasan Labuan Bajo Flores	Jumlah Promosi Pariwisata di Kawasan Labuan Bajo Flores (promosi)	4	4	6	6	8	250	600	1.000	1.500	2.000	0	0	0	0	0	250	600	1.000	1.500	2.000
Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Labuan Bajo																						
	Promosi Investasi Pariwisata	Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi)	1	1	2	2	2	100	120	288	346	415	0	0	0	0	0	100	120	288	346	415
	Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha)	10	11	14	15	18	123	172	210	250	300	0	0	0	0	0	123	172	210	250	300
	Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata - Provinsi NTT	Jumlah Badan Usaha yang memperoleh Akses Permodalan (badan usaha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata - Provinsi NTT	Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha)	0	0	25	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
	Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan,	1	1	2	2	2	150	150	300	300	300	0	0	0	0	0	150	150	300	300	300

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kerja Sama Investasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Jumlah Kerja Sama Investasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	1	2	2	2	2	200	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	200	6.000	6.000	6.000	6.000
	UMKM Bidang Pariwisata yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Usaha dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores	Jumlah UMKM Bidang Pariwisata yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Usaha dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores	30	30	30	30	30	400	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	400	7.500	7.500	7.500	7.500
03.05.11 Percepatan Pembangunan Destinasi Prioritas Bromo Tengger Semeru																						
Aksesibilitas Pariwisata Bromo Tengger Semeru																						
	Fasilitas Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Fasilitas Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan)	0	2	2	2	2	0	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600
Pengembangan atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan warisan geologi Bromo Tengger Semeru																						
	Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Nasional - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Nasional (kegiatan)	2	1	1	1	1	400	200	200	200	200	0	0	0	0	0	400	200	200	200	200
	Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional (kegiatan)	2	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Internasional (kegiatan)																				
	Pendukung <i>Event</i> Daerah - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Pendukung <i>Event</i> Daerah (kegiatan)	11	1	1	1	1	2.400	200	200	200	200	0	0	0	0	0	2.400	200	200	200	200
	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi)	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Jawa Timur	Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi)	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi)	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	375	375	375	375
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di	1	0	1	1	1	350	0	220	220	220	0	0	0	0	0	350	0	220	220	220

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Destinasi Pariwisata (kegiatan)																				
Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan Amenitas pariwisata Bromo Tengger Semeru																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	1	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Timur	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang)	0	0	50	50	100	0	0	300	300	600	0	0	0	0	0	0	0	300	300	600
Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bromo Tengger Semeru																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	200	200	200	200	200	107	149	118	118	118	0	0	0	0	0	107	149	118	118	118
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja	25	100	100	100	100	25	399	845	845	845	0	0	0	0	0	25	399	845	845	845

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kompetensi - Provinsi Jawa Timur	melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)																				
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang)	25	30	35	38	40	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120
Pengembangan pariwisata Bromo Tengger Semeru																						
	Publikasi - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Publikasi (promosi)	1	1	2	2	2	200	200	400	400	400	0	0	0	0	0	200	200	400	400	400
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi)	2	2	2	2	3	1.214	2.000	2.000	2.000	3.000	0	0	0	0	0	1.214	2.000	2.000	2.000	3.000
	Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi)	1	1	1	0	1	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200	0	200
	Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi)	0	0	1	1	1	0	0	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150
	Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Jawa Timur	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi)	1	1	1	1	1	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Bromo Tengger Semeru																						
	Promosi Investasi Pariwisata	Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi)	1	1	2	2	2	100	120	288	346	415	0	0	0	0	0	100	120	288	346	415
	Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha)	10	11	14	15	18	123	172	210	250	300	0	0	0	0	0	123	172	210	250	300
	Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha)	0	0	0	150	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	0
	Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses permodalan (badan usaha)	0	0	0	150	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0
	Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha)	0	1	3	3	5	0	150	400	400	750	0	0	0	0	0	0	150	400	400	750

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)	0	0	1	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
	Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)	0	0	1	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0
	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha)	0	50	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
03.05.12 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi																						
Aksesibilitas Pariwisata Wakatobi																						
	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah Fasilitasi Pengembangan	0	1	1	1	1	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Sulawesi Tenggara	Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan)																				
Pengembangan atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan warisan geologi Wakatobi																						
	Pendukung <i>Event</i> Daerah - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Pendukung <i>Event</i> Daerah (kegiatan)	2	1	1	1	1	400	200	200	200	200	0	0	0	0	0	400	200	200	200	200
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	0	1	1	1	0	0	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	375	375	375
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	0	1	1	1	0	0	300	300	350	0	0	0	0	0	0	0	300	300	350
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	220	220	220	220
Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Wakatobi																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan)	1	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	35	100	100	100	0	0	0	0	0	0	35	100	100	100
	Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang)	0	0	50	50	50	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300
Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Wakatobi																						
	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang)	0	100	100	100	100	0	80	137	137	137	0	0	0	0	0	0	80	137	137	137
	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	0	0	0	50	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata	0	30	34	35	40	0	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	115	115	115	115

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/P rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Berkelanjutan - Provinsi Sulawesi Tenggara	Berkelanjutan (orang)																				
Pengembangan pariwisata Wakatobi																						
	Publikasi - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Publikasi (promosi)	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi)	0	1	1	1	1	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300
	Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi)	0	0	1	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
	Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi)	0	0	1	1	1	0	0	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150
	Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi)	0	0	0	1	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Wakatobi																						
	Promosi Investasi Pariwisata	Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi)	0	1	2	2	2	0	120	288	346	415	0	0	0	0	0	0	120	288	346	415
	Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan	4	5	6	8	10	123	172	210	250	300	0	0	0	0	0	123	172	210	250	300

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha)	0	0	0	0	50	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Wakatobi																						
	Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan)	0	1	1	2	2	0	250	300	350	350	0	0	0	0	0	0	250	300	350	350
03.05.13 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai																						
Aksesibilitas Pariwisata Morotai																						
	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah Fasilitasi Pengembangan	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Maluku Utara	Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan)																				
Pengembangan atraksi termasuk <i>Event</i> berkualitas dan warisan geologi Morotai																						
	Pendukung <i>Event</i> Daerah - Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pendukung <i>Event</i> Daerah (kegiatan)	3	1	1	1	1	600	200	200	200	200	0	0	0	0	0	600	200	200	200	200
	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Maluku Utara	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan)	0	0	1	1	1	0	0	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	375	375	375
	Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Maluku Utara	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	1	1	1	1	2	350	400	400	450	450	0	0	0	0	0	350	400	400	450	450
	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Maluku Utara	Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan)	0	1	1	1	1	0	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	220	220	220	220
Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Morotai																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Maluku Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekommendasi kebijakan)	1	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Provinsi Maluku Utara	Mancanegara III (promosi)																				
Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Morotai																						
	Promosi Investasi Pariwisata	Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi)	1	1	2	2	2	100	120	288	346	415	0	0	0	0	0	100	120	288	346	415
	Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha)	3	4	5	8	10	123	172	210	250	300	0	0	0	0	0	123	172	210	250	300
	Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata - Provinsi Maluku Utara	Jumlah Badan Usaha yang memperoleh Akses Permodalan (badan usaha)	0	0	0	0	25	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata - Provinsi Maluku Utara	Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata	0	0	1	1	2	0	0	300	300	500	0	0	0	0	0	0	0	300	300	500

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas		Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
02.22.06 Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau																						
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Pariwisata Bahari																						
	Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang)	0	35	40	45	50	0	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	130	130	130	130
Penguatan Sektor Pendukung Pariwisata Bahari																						
	Pendukung Event Daerah - Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Pendukung Event Daerah (kegiatan)	2	1	1	1	1	400	200	200	200	200	0	0	0	0	0	400	200	200	200	200
	Pendukung Event Daerah - Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pendukung Event Daerah (kegiatan)	3	1	1	1	1	600	200	200	200	200	0	0	0	0	0	600	200	200	200	200
	Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi)	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Kepariwisata	<p>Perlunya koreksi terhadap substansi dan kelembagaan dalam Undang-Undang Kepariwisata, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata yang multitafsir terkait definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Kepariwisata 2) Kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum dapat dijalankan secara keseluruhan 3) Sumber daya manusia kepariwisataan yang masih kurang dikembangkan secara optimal, urgensi sertifikasi usaha pariwisata bagi pelaku usaha industri pariwisata 4) Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata <p>Belum diaturnya beberapa materi, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaturan mengenai pembangunan budaya pariwisata masyarakat dalam pengaturan pembangunan kepariwisataan 	Sekretariat Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Luar Negeri 9. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 11. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>2) Pengaturan yang berorientasi pada masyarakat sekitar destinasi wisata</p> <p>3) Pengaturan untuk menegakkan ketaatan terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan</p> <p>4) Pengaturan yang mengutamakan konsep <i>cultural-based tourism</i></p> <p>5) Pengaturan mengenai pengelolaan data dan informasi kepariwisataan secara nasional</p> <p>6) Pengaturan yang mengutamakan keaslian dan kekhasan bangunan dalam pembangunan kepariwisataan berbasis kearifan lokal</p> <p>7) Pengaturan mengenai kesesuaian antara perencanaan ruang dan perencanaan kepariwisataan pengaturan tentang mitigasi bencana di destinasi wisata</p> <p>8) Pengaturan mengenai desain kelembagaan badan promosi pariwisata pada level nasional dan daerah</p>		<p>12. Kementerian Hukum</p> <p>13. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</p> <p>14. Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>15. Kementerian Ketenagakerjaan</p> <p>16. Kementerian Keuangan</p> <p>17. Kementerian Komunikasi dan Digital</p> <p>18. Kementerian Kehutanan</p> <p>19. Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>20. Kementerian Perhubungan</p> <p>21. Kementerian Kebudayaan</p> <p>22. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>23. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>24. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>25. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan</p>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				<p>Nasional</p> <p>26. Kementerian Perdagangan</p> <p>27. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>28. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>29. Kementerian Perindustrian</p> <p>30. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>31. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM</p> <p>32. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</p> <p>33. Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>34. Badan Pengaturan BUMN</p> <p>35. Badan Informasi Geospasial</p> <p>36. Badan Nasional Sertifikasi Profesi</p> <p>37. Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p>	
2	Penyusunan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana	RIPPARNAS akan menjadi acuan bagi daerah dalam membangun sektor pariwisata di daerahnya untuk mendukung	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	<p>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan</p> <p>2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi</p>	<p>2026-2029</p> <p>(Tahun 2026 akan</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2026-2045	pembangunan dan arah kebijakan dalam RPJPN		Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Luar Negeri 9. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 11. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 12. Kementerian Hukum 13. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan	dilakukan penyusunan naskah akademik kembali dengan memperhatikan Undang-Undang kepariwisataan yang baru dan penyusunan rancangan RPP dan pembahasan PAK)

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				15. Kementerian Ketenagakerjaan 16. Kementerian Keuangan 17. Kementerian Komunikasi dan Digital 18. Kementerian Kehutanan 19. Kementerian Pekerjaan Umum 20. Kementerian Perhubungan 21. Kementerian Kebudayaan 22. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 23. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 24. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 25. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 26. Kementerian Perdagangan 27. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 28. Kementerian Energi dan Sumber	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				<p>Daya Mineral</p> <p>29. Kementerian Perindustrian</p> <p>30. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>31. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM</p> <p>32. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</p> <p>33. Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>34. Badan Pengaturan BUMN</p> <p>35. Badan Informasi Geospasial</p> <p>36. Badan Nasional Sertifikasi Profesi</p> <p>37. Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p>	
3	Penyelesaian penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) termasuk rencana aksi	RIDPN menjadi dokumen perencanaan pariwisata yang dapat mengatasi masalah dan tantangan pengembangan Kawasan Pariwisata, baik dalam konteks pengembangan pariwisata maupun dalam konteks pembangunan daerah yang lebih luas, untuk selanjutnya dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis pariwisata.	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	<p>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan</p> <p>2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan</p> <p>3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p> <p>4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan</p>	2025 - 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Kebudayaan 5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 7. Kementerian Keuangan 8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 9. Kementerian Dalam Negeri 10. Kementerian Pekerjaan Umum 11. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 12. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 13. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan 14. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)	
4	Penyusunan Rencana Induk	Pada Undang-Undang No.59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN	Deputi Bidang Pengembangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2. Kementerian Koordinator Bidang	2026-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Destinasi Pariwisata Regeneratif	<p>Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi, perlu didukung dengan pelaksanaan kebijakan penyelesaian 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas dan penguatan 3 (tiga) destinasi pariwisata regeneratif, yaitu Bali, Kepulauan Riau dan <i>Greater Jakarta</i>. Hal yang menjadi sasarannya adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan</p> <p>Adapun arah kebijakannya adalah pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui sejumlah intervensi kebijakan dan serangkaian strategi. Salah satu strategi dalam penguatan destinasi pariwisata regeneratif adalah melalui Penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Regeneratif yang dibutuhkan untuk dapat memberi panduan agar terarah dan terintegrasi dengan sektor lainnya.</p>	Destinasi dan Infrastruktur	<p>Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Kementerian Pekerjaan Umum 9. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) 13. Badan Riset dan Inovasi Nasional 14. Kementerian Agraria dan Tata 	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Ruang/Badan Pertanahan Nasional 15. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 16. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif 17. Kementerian Kebudayaan 18. Kementerian Kehutanan 19. Kementerian Kelautan dan Perikanan 20. Kementerian Ketenagakerjaan 21. Kementerian Komunikasi dan Digital 22. Kementerian Koperasi 23. Kementerian Perhubungan 24. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 25. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	
5	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelibatan Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan, Evaluasi, dan	1) Merupakan amanat ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional. 2) Dalam melaksanakan pengelolaan Destinasi Pariwisata Nasional, pelibatan pemangku kepentingan dilaksanakan	Sekretariat Kementerian	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Pekerjaan Umum 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Investasi dan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pelaporan Pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional	<p>sebagai upaya memperbaiki, menyempurnakan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan RIDPN, termasuk rencana aksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>a. Pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pencapaian pelaksanaan RIDPN secara berkala.</p> <p>b. Evaluasi dilakukan untuk memberikan gambaran yang utuh atas capaian pelaksanaan RIDPN sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan.</p>		Hilirisasi/BKPM 5. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)	
6	Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) merupakan inisiatif yang dibangun dalam upaya koordinasi untuk meningkatkan kesadaran nasional dalam membentuk ekosistem kepariwisataan yang memiliki keberlanjutan dan ketahanan tinggi, sehingga mengakselerasi pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pariwisata Indonesia di tingkat global TTDI. Pelaksanaan IPKN sangat krusial sebagai instrumen utama untuk mendukung strategi peningkatan	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	1. Badan Pusat Statistik 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Kementerian Perhubungan 6. Kementerian Keuangan 7. Kementerian Komunikasi dan Digital 8. Kementerian Kehutanan 9. Kementerian Kesehatan	2025 - 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		capaian TTDI Indonesia, lalu menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas kepariwisataan nasional, serta meningkatkan “Awareness” terhadap capaian Pembangunan Kepariwisata Nasional.		10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 11. Kepolisian Republik Indonesia 12. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 13. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 14. Kementerian Kebudayaan 15. Kementerian Pekerjaan Umum 16. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 18. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif 19. Kementerian Hukum 20. Kementerian Pemuda dan Olahraga 21. Bank Indonesia 22. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	
7	Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	SKKNI menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi.	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2025 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				<ul style="list-style-type: none">3. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah5. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi6. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal7. Kementerian Hukum8. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan9. Kementerian Kelautan dan Perikanan10. Kementerian Ketenagakerjaan11. Kementerian Keuangan12. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional14. Kementerian Perdagangan15. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah16. Kementerian Energi dan Sumber	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				<p>Daya Mineral</p> <p>17. Kementerian Perindustrian</p> <p>18. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>19. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM</p> <p>20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</p> <p>21. Badan Pengaturan BUMN</p> <p>22. Badan Nasional Sertifikasi Profesi</p>	
8	Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	Tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam PP tersebut diamanatkan pada Pasal 5 ayat (7) terkait standar kegiatan usaha, Pasal 310 terkait tata cara pelaksanaan pengawasan dan Pasal 467 terkait pengenaan sanksi administratif, maka Kementerian Pariwisata perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif Pada Penyelenggaraan	Deputi Bidang Industri dan Investasi	<p>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p> <p>2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM</p> <p>3. Kementerian Kesehatan</p> <p>4. Kementerian Perdagangan</p> <p>5. Kementerian Pertanian</p> <p>6. Kementerian Tenaga Kerja</p> <p>7. Kementerian Lingkungan Hidup</p> <p>8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>9. Kementerian Perhubungan</p> <p>10. Kementerian Kelautan dan</p>	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata		Perikanan 11.Kementerian Pemuda dan Olahraga 12.Kementerian Sekretariat Negara 13.Kementerian Hukum 14.Badan Standardisasi Nasional/Komite Akreditasi Nasional 15.Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)	
9	Penyusunan regulasi terkait <i>Blue-Green-Circular Economy</i> sektor pariwisata	Sektor pariwisata sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan laut, cuaca ekstrem, dan degradasi daya tarik wisata alam. Disusunnya regulasi ini sebagai kerangka hukum agar pelaku usaha pariwisata daerah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara sistematis pariwisata berkelanjutan.	Deputi Bidang Industri dan Investasi	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, 6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan	2026-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Masyarakat 7. Kementerian Kehutanan 8. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 12. Kementerian Hukum 13. Kementerian Hak Asasi Manusia 14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 15. Kementerian Dalam Negeri 16. Kementerian Kehutanan 17. Badan Riset dan Inovasi Nasional 18. Kementerian Keuangan 19. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)	
10	Penyusunan Regulasi <i>Indonesia</i>	Penyusunan peraturan teknis untuk menjamin kepastian hukum, tata kelola	Deputi Bidang Industri dan Investasi	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2026 - 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<i>Quality Tourism Fund</i>	program, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan, dan pedoman bagi pelaku pariwisata untuk memperkuat ekosistem pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan		<ul style="list-style-type: none"> 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Luar Negeri 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 7. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 8. Kementerian Sekretariat Negara 9. Kementerian Hukum 10. Kementerian Kehutanan 11. Kementerian Kelautan dan Perikanan 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian Ketenagakerjaan 14. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 15. Kementerian Pekerjaan Umum 16. Kementerian Pemuda dan Olahraga 17. Jaksa Agung 	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				18.Badan Pengaturan BUMN 19.Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan 20.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21.Dewan Ekonomi Nasional 22.Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)	
11	Penyusunan Regulasi <i>Food Loss and Waste</i>	Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan pariwisata, mendorong penerapan praktik terbaik, dan berkontribusi pada upaya global dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan keberlanjutan	Deputi Bidang Industri dan Investasi	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Badan Pangan Nasional 4. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 5. Kementerian Dalam Negeri 6. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)	2026 - 2027
12	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Wisata Edukasi	Dalam praktiknya, penyelenggaraan study tour atau kegiatan wisata edukasi selama ini lebih berorientasi pada kegiatan rekreasi dibandingkan pada aspek pendidikan. Selain itu, berbagai	Deputi Bidang Industri dan Investasi	1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Komisi Perlindungan Anak	2025-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>kasus kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa menunjukkan pentingnya regulasi yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan peserta.</p> <p>Oleh karena itu, Pedoman Penyelenggaraan Wisata Edukasi ini disusun untuk menjadi acuan resmi yang memuat prinsip dasar, prosedur operasional, dan panduan teknis pelaksanaan program wisata berbasis pembelajaran agar selaras dengan tujuan pendidikan nasional, mendorong pengembangan pariwisata nasional maupun daerah, serta menjamin keamanan dan keselamatan peserta.</p>			

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDIYANTI PUTRI